

SIDANG TAHUNAN MPR RI 2021 DILAKSANAKAN LURING DAN DARING

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.08/TH.XV/AGUSTUS 2021



76TH
REPUBLIC
INDONESIA

CORONA VIRUS

HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

MOMENTUM BERSATU

MELAWAN COVID-19

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Refleksi
Jangan Menyulut Gaduh
di Tengah Kerja Masyarakat

26 Nasional
Komunikasi Telepon
Ketua Parlemen Turki

39 Selingan
Dari Lembang
Bangsa Belanda

64 Sosialisasi
PPHN Bintang Penunjuk Arah
Pembangunan Nasional



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2021



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR ELINTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.08/TH.XV/AGUSTUS 2021



08 BERITA UTAMA

Momentum Bersatu Melawan Covid-19

Pemerintah tidak bisa menangani sendiri pandemi Covid-19. Pemerintah membutuhkan bantuan, kontribusi dan partisipasi dari semua elemen bangsa secara bergotongroyong menghadapi pandemi.



16 Nasional
Sidang Tahunan MPR RI 2021 Dilaksanakan Luring dan Daring



64 Sosialisasi
PPHN Bintang Penunjuk Arah Pembangunan Nasional



39 SELINGAN
Dari Lembang, Warga Belanda Memperkenalkan Minum Susu



76 Profil
Neng Eem Marhamah

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	14
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	36
Varia MPR	68
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	78
Rehal	82



COVER

Edisi No.08/TH.XV/Agustus 2021
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasisita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Melonjaknya Kasus Covid-19

ANGKA kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan tajam yang cukup mencengangkan sekaligus mengkhawatirkan. Seperti catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dalam empat pekan terakhir (pertengahan Mei hingga pertengahan Juni 2021), kasus Covid-19 melonjak tajam mencapai 92%. Bahkan, di beberapa daerah, kenaikan angka kasus Covid-19 melebihi 100%. Kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, misalnya, mencatat kenaikan sebesar 387%.

Pada bulan Juli, kasus Covid-19 di Indonesia memang bertambah parah. Bahkan World Health Organization (WHO) mengeluarkan laporan yang menyebutkan kasus virus corona di Indonesia dalam sepekan atau pada periode 12 – 18 Juli 2021 mencapai 350.273 atau melonjak 44% dibanding pekan sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu seminggu, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai ratusan ribu kasus baru. Dengan data mingguan dari laporan WHO ini menempatkan Indonesia pada posisi puncak penambahan jumlah kasus Covid-19 di dunia.

Data itu sekaligus menunjukkan jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia juga meningkat drastis. Pada Kamis, 15 Juli 2021, misalnya, jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah 56.757 orang dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Angka 56.757 itu merupakan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi selama pandemi melanda Indonesia, sejak Maret 2020. Selama beberapa hari jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tetap tinggi, di atas 40.000 kasus.

Tidak hanya dalam penambahan jumlah kasus positif, Indonesia juga mencatat rekor kematian tertinggi di dunia akibat Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, selama bulan Juli 2021 angka kematian akibat Covid-19 meningkat drastis sebesar 348%. Pada bulan Juli 2021 terjadi penambahan jumlah kematian sebanyak 27.409 orang atau hampir empat kali lipat dibanding bulan

Juni. Jika dihitung, setiap hari terjadi kematian rata-rata sebesar 1.582 orang.

Bersamaan dengan melonjaknya kasus Covid-19, rumah sakit *full* sehingga pasien baru sulit mendapatkan ruangan IGD maupun perawatan, persediaan oksigen pun sempat hilang, obat-obatan untuk Covid-19 langka, kalau pun ada harganya melambung, dan banyak kasus kematian pada pasien menjalani isolasi mandiri di rumah.

Memang melonjaknya kasus Covid-19 dikaitkan dengan merebaknya varian baru corona, yaitu varian Delta dari India. Namun, sebenarnya banyak faktor yang menjadi penyebab melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Juli 2021 itu. Faktor utama adalah abainya masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Tak jarang kita temui fenomena orang yang tetap berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker. Fenomena itu tidak hanya di kota besar, tetapi lebih banyak di kota-kota kecil.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menghadapi lonjakan kasus Covid-19 tersebut. Fakta di lapangan justru menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak taat dengan aturan dalam PPKM Darurat. Mau tidak mau, ketidaktaatan masyarakat turut menyumbang semakin besarnya jumlah kasus Covid-19.

Tak bisa dipungkiri, apapun kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pengendalian pandemi Covid-19 harus mendapat dukungan dari rakyat, baik warga biasa, akademisi, politisi, pengamat, tokoh masyarakat, tokoh agama, epidemiolog, dan lainnya. Saatnya kita bersatu padu keluar dari kesulitan ini. Semoga semangat dan nilai-nilai perjuangan dalam memerangi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus ini menjadi momentum untuk bersatu melawan Covid-19. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

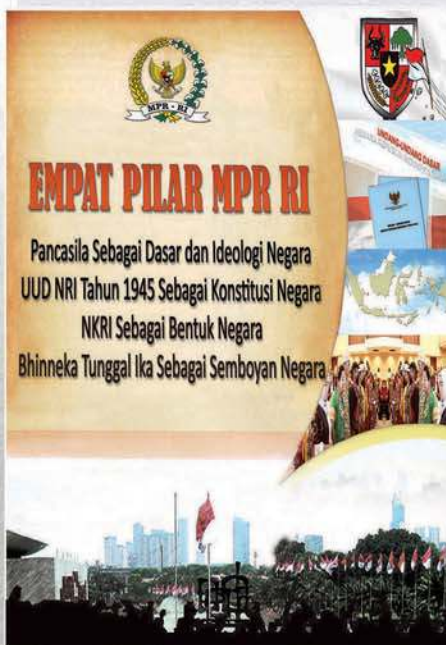
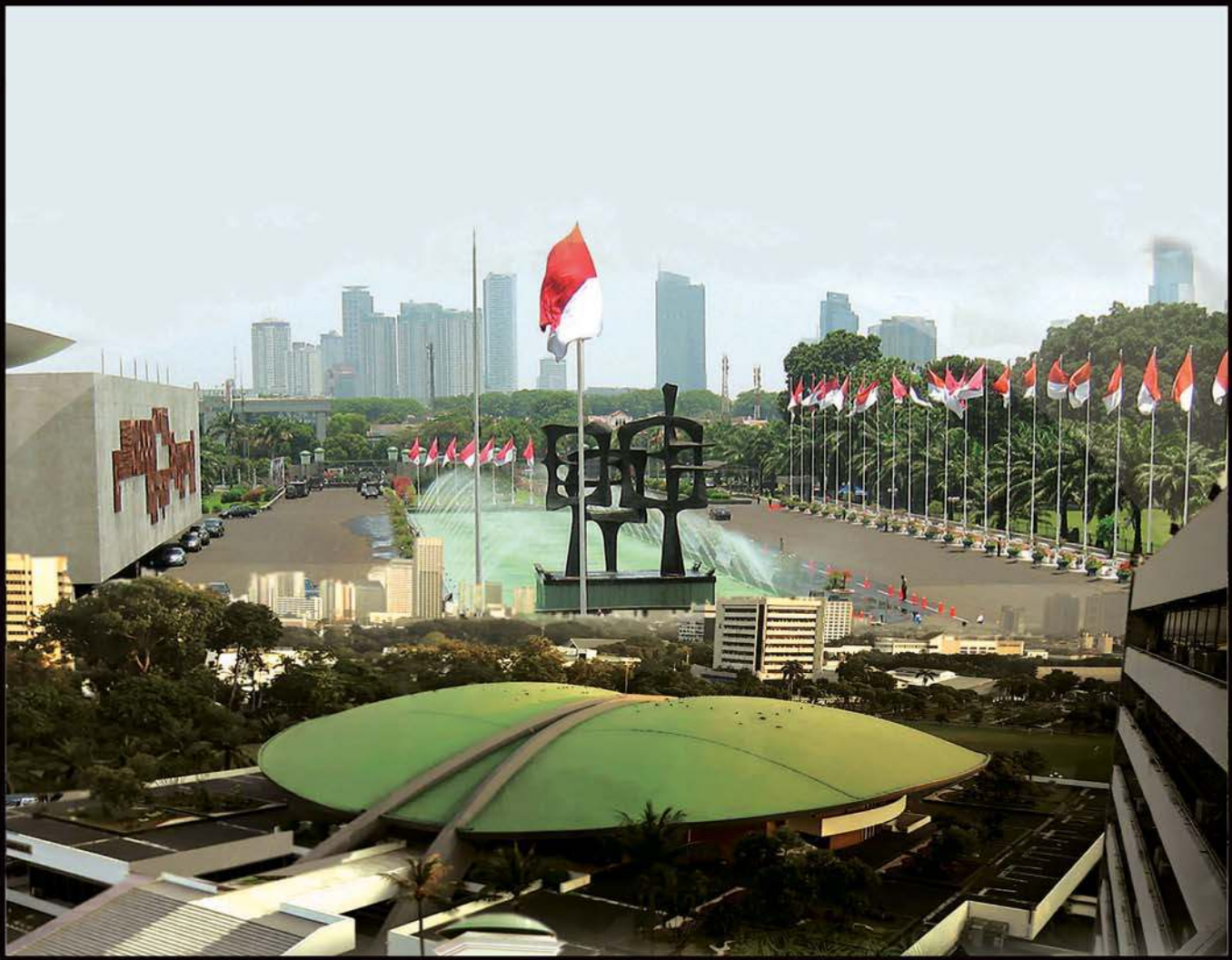
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Jangan Menyulut Gaduh di Tengah Kerja Kemanusiaan Masyarakat

BERBUAT gaduh dan bermanuver politik di tengah ribuan kematian dan penderitaan begitu banyak keluarga akibat pandemi Covid-19 bukan saja tidak berperikemanusiaan, tetapi itu perilaku amoral. Ketika dihadapkan pada aktivitas seluruh elemen masyarakat yang tetap fokus dan bergiat dalam gerakan kemanusiaan menolong mereka yang menderita, para perancang gaduh itu tak lebih dari serigala berbulu domba.

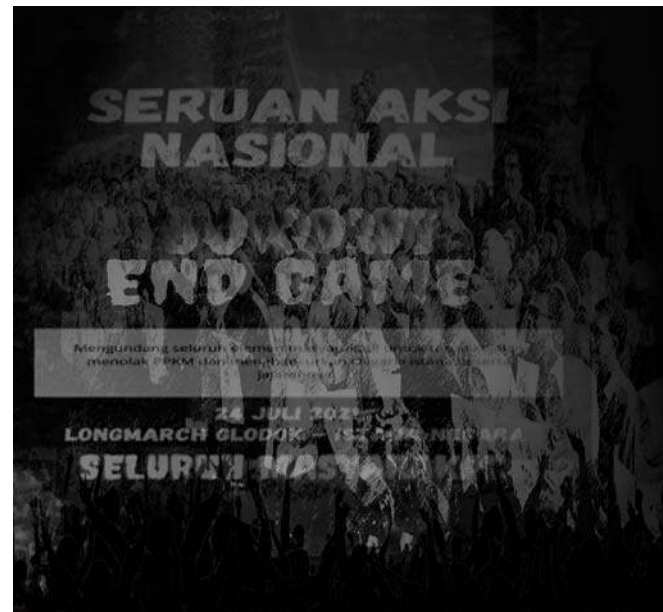
Semua orang tahu bahwa segenap daya dan upaya saat ini terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dengan segala dampak negatifnya. Situasi darurat saat ini menyebabkan sejumlah pasien tak tertolong karena ketersediaan obat-obatan, oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya tidak mencukupi. Sudah bertebaran contoh kasus tentang pasien yang tak tertolong karena berbagai alasan; tidak tertolong karena ketidakseimbangan jumlah dokter dan perawat akibat lonjakan jumlah pasien di setiap rumah sakit; dan tidak tertolong karena rumah sakit kehabisan oksigen dan obat-obatan lainnya.

Kisah duka seorang pria bernama Shiri, warga kota Pontianak, Kalimantan Barat, memberi gambaran utuh tentang kedaruratan situasi saat ini. Kamis lalu (22/7), sejak pagi, Shiri dan puluhan orang lain antri untuk mengisi oksigen medis di Jalan Veteran, Pontianak. Shiri berusaha membawa pulang oksigen untuk menolong sang ibunda yang sesak napas di rumah. Dia sempat membawa ibundanya ke rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit tak bisa merawat karena kehabisan oksigen. Masih mengantri, mendadak telepon selulernya berdering sekitar pukul 11.00 WIB. Sang penelepon memberitahu bahwa ibundanya sudah meninggal dunia. Tangis Shiri pun pecah. "Sudah terlambat, ibu saya sudah meninggal," kata Shiri yang kemudian bergegas membawa pulang tabung tanpa oksigen,

Contoh kasus seperti yang dialami Shiri terjadi di banyak tempat hingga ke pelosok-pelosok desa. Ada ratusan hingga ribuan kematian setiap harinya, yang tentu saja menyebabkan begitu banyak keluarga berduka. Lalu, karena terpapar Covid-19, ada jutaan orang harus menjalani isolasi mandiri (isoman). Mereka pun harus ditolong. Dan,

ada banyak cerita tentang inisiatif warga kebanyakan menolong mereka yang sedang menjalani Isoman.

Isoman menjadi bentuk lain dari upaya memutus rantai penularan Covid-19, karena memang Covid-19 belum ada obatnya. Sayangnya, tidak semua orang bisa menghayati situasi kedaruratan saat ini. Di Bandung, sekelompok warga berunjukrasa memprotes



ketentuan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Di Jakarta ada sebaran informasi di media sosial mengajak aksi unjuk rasa 'Jokowi End Game' yang juga untuk menolak PPKM.

Kalau begitu, strategi apa yang tepat untuk memutus rantai penularan Covid-19? Pertanyaan ini patut dilayangkan kepada mereka yang berbuat gaduh itu. Sampai sejauh ini – ketika pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun kedua – para ahli belum lagi menemukan strategi lain kecuali menerapkan protokol kesehatan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



(Prokes) tentang jaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Ingat bahwa tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi sekarang ini. Virus corona menular dengan sangat cepat, tak terlihat dan sulit terdeteksi serta sangat mudah bermutasi.

Lalu, apa yang akan didapat dari aksi unjuk rasa 'Jokowi End Game' untuk menolak PPKM? Alih-alih menyelesaikan masalah, unjuk rasa 'Jokowi End Game' justru akan mengeskalasi persoalan, bahkan berpotensi memicu krisis multidimensi. Seandainya unjuk rasa itu berhasil mendelegitimasi pemerintah saat ini, sama artinya menyulut krisis politik di tengah puncak krisis kesehatan. Akibatnya adalah kerja penanganan pandemi akan berantakan karena ketidakpastian politik.

Ketidakpastian politik di dalam negeri akan mempersulit upaya untuk mendapatkan vaksin corona, obat-obatan dan alat-alat kesehatan dari sejumlah produsen di beberapa negara. Karena kombinasi krisis kesehatan dan krisis politik selalu butuh biaya ekstra. Tidak mudah bagi sebuah negara mendapatkan komitmen pembiayaan dari lembaga multilateral sekalipun, saat negara itu belum menyelesaikan ketidakpastian politik di dalam negeri.

Jadi, skenario 'Jokowi End Game' itu tidak hanya menimbulkan gaduh di ruang publik, tetapi ada nuansa eksperimen politik. Polisi sebaiknya tak hanya memburu pelaku penyebaran informasi ajakan unjuk rasa itu, melainkan lebih fokus pada petualang atau aktor intelektual di balik kegaduhan ini. Kerja penanganan pandemi Covid-19 dan bhakti sosial masyarakat menolong mereka yang menderita hendaknya tidak diganggu oleh kegaduhan yang

nyata-nyata tidak menyelesaikan masalah.

Masyarakat sudah dibuat kecewa oleh tindak pidana sejumlah orang yang memanfaatkan situasi pandemi sekarang ini untuk mencari keuntungan pribadi. Dari kasus korupsi Bansos (bantuan sosial) oleh pejabat negara, kasus pemalsuan surat hasil tes Covid-19, kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas hasil daur ulang, dan kasus lolosnya WNI dari India sehingga tidak dikarantina, hingga praktik jual-beli surat keterangan hasil swab PCR palsu.

Semua gangguan itu sudah lebih dari cukup, sehingga jangan lagi situasi puncak pandemi saat ini ditunggangi kepentingan politik dengan manuver-manuver yang tidak konstruktif. Sebaliknya, semua sekat dalam masyarakat hendaknya disingkirkan dulu agar semua orang sehat bisa bahu membahu menolong mereka yang menderita.

Hingga pekan ini, kasus covid-19 sudah terdeteksi di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi. Dua hari berturut pada Kamis (22/7) dan Jumat (23/7), terdeteksi kasus baru Covid-19 yang mendekati jumlah 50.000 kasus. Total kasus di dalam negeri pun sudah menembus jumlah tiga juta kasus. Banyaknya pasien yang sembuh patut disyukuri, namun jumlah kematian yang tidak kecil hendaknya mendorong setiap orang tetap waspada. Pada Jumat (23/7), data resmi dari pemerintah menyebutkan ada 1.566 kematian akibat Covid-19.

Banyak kelompok masyarakat di berbagai daerah tengah giat menolong mereka yang berduka dan menderita. Tidak elok jika dalam situasi seperti sekarang ini ada yang bernafsu menyulut gaduh. □

HUT Kemerdekaan RI

Momentum Bersatu Melawan Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemerintah tidak bisa menangani sendiri pandemi Covid-19. Pemerintah membutuhkan bantuan, kontribusi, dan partisipasi dari semua elemen bangsa secara bergotong-royong menghadapi pandemi.

ANGKA kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai rekor. Pada Sabtu, 24 Juli 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dalam kasus harian Covid-19. Pada hari itu terjadi penambahan sebanyak 45.416 pasien positif Covid-19. Dengan penambahan itu, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.127.826 orang.

Berdasarkan data dari laman www.worldometers.info/coronavirus, pada hari yang sama, Rusia berada di peringkat kedua dengan penambahan kasus harian sebanyak 23.947 kasus positif Covid-19. Selanjutnya di peringkat ketiga adalah Meksiko dengan penambahan sebanyak 16.421 kasus positif. Kemudian disusul Thailand di peringkat keempat sebanyak 14.269 kasus.

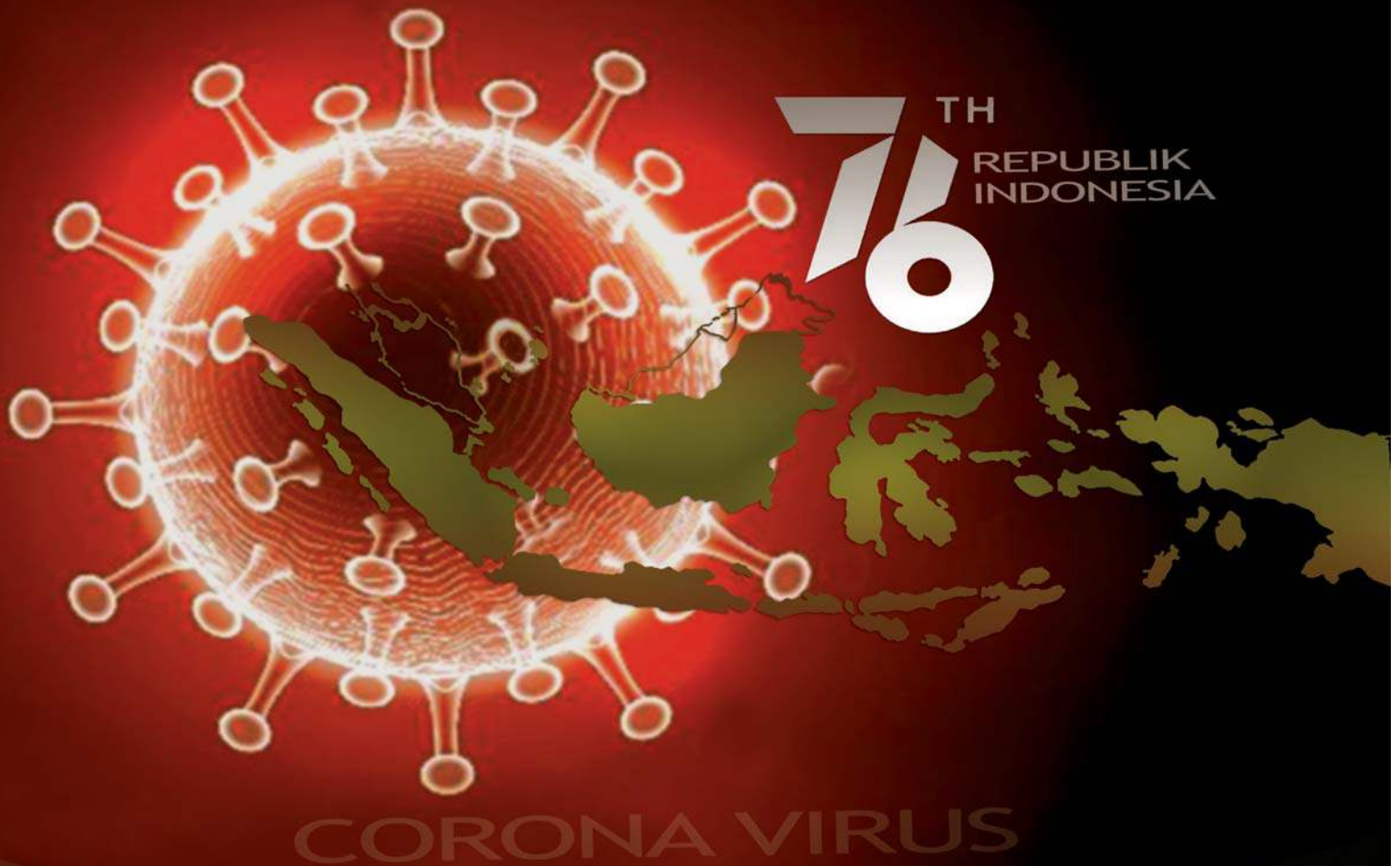
Sebelumnya, World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia mencatat lonjakan drastis kasus Covid-19 di Indonesia. Pada periode 12-18 Juli 2021, Indonesia menduduki peringkat satu dalam kenaikan kasus harian Covid-19. Dari data Epidemiologi Mingguan Covid-19 yang diterbitkan WHO pada 20 Juli 2021, kasus Covid-19 di Indonesia selama periode 12-18 Juli terjadi penambahan sebanyak 350.273 kasus atau



Bambang Soesatyo

melonjak 44% dibanding pekan sebelumnya.

Tidak itu saja. Dalam beberapa hari, Indonesia juga mencatat rekor sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia. Pada Selasa, 27 Juli 2021, Indonesia mencatatkan tambahan kasus kematian sebanyak 1.487 orang. Pada hari berikutnya,



Rabu, 28 Juli 2021, Indonesia kembali berada di puncak dunia dengan kasus



Sjarifuddin Hasan

kematian sebanyak 2.069 orang meninggal dalam satu hari akibat Covid-19. Berdasarkan data Worldometer, Indonesia mencatat kasus kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia selama sepekan berturut-

turut pada 21 – 28 Juli.

Penambahan angka kasus positif dan kematian karena Covid-19 di Indonesia cukup mencengangkan. Semua pihak prihatin dengan keadaan tersebut. Apalagi pada saat itu rumah sakit *collapse* karena membludaknya pasien Covid-19, dibarengi dengan habisnya persediaan oksigen dan langkanya obat-obatan untuk Covid-19. Pimpinan MPR memberi perhatian penuh terhadap lonjakan kasus positif dan kematian akibat Covid-19 ini.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menilai, situasi melonjaknya kasus Covid-19 sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian lebih serius. Mengutip data Satgas Covid-19, dalam empat pekan, kenaikan kasus positif Covid-19 mencapai 92%. Karena itu, Bambang Soesatyo meminta seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada terhadap peningkatan Covid-19 itu. “Dengan menjaga protokol kesehatan

dalam aktivitas sehari-hari serta menaati kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 merupakan kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan juga prihatin karena Indonesia disebut sebagai episentrum Covid-19 di Asia Tenggara bahkan dunia. Sebelumnya, media *The New York Times* menyebutkan Indonesia menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19. Pasalnya, selama beberapa hari berturut-turut, jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di kisaran 30.000 hingga 50.000 kasus melampaui kasus harian di India dan Brasil. “Ini membuktikan kasus Covid-19 belum terkendali,” ujarnya.

Beberapa Faktor

Melihat situasi seperti itu, anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan pemerintah untuk

mewaspada lonjakan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, terdapat varian baru virus corona yang lebih agresif dan mudah menular, seperti varian alpha, beta, delta, dan varian terbaru dari Amerika Latin. “Saya kira ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Pemerintah harus melaksanakan langkah antisipatif menghadapi varian baru agar tidak semakin meluas. Apalagi sampai hari ini masih belum ditemukan formula tepat untuk mengantisipasi lonjakan korban terpapar Covid-19,” katanya kepada *Majelis*.

Saleh Dauly melihat, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka Covid-19 di Indonesia. *Pertama*, karena kurang disiplinnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, terutama di kota kecil. *Kedua*, karena kondisi ekonomi membuat masyarakat tidak mampu membeli masker. Padahal menurut para ahli, masker harus diganti setiap 4 jam. Tetapi tidak semua anggota masyarakat mampu mengganti masker.

Ketiga, tingkat pemahaman masyarakat yang tidak sama terhadap pandemi ini. Ada masyarakat yang takut dengan Covid-19, ada yang tidak tahu sama sekali malah tidak tahu bahaya Covid-19, atau ada yang tidak peduli. Ini menjadi kendala karena kurangnya sosialisasi terkait bahaya Covid-19 sampai ke desa-desa.

Keempat, pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri tidak terlalu ketat. Virus corona itu datang dari luar negeri. Sebelum Maret 2020, tidak ada masyarakat yang terpapar Covid-19. Barulah awal bulan Maret, dua warga terpapar karena berinteraksi dengan orang dari luar negeri (warga Jepang). Faktor dari luar negeri ini sangat berpengaruh, seperti masuknya varian baru Covid-19.

Saleh Dauly juga berujar, pelayanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus Covid-19 ini tidak maksimal. Tingkat keterisian rumah sakit sangat



Saleh Partaonan Dauly

tinggi. Bahkan, rumah sakit umum dijadikan sebagai rumah sakit khusus Covid-19 seperti RS Fatmawati. Tingkat keterisian RS Fatmawati semakin tinggi. Semakin sulit masyarakat mencari tempat untuk perawatan, termasuk di RS Fatmawati. Sementara tenaga kesehatan juga menghadapi masalah, seperti insentif yang terlambat, kelelahan, dan kewalahan menghadapi banyaknya pasien.

“Itu juga yang membuat lonjakan angka Covid-19 di Indonesia,” ujar anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan ini. Belum lagi alat kesehatan sulit diperoleh, seperti obat-obatan dan oksigen. Obat-obatan untuk Covid-19 menjadi barang langka dan harganya melambung, bahkan dijual di pasar ilegal. Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah tidak mampu menurunkan harga obat-obatan untuk Covid-19. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap obat-obatan ini.

Hampir sama, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Handoyo, juga mengaku prihatin dengan melonjaknya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia. Bangsa Indonesia sedang mendapat ujian dan bencana kemanusiaan. Angka Covid-19 yang tinggi disertai dengan jumlah korban yang tinggi pula. “Ini menjadi *concern* kita semua, seluruh bangsa agar kita meningkatkan

kewaspadaan dan kesiapan pada situasi darurat ini. Apalagi dengan adanya varian Delta yang lebih ganas dan cepat menular,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Rahmat Handoyo, penyebab utama yang membuat angka positif Covid-19 di Indonesia melonjak adalah karena abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Meskipun pemerintah sudah memberlakukan PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat, tetap saja masih banyak anggota masyarakat abai dengan protokol kesehatan. “Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa bekerja sendirian. Seluruh masyarakat agar ikut bertanggungjawab. Kalau masih abai, mobilitas masih tinggi, dan ada kepercayaan diri tidak takut Covid, maka bencana kemanusiaan ini akan berlangsung lama,” kata anggota Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini.

Melihat situasi di lapangan, lanjut Rahmat Handoyo, masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, masih berkerumun, dan mobilitas masyarakat pun masih tinggi. “Ini menjadi kendala untuk mengendalikan Covid-19,” tuturnya.

Situasi itu, tambah Rahmat Handoyo, semakin rumit ketika fasilitas kesehatan tidak memadai. Rumah sakit dan IGD penuh hingga pasien harus antri di tenda darurat. Banyak pasien juga ditolak rumah sakit. Persediaan oksigen kosong dan obat-obatan untuk Covid-19 sulit diperoleh. “Semua terpulang ke masyarakat. Kalau ingin selamat taati protokol kesehatan. Tetapi mengubah perilaku ini tidak mudah,” katanya.

Bagi Rahmat Handoyo, pembatasan sosial, seperti PSBB atau PPKM, tidak bisa berjalan efektif apabila tidak disertai dengan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, keberhasilan memutus mata rantai penularan Covid-19 terpulang kepada diri masing-masing. Tingginya angka kasus positif Covid-19 dan melonjaknya tingkat kematian akibat pandemi ini harus menjadi kepedulian dari masing-masing setiap orang.

“Saya percaya kalau kita patuh, taat,

dan disiplin pada PPKM Darurat, maka pandemi ini bisa kita kendalikan dan pembatasan sosial bisa berjalan efektif. Apapun bentuk aturannya, kalau masyarakat masih abai, seperti tidak memakai masker, tidak takut terpapar Covid, dan tidak menjalani protokol kesehatan, maka pandemi ini tidak akan terkendali dan makin panjang waktu untuk memutus mata rantai penularan. Biayanya pun makin besar. Ratusan triliun rupiah tidak akan memberi efek untuk melawan Covid,” paparnya.

Handoyo menambahkan, fenomena yang terjadi belakangan ini, seperti rumah sakit yang penuh, tenaga kesehatan yang sudah kepayahan, obat untuk Covid sulit dicari, dan lain sebagainya, dan semakin banyak korban meninggal akibat Covid-19, tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Korban meninggal akan terus berjatuhan, ratusan triliun anggaran dikeluarkan, dan biaya semakin mahal, tetap akan terjadi bila masih terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan.

“Kita ketuk hati yang paling dalam kepada saudara-saudara kita yang masih abai dengan protokol kesehatan. Hanya dengan protokol kesehatan akan menyelamatkan kita. Jalani protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Prokes adalah kunci keberhasilan pengendalian Covid-19,” tegasnya.

Tidak jauh berbeda. Saleh Daulay berpendapat PPKM secara keseluruhan tidak efektif. PPKM bisa mengurangi interaksi dan mobilitas, namun tidak menurunkan angka kasus positif dan memutus mata rantai penularan Covid-19. “Bagi saya PPKM itu kebijakan serba tanggung. Di satu sisi urusan kesehatan tidak sempurna, di sisi lain perekonomian juga tidak bergerak. Jadi, hanya mengurangi sedikit orang yang terpapar, tapi tidak bisa secara total memperbaiki ekonomi,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pergantian istilah (mulai dari PSBB, PPKM mikro, PPKM Darurat, PPKM level 2 – 4) yang membuat masyarakat sendiri tidak paham. “Seharusnya tidak perlu gonta ganti

istilah. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi kebijakannya. Kalau masyarakat tidak paham dan sulit mengerti maka justru membuat PPKM tidak berjalan maksimal,” katanya.

Bersatu Padu dan Gotong Royong

Saleh Daulay meminta semua pihak untuk terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab pemerintah tidak bisa menangani sendiri pandemi itu. Pemerintah membutuhkan bantuan, kontribusi dan partisipasi dari semua elemen bangsa secara bergotong royong menghadapi pandemi. Cara gotong



Rahmad Handoyo

royong tersebut, antara lain dalam bentuk bantuan pangan kepada mereka yang terpapar Covid-19, mengajak orang untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, memberi informasi yang benar di media sosial, dan lainnya.

Saleh Daulay mengatakan, nilai perjuangan membebaskan diri dari penjajah dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia bisa dijadikan sebagai perjuangan untuk membebaskan dari pandemi Covid-19. Peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat direfleksikan sebagai motivasi dan semangat memerdekakan bangsa ini dari pandemi Covid-19.

“Tanpa bebas dan merdeka dari pan-

demi, kita sulit membangun ekonomi, mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan, dan lainnya. Kita harus bersatu padu keluar dari kesulitan itu. Jika masyarakat sehat secara perlahan kita bisa membenahi kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Saleh.

Rahmad Handoyo juga berpendapat serupa. Menurut Handoyo, untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan persoalan yang mengiringinya, pemerintah tak mungkin berjalan sendiri. Pemerintah pusat bersama elemen masyarakat, seperti tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, harus ikut mendorong kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan.

“Pemerintah sudah pontang-panting bekerja *extra ordinary* dengan berbagai program yang menghabiskan dana triliunan rupiah. Maka perlu dukungan semua elemen masyarakat, yakni epidemiolog, politisi, akademisi, pengamat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. Jangan hanya melontarkan kritik dan menjadi polemik yang akan merugikan kita semua,” katanya.

“Solusinya adalah tinggalkan segala perbedaan, hilangkan kritik tidak membangun, hilangkan salah menyalahkan, jangan merasa komentarnya paling benar. Jangan nyinir dan membuat kegaduhan. Berbeda pendapat itu wajar sebagai penyeimbang. Oposisi itu penting dalam rangka meraih tujuan bersama. Tetapi saat ini tidak ada celah untuk berbeda pendapat. Saatnya bersatu,” sambungnya.

Maka, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus ini, Handoyo mengharapkan, nilai-nilai dan semangat kemerdekaan menjadi pendorong untuk mengendalikan pandemi Covid-19. “Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia bisa menjadi momentum untuk bersatu melawan Covid-19. Kita harus menjalankan protokol kesehatan sekaligus sukseskan program vaksinasi massal,” katanya. □

DER/EFP/BSC

Gonta Ganti Istilah, dari PSBB hingga PPKM

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona pemerintah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya pembatasan sosial. Sejak pandemi merebak pada Maret 2020, sedikitnya pemerintah sudah memakai tujuh istilah untuk pembatasan sosial ini.

PADA awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus pertama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Pengumuman langsung disampaikan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan, saat itu dr. Terawan Agus Putranto. Bertempat di istana Kepresidenan, Jokowi menyebutkan dua pasien pertama Covid-19 di Tanah Air, yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun bernama Sita Tyasutami (pasien1) dan ibunya yang berusia 64 tahun Maria Darmaningsih. Keduanya adalah warga Depok Jawa Barat. Tim Kemenkes langsung melakukan penelusuran (tracing) dan mengisolasi kedua pasien.

Sejak saat itu, Covid-19 menjadi momok yang menakutkan. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain di dunia. WHO (World Health Organization) sudah mendeklarasikan bahwa Covid-19 sebagai pandemi. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sejak awal beberapa negara telah memutuskan untuk melakukan *lockdown*. Di sini *lockdown* artinya mengurung warga atau sebagian warga dengan melarang ke luar atau memasuki wilayah untuk sementara, sebagai tindakan darurat untuk menghindari bahaya. Dalam hal ini, menghindari terjangkit virus Corona.

Sejak awal pandemi, beberapa negara sudah menerapkan *lockdown*, baik seluruhnya maupun sebagian wilayah. Sedikitnya pada waktu itu ada 19 negara yang melakukan *lockdown*. Negara-negara itu, antara lain: China, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Polandia, Irlandia, El Salvador, Spanyol, Denmark, Lebanon, Belgia, Selandia Baru, Malaysia, Inggris, India, dan Afrika Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Di tengah negara-negara lain yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melakukan *lockdown*, pemerintah mengambil kebijakan ala Indonesia yang berbeda. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan *lockdown*, melainkan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Fokus pembatasan ini bukan dengan cara menutup wilayah, melainkan pada pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu selama pandemi Covid-19 munculah beberapa istilah soal pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penularan virus Corona.

Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diteken Presiden Joko Wdodo pada 31 Maret 2020. Kebijakan ini dimulai pada April hingga Juni 2020. Wilayah yang menetapkan PSBB adalah wilayah yang memiliki jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi. Selain itu, virus di wilayah itu telah menyebar secara cepat dan juga terkait dengan wilayah lain. Setiap kepala daerah bisa mengusulkan sendiri PSBB. Pembatas-

an kegiatan masyarakat tersebut meliputi libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan masyarakat (keagamaan, sosial dan budaya, serta di fasilitas umum), pembatasan moda transportasi. Dalam PSBB ini hanya sektor esensial yang bisa beroperasi penuh.

Kedua, PSBB Transisi. Diterapkan sejak Juni hingga September 2020, sebenarnya PSBB Transisi tidak jauh berbeda dengan PSBB. Namun, karena PSBB dianggap berhasil menurunkan lonjakan kasus Covid-19 maka perlu PSBB Transisi sebelum pembatasan sosial dihilangkan sama sekali. Karena itu, aturan dalam PSBB Transisi diperlonggar. Misalnya, pekerja (tidak semua pekerja, jumlahnya hanya boleh 50%) sudah bisa masuk kantor (*work from office*), transportasi hanya boleh diisi 50%, dan restoran boleh makan di tempat hingga jam tertentu.

Namun, kasus Covid-19 tidak berangsur melandai. Bahkan mulai terjadi peningkatan kembali. Keadaan masih belum normal sepenuhnya. Pemerintah kembali menerapkan PSBB Transisi, namun istilahnya diubah menjadi PSBB

Ketat. PSBB Ketat ini mulai Oktober 2020 hingga Januari 2021. Sebagai catatan, banyak pelanggaran dalam PSBB selama ini, terutama kedisiplinan warga masyarakat. Masyarakat seolah mengacuhkan adanya PSBB Transisi maupun PSBB Ketat.

Ketiga, untuk beberapa daerah di luar Jawa – Bali, kasus Covid-19 cukup terkendali. Karena itu, pemerintah kembali mengubah kebijakan, yaitu dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)—sebenarnya hampir sama seperti PSBB—khusus hanya untuk tujuh provinsi di Jawa – Bali. Ketujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali inilah penyumbang terbesar angka kasus

tidak berbeda dengan PPKM. Perbedaannya, PPKM Mikro ini berbasis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW. Pengendalian penyebaran virus Corona mengikutsertakan komunitas RT/RW. PPKM Mikro masih diberlakukan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Kelima, penebalan PPKM Mikro. Kebijakan ini dikeluarkan setelah melonjaknya kasus Covid-19 pasca libur lebaran 2021. Pemerintah menambahkan kata “penebalan” di depan PPKM Mikro. Entah apa yang dimaksud dengan “penebalan” itu. Namun, penebalan PPKM Mikro tak jauh berbeda dengan PPKM Mikro itu sendiri. Fokus penebalan PPKM Mikro tetap pada komunitas terkecil di lingkungan RT/RW, seperti

penyebaran virus Corona. Bahkan, angka kasus positif Covid-19 terus menanjak. Karena itu, pemerintah kembali mengganti istilah menjadi PPKM Darurat.

Angka kasus Covid-19 di Indonesia sudah melebihi 20.000 kasus per hari. Bahkan, kasus Covid-19 selama PPKM justru mencatat rekor melebihi angka 40.000 kasus per hari. Indonesia pernah menempati urutan pertama jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di dunia. Selama PPKM Darurat ini, kasus positif Covid-19 tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang baik. Rumah sakit kekurangan tempat tidur, baik ICU maupun ruang perawatan, tabung oksigen langka,



Covid-19 dibanding provinsi lainnya di Indonesia. Ketujuh provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM berlaku mulai 11 Januari 2021.

Aturan dalam PPKM ini di antaranya sebanyak 75% pegawai bisa bekerja di kantor, sekolah masih dilakukan secara daring, tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas 50%, restoran hanya boleh diisi 25% pengunjung makan di tempat, dan pusat perbelanjaan boleh buka sampai pukul 19.00.

Keempat, Pemerintah lagi-lagi memperbarui istilah yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda. Kali ini pemerintah mengajukan pembatasan sosial dalam bentuk PPKM Mikro yang sesungguhnya

penyekatan pada zona-zona merah di lingkungan RT/RW. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari.

Keenam, PPKM Darurat. PPKM Darurat berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Setelah istilah “penebalan” di depan PPKM Mikro, pemerintah kembali gonta-ganti istilah. Kali ini dipakai istilah PPKM Darurat. Bersamaan dengan pelaksanaan penebalan PPKM Mikro di Indonesia, di India terjadi peningkatan drastis kasus positif Covid-19 karena ditemukan varian baru Delta yang lebih ganas. India menjadi episentrum kasus Covid-19 karena tingginya angka kasus dan kematian. Negara lain mengalami kenaikan gelombang kedua. Penebalan PPKM Mikro sendiri tidak lagi cukup ampuh untuk memutus mata rantai

obat-obatan untuk Covid-19 langka, walaupun ada harganya melambung.

Ketujuh, PPKM Level 3 dan Level 4. Terakhir, pemerintah mengganti kembali istilah PPKM Darurat dengan PPKM Level 3 dan Level 4. Kebijakan PPKM Level 4 diterapkan di 48 kabupaten/kota, sedangkan PPKM Level 3 diterapkan di 74 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Penetapan level ini berdasarkan laju penularan dan kapasitas respon di suatu daerah sesuai rekomendasi WHO. Level 3 dan Level 4 adalah daerah yang memiliki transmisi penularan tinggi, tetapi kapasitas respons daerahnya tergolong sedang hingga rendah. Daerah inilah yang perlu mendapatkan treatment khusus melalui kebijakan PPKM Darurat. □

BSC



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI/Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Darurat Covid-19 Memanggil Kita Mengejauwatahkan Perikemanusiaan

KETIKA sistem kesehatan berpotensi gagal memberi layanan kepada semua pasien akibat lonjakan jumlah orang sakit (functional collapse) di setiap rumah sakit, fakta ini menjadi pertanda bahwa situasinya benar-benar darurat. Suasana kebatinan pun begitu sulit dilukiskan dengan kata karena ratusan kematian per hari tak bisa dicegah, di tengah lonjakan kasus baru COVID-19 yang mencapai puluhan ribu. Krisis kesehatan yang tereskalasi sekarang ini hendaknya menjadi panggilan bagi semua orang sehat untuk mengejauwatahkan perikemanusiaan bagi mereka yang menderita.

Situasi sekarang tak cukup disikapi dengan kepekaan dan prihatin, melainkan peduli dan keberanian siapa saja untuk segera bertindak atau menolong (sense of crisis). Agar semua orang mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang situasi darurat sekarang ini, patutlah untuk mengacu pada pengumuman kematian puluhan pasien COVID-19 di RSUP Sardjito, Yogyakarta, serta pesan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang potensi sistem kesehatan mengalami ketidakmampuan melayani semua pasien.

Sebagaimana laporan dan penjelasan resmi manajemen RSUP Dr. Sardjito, terhitung sejak Sabtu (3/7) jam 20.00 WIB sampai Minggu (4/7) pagi, tercatat 33 pasien COVID-19 meninggal karena RSUP itu kehabisan atau kekurangan stok oksigen. Sebelumnya, ada pasien di Jakarta pun tak tertolong karena terlambat mendapatkan perawatan akibat rumah sakit penuh disesaki pasien COVID-19.

Fakta di RSUP Sardjito Yogyakarta itu praktis

membenarkan pernyataan dan pesan dari IDI tentang lonjakan tajam jumlah pasien COVID-19 akhir-akhir ini yang sudah sangat membebani sistem kesehatan. IDI mengingatkan, situasi saat ini benar-benar mengkhawatirkan karena sejumlah fasilitas kesehatan berpotensi mengalami functional collapse atau tidak mampu memberi layanan kepada semua pasien.

Menanggapi keadaan itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membuat tempat isolasi untuk pasien COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mendirikan rumah sakit lapangan untuk menambah tempat perawatan pasien COVID-19. Kementerian PUPR kemudian menyiapkan 14 rumah sakit darurat sebagai tambahan.

Namun, gerak cepat dari pemerintah itu ternyata belum cukup untuk menutup semua kebutuhan yang sangat mendesak. Masalah dan tantangan riil-nya bukan sekadar kebutuhan ruang dan tempat tidur untuk merawat pasien, tetapi juga menipisnya stok alat-alat kesehatan, obat-obatan, hingga jumlah dokter dan perawat yang nyata-nyata menjadi sangat terbatas, atau tidak berimbang, akibat lonjakan tajam jumlah pasien pada semua rumah sakit rujukan.

Maka, kejadian fatal sebagaimana yang terjadi di RSUP Sardjito pun tak terhindarkan. Situasi yang demikian menyebabkan angka kematian akibat Covid-19 di dalam negeri juga mengalami peningkatan. Pada 15-16 Juli 2021 misalnya, tercatat 1.205 orang pasien yang meninggal dunia karena COVID -19. Total pasien COVID-19 di Indonesia

yang meninggal dunia sudah melampaui jumlah 70.000-an jiwa.

Kini, tantangan bersama di tengah darurat COVID-19 sudah jelas. Setelah pemerintah menambah belasan rumah sakit darurat, persoalan berikutnya yang harus segera dikerjakan adalah pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam jumlah yang memadai. Siapa pun yang memiliki akses untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan tentu sangat diharapkan kontribusinya.

Selain itu, problem penambahan tenaga dokter dan tenaga perawat pun harus segera dicarikan jalan keluarnya. Ini problem nyata. Contoh kasusnya adalah keluhan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) di Tangerang Selatan terus berkurang karena banyak Nakes juga terpapar Covid-19 dan harus menjalani perawatan. Sekitar 33% atau 180 Nakes di kota itu dilaporkan terinfeksi Covid-19. Sebelumnya, Pemkot Tangerang juga telah meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk segera memasok obat-obatan dan oksigen.

Jadi, situasi sekarang memanggil semua orang yang sehat untuk memberi pertolongan kepada mereka yang menderita. Semua orang dipanggil untuk mengejawantahkan perikemanusiaan. Sekecil apa pun bantuan yang bisa diberikan pasti sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita. Jumlah kasus COVID-19 di dalam negeri hingga Sabtu (17/7) terbilang 2,78 juta. Namun, jumlah orang yang menderita akibat sebaran kasus yang terus meluas mencapai puluhan juta orang, karena ragam kegiatan produktif masyarakat harus dihentikan sejalan dengan penerapan PPKM darurat.

Kalaupun tidak bisa membantu, minimal menunjukkan empati kepada mereka yang menderita. Berempati pada penderitaan orang lain berarti mau menahan diri untuk tidak membuat gaduh ruang publik di tengah situasi darurat seperti sekarang. Tidak juga nyinyir atau menyemburkan kritik-kritik tidak proporsional hanya karena ingin menunjukkan diri sendiri paling benar.

Sangat bijak jika semua pihak mau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah, para dokter, Nakes dan

para relawan untuk merespons situasi darurat sekarang ini sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan. Kalaupun ada kekurangan atau kelemahan, suarakanlah dengan kritik yang konstruktif dan solutif.

Para elite dan pemerhati mungkin layak memaknai aksi sejumlah orang biasa-biasa saja dalam merespons situasi darurat sekarang ini. Mereka tidak bersuara tetapi lebih memilih langsung berbuat untuk menolong mereka yang menderita. Mereka adalah contoh orang biasa yang lebih mengedepankan naluri perikemanusiaannya.

Di Jakarta, seorang warga merelakan rumahnya di Cilandak Barat menjadi tempat Isolasi pasien COVID-19. Di Bandung, seorang warga di RW 1/RT 2 Kelurahan Kacapiring juga ikhlas memberi rumahnya untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi warga sekitar yang terpapar COVID-19. Masih di Bandung, seorang pedagang bubur ayam menyediakan hidangan gratis bagi mereka yang menjalani Isoman. Pedagang bubur ini tergerak menolong setelah melihat ibu-ibu majelis taklim bergotong royong menyediakan konsumsi bagi warga yang terpapar Covid-19.

Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, para relawan dan Ibu-ibu PKK bergotong royong membangun dapur umum di tiga titik. Mereka menyediakan ribuan nasi kotak untuk diberikan kepada pasien COVID-19 yang tengah menjalani Isoman. Di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, seorang warga setempat pun terpanggil membantu sesama yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dia menyiapkan dan mengirimkan makanan berupa soto untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Tentu saja masih banyak aksi-aksi sosial yang dikerjakan masyarakat untuk menolong mereka yang menderita, namun tidak terekspose media. Mereka adalah orang kebanyakan yang oleh kearifan lokal terpanggil untuk mengejawantahkan perikemanusiaannya.

Kita bersyukur karena tanpa diminta, mereka memberi teladan yang baik untuk semua orang. □

Rapat Pimpinan MPR RI

Sidang Tahunan MPR RI 2021 Dilaksanakan Luring dan Daring



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 diselenggarakan Senin 16 Agustus 2021, pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Jumlah undangan mencapai 1.013 orang. Sebanyak 57 diantaranya mendapatkan undangan untuk hadir secara fisik, sedangkan 956 undangan lainnya hadir secara virtual.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memastikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 tetap digelar pada 16 Agustus 2021. Sehingga rakyat tetap bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Mengingat kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI akan kembali digelar secara luring dan daring, sebagaimana telah dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020.

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR pada Senin 16 Agustus 2021. Dimulai Pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Jumlah undangan mencapai 1.013 orang. Sebanyak 57 diantaranya mendapatkan undangan untuk hadir secara fisik, sedangkan 956 undangan lainnya hadir secara virtual.

“Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh pimpinan MPR RI dan sepuluh Ketua Fraksi MPR RI/Kelompok DPD, lima pimpinan DPR RI dan sembilan Ketua Fraksi DPR RI, empat pimpinan DPD RI dan empat perwakilan sub wilayah

DPD RI. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, empat Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua MUI sebagai pembaca doa,” ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI mempersiapkan Sidang Tahunan MPR RI, di Kompleks MPR, Jakarta, Selasa (27/7/21).

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir secara luring dan daring, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, undangan hadir virtual antara lain ditujukan untuk tiga mantan Presiden RI, empat mantan Wakil Presiden RI, dua mantan Ketua MPR RI, empat mantan Ketua DPR RI, empat mantan Ketua DPD RI. Serta 540 anggota DPR RI, 124 anggota DPD RI, 103 Duta Besar/perwakilan negara sahabat, delapan pimpinan BPK RI, sembilan jajaran Mahkamah Agung, tujuh jajaran Mahkamah Konstitusi, enam jajaran Komisi Yudisial, dan 34 Gubernur



se-Indonesia.

“Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran TV nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi

informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk

mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

“Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara,” pungkas Bamsuet. □

Rapat Pimpinan MPR RI dengan Kementerian Keuangan

Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, adanya dua kali re-focusing (pemotongan) anggaran MPR RI dari Kementerian Keuangan, tidak menghalangi tugas dan kewajiban 711 anggota MPR RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Pada 2020, anggaran MPR RI dipotong dari Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 miliar. Menurun kembali dari semula Rp 750.871.684.000 pada 2021 menjadi Rp 695.704.258.000 pada 2022.

“MPR RI tetap fokus menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU No.17/2014 yang kemudian terakhir diubah dengan UU No.13/2019, yang menyatakan MPR RI memiliki tugas memasyarakatkan Ketetapan MPR RI; memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

MPR RI kini juga sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI dengan Kementerian Keuangan, di Kompleks MPR RI, Jakarta, Selasa (27/7/21).

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir secara luring dan daring, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ketua Badan Penganggaran MPR RI Idris Laena dan Neng Eem Marhamah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, serta Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Purwanto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, penanggulangan pandemi Covid-19 tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan

aspek perekonomian saja. Melainkan juga harus turut menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial. Maka penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sebagai upaya penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 711 anggota MPR RI yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, menjabarkan tugas dan kewenangannya sesuai UU No.17/2014 yang kemudian diubah terakhir dengan UU No.13/2019 dalam berbagai program kegiatan. Sehingga pandemi Covid-19 tidak menjadi pintu masuk bagi radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan



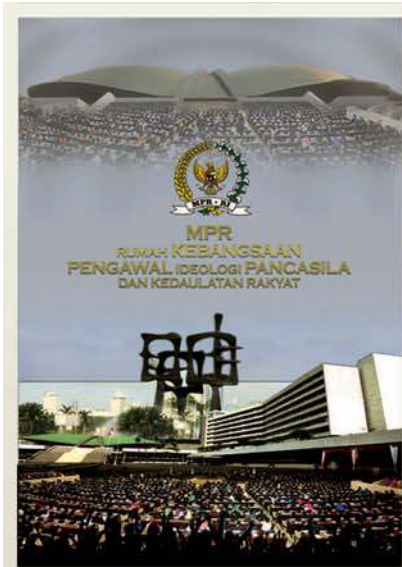
bangsa,” tandas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, hal terpenting saat ini adalah selain fokus pada upaya vaksinasi untuk memperkuat kesehatan masyarakat juga penting bagi kita untuk tidak mengabaikan vaksinasi ideologi guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tekanan ekonomi tidak dijadikan pintu masuk bagi gerakan radikalisme, ekstrimisme, anarkisme hingga intoleransi yang mengganggu kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menjelaskan, besarnya dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 699,43 triliun, yang salah satu sumbernya tidak lepas dari adanya refocusing (pemotongan) anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menanggulangi

berbagai dampak pandemi Covid-19. Sebanyak Rp 193,93 triliun dianggarkan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial Rp 153,86 triliun, program prioritas Rp 117,04 triliun, dukungan UMKM Rp 171,77 triliun, dan insentif usaha Rp 62,83 triliun.

“Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi dana PEN Tahun 2020 mencapai Rp 575,8 triliun atau sekitar 82,83% dari alokasi sebesar Rp 695,2 triliun. Sementara realisasi dana PEN tahun 2021, hingga 25 Juni 2021 tercatat mencapai Rp 237,54 triliun atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun. Penyerapannya di tahun 2021 ini harus maksimal, jangan sampai karena masalah teknis dan birokrasi menjadi terkendala, apalagi sampai uangnya tidak terpakai,” pungkas Bamsoet. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Percepatan Vaksinasi

Vaksinasi Harus Jadi Gerakan Bersama

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan, percepatan vaksinasi Covid-19 tidak hanya menjadi perhatian Presiden, para menteri, dan kepala daerah saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang mendapat dukungan dari segenap kekuatan sosial politik.

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa peringatan Presiden Joko Widodo kepada menteri dan kepala daerah dalam rapat terbatas evaluasi PPKM, hendaknya menjadi perhatian semua pihak dalam mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

“Sudah berulang kali Presiden menyampaikan peringatan tentang percepatan vaksinasi. Peringatan itu hendaknya di-

baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk sudah 137 juta, tapi yang disuntikkan baru kurang lebih 54 juta,” kata Presiden dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang disiarkan melalui kanal *Youtube* Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Menurut politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie, percepatan vaksinasi Covid-19 hendaknya tidak hanya menjadi perhatian Presiden, para menteri dan

membutuhkan sekitar 1,5 tahun lagi baru terbentuk kekebalan kelompok, karena selama enam bulan pertama proses vaksinasi baru mencapai kurang lebih 50 juta suntikan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, proses vaksinasi hingga Sabtu (17/7/2021) telah menjangkau 41.268.627 orang yang mendapatkan suntikan pertama atau sekitar 19,82%. Adapun 16.217.855 or-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tindakanjuti dengan langkah-langkah nyata, terutama meningkatkan koordiansi dan komunikasi lintas sektor serta komunikasi yang intens dari pusat hingga ke desa-desa,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (18/7/2021).

Sebelumnya, dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang berlangsung, Sabtu (17/7/2021), Presiden Jokowi menyoroti kinerja Menteri Kesehatan dan para kepala daerah terkait pelaksanaan vaksinasi. Presiden meminta agar program vaksinasi massal bisa dijalankan lebih cepat agar stok vaksin yang kita miliki tidak menumpuk di gudang PT. Bio Farma, Puskesmas atau Rumah Sakit.

“Tolong dilihat betul angka-angkanya. Saya lihat data yang masuk ke negara kita,

kepala daerah saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang mendapat dukungan penuh dari segenap kekuatan sosial politik di negeri ini.

“Pandemi Covid-19 tidak bisa diatasi oleh pihak tertentu saja, tetapi harus dihadapi secara bersama-sama, karena vaksinasi merupakan cara satu-satunya untuk mengakhiri pandemi. Kita semua berkepentingan untuk mempercepat proses vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity),” tegas Rerie.

Tanpa akselerasi vaksinasi secara signifikan, kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kita setidaknya membutuhkan waktu dua tahun untuk mencapai target vaksinasi terhadap 70% atau sekitar 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia. “Itu berarti

ang telah mendapatkan suntikan kedua atau baru sekitar 7,79% dari target 70% penduduk.

Oleh karena itu, imbuhan Rerie, berbagai upaya percepatan vaksinasi mulai dari vaksinasi massal hingga vaksinasi door to door harus mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat agar berlangsung cepat dan lancar, terutama di wilayah-wilayah zona merah dan orange.

“Kita bersyukur pemerintah menjamin stok vaksin yang ada saat ini mencukupi untuk menyokong percepatan vaksinasi Covid-19. Stok yang ada itu hendaknya digunakan secara efisien dan efektif agar tidak terjadi penumpukan di wilayah atau tempat tertentu, seperti yang disebut Presiden Jokowi,” kata Rerie mengingatkan. □

Pertemuan Ilmiah Bedah Saraf Indonesia

Dokter dan Nakes Pahlawan Sejati

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo minta Pemerintah dukung perkembangan pengetahuan dan kompetensi di bidang kedokteran.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo kembali menyampaikan dukacita atas wafatnya dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) akibat terpapar Covid-19. Data Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencatat setidaknya 545 dokter, 445 perawat dan 257 bidan meninggal saat menangani pasien Covid-19.

“Para dokter dan Nakes yang berjuang menyelamatkan pasien Covid-19 adalah pahlawan sejati. Mereka tidak segan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyembuhkan para pasien Covid-19. Saya

sangat mengapresiasi segala bentuk pengabdian dan perjuangan serta pengorbanan dari para dokter dan Nakes,” ujar Bamsoet usai membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-24 Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia secara virtual di Jakarta, Ahad (25/7/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, tingkat penularan Covid-19 masih tinggi. Data Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, pada hari Ahad (25/7/21) ada penambahan 38.679 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Sehingga, total kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 sampai hari ini

berjumlah 3.166.505 kasus.

“Jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh pada hari ini (25/7/2021) sebanyak 37.640 pasien. Sehingga, total pasien Corona yang dinyatakan sembuh berjumlah 2.509.318 orang. Sementara, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal hari ini ada 1.266 pasien. Total Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia sebanyak 83.279 orang,” urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menilai, kompetensi dokter Indonesia sangatlah tinggi. Hanya terkadang kurang didukung fasilitas dan peralatan yang kurang canggih, tidak seperti negara tetangga. Tidak aneh bila kemudian beberapa warga negara Indonesia lebih memilih berobat keluar negeri.

“Karena itu, saya akan meminta pada pemerintah untuk melengkapi dan memperbaiki sistem pembiayaan BPJS serta mendukung perkembangan pengetahuan dan kompetensi di bidang kedokteran. Saya percaya bahwa keseriusan dan ketulusan hati kita pada akhirnya akan menjadi sebuah pemicu bagi lahirnya inovasi, transformasi, hingga reformasi sistem kesehatan di negara kita menuju tingkat yang lebih baik,” pungkas Bamsoet. □



Hidayat Nur Wahid

Tagih Janji Bansos PPKM Darurat

Wakil Ketua MPR RI, Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., menyatakan, kelambanan Kemensos dalam menyalurkan bantuan sosial membuat makin banyak warga terdampak Covid-19 tidak bisa tinggal di rumah. Dan, itu akan menyebabkan lonjakan signifikan paparan virus Covid-19.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., menuntut pemenuhan janji Pemerintah (Kemendagri dan Kementerian Sosial) menyatakan, sejak 1 Juli 2021 akan menyalurkan bantuan sosial di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat. Tuntutan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid menyusul banyaknya warga yang mengeluhkan tak kunjung cairnya bantuan sosial tersebut.

Padahal, sejak 12 Juli 2021 PPKM Darurat sudah diperpanjang dan diperluas hingga 15 Kabupaten / Kota di luar Jawa-Bali. Perpanjangan dan perluasan PPKM Darurat itu didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021. Padahal, pembatasan pergerakan tersebut menyebabkan rakyat semakin kesulitan ekonomi. Sehingga pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi dan secepat mungkin melunasi janjinya, yaitu menyalurkan semua bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19, dengan memerhatikan verifikasi dan validasi data penerima, agar tak terulang kasus-kasus bermasalah seperti terjadi sebelumnya, termasuk bansos yang dikorupsi.

“Harusnya pemerintah antisipatif dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

Yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dari corona, kelaparan, dan dampak sosial ekonomi dari diberlakukannya PPKM Darurat itu. Perlindungan tersebut harusnya dilaksanakan sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat,” demikian disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Hidayat selaku Anggota Komisi VIII DPR RI, juga mengkritisi kinerja Menteri Sosial Tri Rismaharini menyangkut kelanjutan program Bansos Tunai yang sangat diperlukan warga dan aman dari korupsi. Pasalnya, sejak awal perpanjangan bansos tunai, Risma selalu berkilah soal ketiadaan anggaran, sekalipun Kementerian Keuangan berulang kali menyatakan bahwa anggaran tersebut tersedia tinggal menunggu surat pengajuan penerima dari Kemensos. Tapi sekalipun Menko PMK mendukung kelanjutan program Bansos Tunai, nyatanya Mensos tidak kunjung membuat surat pengajuan program Bansos Tunai ke KeMenkeu.

Kinerja Kemensos menyalurkan bantuan tunai di era PPKM Darurat, kata Hidayat, juga lamban. Pada Rabu (14/7/2021) di mana PPKM sudah berjalan 11 hari, PT Pos sebagai agen penyalur bansos baru menerima surat perintah bayar dari Kemensos, itu pun hanya

untuk 2 juta penerima dari total 10 juta penerima bansos tunai. Masalah akurasi data dan kelambanan pelaksanaan bantuan tunai ini diperparah dengan tidak segera dilibatkannya Komisi VIII DPR-RI dalam membahas dan memutuskan verifikasi dan validasi data bansos PPKM Darurat, sehingga Hidayat mempertanyakan kebenaran dan kevalidan dari data penerima yang dipergunakan oleh Kementerian Sosial saat ini.

Dalam rapat kerja terakhir Komisi VIII dengan Kemensos soal verifikasi data (24/5/2021), Komisi VIII masih mempertanyakan dan meminta Kemensos memperbaiki data penerima bantuan sosial. Nyatanya, hingga masa sidang berakhir pada (15/7/2021), verifikasi dan validasi data DTKS belum pernah diputuskan bersama antara Mensos dan Komisi VIII DPR. Padahal sebelumnya Mensos Risma secara sepihak sudah mendelete (menidurkan) 21 juta DTKS yang diklaim bermasalah oleh Kemensos.

“Alih-alih bersinergi dengan Komisi VIII membahas verifikasi data agar bansos PPKM Darurat tepat sasaran, dan terhindar dari korupsi, Menteri Risma malah menghadirkan kegaduhan publik, dengan marah-marah di depan umum yang membawa-bawa Papua sehingga membuat marah warga di sana. Di era Covid-19 ini Mensos harusnya makin menenteramkan semua WNI, tidak malah membuat pernyataan mengandung rasisme yang mengundang kemarahan warga Papua,” ujar Hidayat.

Kelambanan Risma menyalurkan Bansos, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, membuat makin banyak warga terdampak Covid-19 tidak bisa tinggal di rumah. Dan, itu akan menyebabkan lonjakan signifikan paparan virus Covid-19. Sejak awal PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli 2021, penambahan kasus baru harian Covid-19 justru terus meningkat, dari 34.379 hingga kini (15 Juli 2021) mencapai 47.889 per hari. Di saat yang sama, berdasarkan keterangan Bank Indonesia (14/7/2021), aktivitas bisnis turun

hingga setengah dari kuartal sebelumnya akibat penerapan PPKM Darurat. Kondisi ini menyebabkan rakyat tidak hanya terpapar virus Covid-19, tapi juga terpapar oleh ancaman kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan. Dan itu akan berkontribusi mengurangi imun dan daya tahan tubuh di tengah situasi pandemi, sehingga dapat

meningkatkan risiko kematian. Hidayat mendesak Risma segera melengkapi surat perintah bayar bagi seluruh penerima bansos tunai PPKM Darurat, sehingga para warga yang terdampak sosial-ekonomi bisa kembali bertahan atasi dampak buruk Covid-19.

“Saat ini banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan

harian, terpaksa keluar mencari nafkah, dikarenakan tidak kunjung cairnya bansos dari Pemerintah. Mensos harusnya peka dan peduli akan hal ini, dengan segera mencairkan bansos tunai. Lebih baik lagi jika memperjuangkan perluasan penerima bansos akibat semakin banyaknya WNI terdampak Covid-19,” katanya. □

Syarief Hasan

Kesehatan Rakyat Dulu Baru Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dukung pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan akan mengatasi kesehatan rakyat dulu baru ekonomi.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dalam menangani pandemi Covid-19. Posalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari, hingga terdeteksinya varian baru Delta Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat.

Syarief Hasan menilai, pernyataan Presiden Jokowi bahwa akan mengutamakan penyelesaian Covid-19 dulu baru masalah ekonomi adalah sudah benar dan sesuai yang kami dan rakyat harapkan.

“Kami Partai Demokrat tentu sangat mendukung statemen Presiden tersebut. kini para Menteri harus menjalankan kebijakan tersebut, bukan sebaliknya (selama ini) lebih mengutamakan ekonomi dulu,” ungkap Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, lonjakan kasus menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19. “Belum adanya potensi pelandain kasus positif Covid-19, disertai munculnya varian baru Covid-19 menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menekan laju pandemi Covid-19.”, ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan, kenaikan kasus positif harian sudah mendekati 50.0000 kasus beberapa hari terakhir, menjadi record tertinggi didunia melampaui India. Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pertama kali di awal Maret 2020 sebesar 2,62 juta kasus dan 68.219 diantaranya meninggal dunia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, penambahan kasus dan munculnya varian baru disebabkan karena tidak tegasnya Pemerintah dalam melakukan pembatasan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa varian baru Covid-19 berasal dari luar negeri yang menyebar di Indonesia karena kurang ketatnya pembatasan masuknya WNA ke Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.

Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk fokus terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harus mengambil pengendalian dan langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan hingga

pembatasan dan antisipasi, persiapan perlengkapan obat-obatan dan antisipasi semua kebutuhan, khususnya rumah sakit dan nakes, untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19.”, ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. “Pemerintah sudah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia,” katanya.

Padahal, menurut Syarief Hasan, saat ini banyak negara yang sudah melarang WNI masuk ke negara mereka. Kini yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia justru memberi karpet merah kepada WNA. □

Rapat Virtual dengan PB IDI

Gencarkan Pelaksanaan “Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19”

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, berharap, Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19 lebih masif dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Gerakan ini melibatkan sekitar 200.000 dokter di seluruh Indonesia, baik dokter umum maupun seluruh spesialis.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian Kesehatan menggandeng jaringan klinik swasta maupun dokter praktik mandiri yang jumlah mencapai lebih dari 30 ribu unit dan tersebar ke berbagai pelosok daerah, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 terhadap berbagai kelompok masyarakat. Sehingga pelayanan vaksinasi bisa berlangsung cepat, tidak menimbulkan kerumunan di berbagai tempat sebagaimana yang sering terjadi belakangan ini.

“Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga bisa memaksimalkan potensi dokter yang sedang menjalani internship, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.900 orang. Vaksinasi bisa dilakukan dengan cara *door to door* ke rumah warga. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri yang layak bagi para tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, sehingga mereka bisa cepat pulih dan kembali melayani masyarakat,” ujar Bamsoet usai rapat virtual dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indo-

nesia (PB IDI), di Jakarta, Senin (19/7/21).

Pengurus PB IDI mengikuti rapat itu, antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Zubairi Djoerban, Ketua Dewan Pakar Meladi Rasmin, Ketua Umum Daeng M Faqih, Wakil Ketua Umum 1 Muhammad Adib Khumaidi, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo, Ketua Umum Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia David Perdanakusuma, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran Poedjo Hartono, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Emi Nurjasmu, dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Nurul Falah Eddy Pariang.

Ketua DPR RI ke-20 ini berharap, ‘Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19’ yang diinisiasi IDI lebih masif dalam pelaksanaannya. Gerakan ini melibatkan sekitar 200.000 dokter di seluruh Indonesia, baik dokter umum maupun seluruh spesialis, untuk bersama menangani pasien Covid-19.

“Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19 merupakan wujud semangat gotong royong para dokter untuk terlibat dalam penanganan Covid-19 sesuai kom-

petensinya masing-masing. Jika dokter saja bersedia gotong royong, sebagai warga negara yang baik, kita pun harus bersedia melakukan gotong royong dalam bentuk apapun guna menekan angka penyebaran Covid-19. Minimal bergotong royong mematuhi PPKM Darurat dengan tidak keluar rumah,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan, kesadaran dan peran semua elemen masyarakat memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua upaya pemulihan. Kesadaran dan peran masyarakat memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua upaya pemulihan, baik pemulihan kehidupan bersama maupun pemulihan ekonomi dari resesi.

“Saya yakin semua orang sudah mencatat bahwa Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerusakan dahsyat yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia di dunia, melainkan juga telah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian global,” pungkas Bamsoet. □

Ahmad Basarah

Jaga Kekompakan Hadapi Musuh Bersama Pandemi Covid-19

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah meminta setiap tokoh dan aktor politik, apapun latar belakangnya, menunjukkan sikap kenegarawannya dalam menghadapi musuh bersama dalam bentuk siluman, virus yang tak terlihat ini.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua lapisan masyarakat terutama dari kalangan tokoh dan aktor politik dari berbagai latar belakang untuk menahan diri untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tujuan politik pribadi dan kelompoknya.

“Spirit berkorban Idul Adha kemarin hendaknya dijadikan momentum serta daya dorong spiritualitas dan kebangsaan bahwa sikap berkorban yang salah satunya dapat diwujudkan dalam sikap membunuh ego dan kepentingan politik pribadi dan kelompoknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar,” jelas Ahmad Basarah di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR ini, demokrasi memang mengakomodasi perbedaan pendapat dan sikap kritis dalam berpolitik. Namun, saat bangsa menghadapi musuh bersama dalam bentuk siluman virus tak terlihat ini, dia meminta setiap tokoh dan aktor politik, apapun latar belakangnya agar menunjukkan sikap kenegarawan dengan menjaga kekompakan untuk mencari solusi bersama mengatasi pandemi ketimbang melakukan kapitalisasi politik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

“Mestinya kita dapat mengambil hal baik dari praktik politik di negara New Zealand yang juga terdapat kekuatan oposisi, baik dari unsur masyarakat maupun di partai politik. Tapi, begitu menghadapi pandemi Covid-19, baik pemerintah maupun partai oposisi, sama-sama kompak mencari solusi bersama. Mereka tidak saling menyalahkan, apalagi menyerang pemerintah, tapi saling memberi masukan dengan sikap kenegaraan mereka. Mengapa kita tidak meniru hal baik dari mereka,” jelas Ahmad Basarah.

Ajakan Ketua DPP PDI Perjuangan ini tidak hanya ditujukan kepada para elite politik di luar pemerintahan, tapi juga kepada mereka yang terlibat dalam pemerintahan, baik di

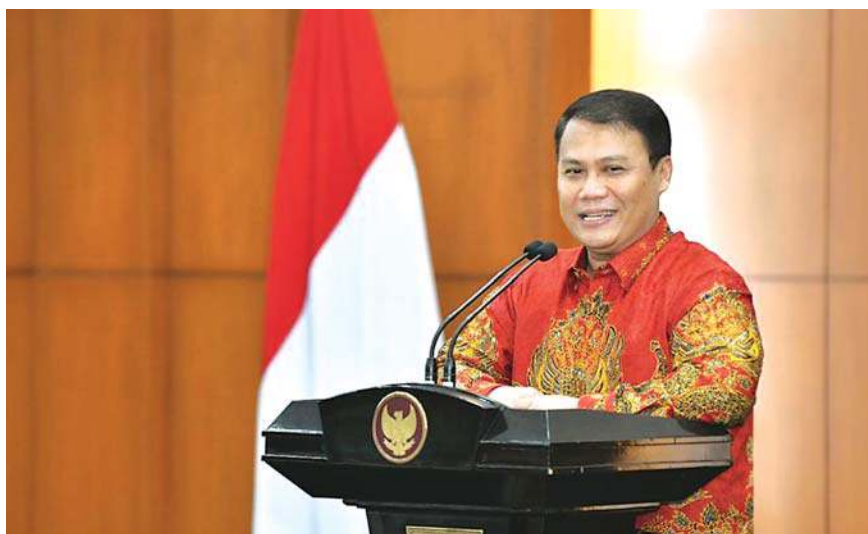


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pusat maupun daerah, agar lebih kompak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Akan ironis jika orang-orang di dalam pemerintahan tidak kompak mengatasi pandemi Covid-19, termasuk dalam penyampaian komunikasi publik mereka.

“Pemerintah daerah juga hendaknya kompak menaati kebijakan pemerintah pusat, mulai dari konsisten menerapkan PPKM sampai melakukan sosialisasi vaksinasi dan distribusi bantuan sosial pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat tidak akan efektif jika kebijakan mereka tidak diindahkan atau tidak dikerjakan oleh aparat di bawahnya hingga tingkat daerah, dan itu berbahaya bagi keselamatan rakyat dan ketahanan negara,” tegas Ahmad Basarah.

Untuk itu, Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini meminta aparat pemerintah di daerah dan para elite masyarakatnya untuk menenangkan dan mengarahkan masyarakat agar patuh dan disiplin saat PPKM berlangsung.

Di sisi lain, para pejabat publik harus dapat menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial pemerintah

pusat dalam delapan program mengatasi eksekusi sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini dengan baik dan benar. Kedelapan program bansos yang dimaksud politisi PDI Perjuangan itu masing-masing Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar para ibu hamil, Balita, siswa SD sampai SMA, kaum disabilitas, serta Lansia; program Kartu Sembako bulanan; program bantuan beras langsung 10 kilogram; program Bantuan Sosial Tunai (BST); program Kuota Internet untuk siswa dan tenaga pendidik; program Diskon Tarif Listrik; Program Kartu Prakerja; serta program Insentif Usaha Mikro sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

“Semua program bansos itu hanyalah contoh dari kerja keras pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19. Jadi jangan khawatir. Jika semua ini disampaikan para elite pemerintahan pusat dan daerah bersama para pemuka agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya dengan cara gotong royong, saya yakin Indonesia akan segera keluar dari kiris pandemi ini,” tegas Ahmad Basarah. □

Komunikasi Telepon Ketua Parlemen Turki

Indonesia Konsisten Dukung Perjuangan Palestina

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, dalam setiap kesempatan, Indonesia senantiasa menekankan perlunya sikap berimbang dari masyarakat internasional dalam membantu Palestina dan mendorong proses perdamaian.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh melalui berbagai forum, termasuk Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Gerakan Non Blok (GNB). Indonesia pun secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan dimuka bumi.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina merupakan amanat konstitusi dan berada di jantung politik luar negeri Indonesia. Karena itu, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan menempatkan isu ini sebagai salah satu isu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Bamsoet saat menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop di Jakarta, Jumat (23/7/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, bangsa Indonesia melihat bahwa akar masalah konflik Israel-Palestina adalah penjajahan yang belum berakhir. Konflik di Palestina merupakan perang asimetris antara penjajah dan pihak yang dijajah.

“Eskalasi kekerasan di Palestina dan Israel pada pertengahan Mei 2021 yang dipicu pengusiran paksa di wilayah Sheikh Jarrah oleh Israel merupakan contoh manifestasi penjajahan dan perampasan hak-hak rakyat Palestina oleh pihak Israel. Setidaknya lebih dari 270 warga Palestina menjadi korban jiwa, termasuk 70 diantaranya anak-anak,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, masalah perbatasan dan pemukiman ilegal selama ini merupakan konflik Israel-Palestina yang harus segera dipecahkan. Selama ini Israel telah me-



Bambang Soesatyo

lakukan creeping annexation yang berjalan selama bertahun-tahun.

“Karenanya, Indonesia menolak permukiman Israel di Tepi Barat karena bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Khususnya, resolusi 2334 dan kesepakatan internasional lainnya yang menyatakan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal,” tandas Bamsoet.

Karenanya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menegaskan, dalam setiap kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan dukungan terhadap two-state solution berdasarkan sejumlah Resolusi PBB dan parameter internasional yang disepakati bersama. Indonesia juga senantiasa menekankan perlunya sikap berimbang dari masyarakat internasional dalam membantu Palestina dan mendorong proses perdamaian.



Mustafa Sentop

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“Termasuk mencegah aneksasi dan pemukiman ilegal oleh Israel. Serta men-

dorong penyaluran bantuan kemanusiaan kepada Palestina, khususnya di tengah

pandemi COVID-19 seperti sekarang ini,” pungkas Bamsoet. □

Penyaluran KUR

Koperasi dan UMKM Sokoguru Perenominan Nasional

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, menyatakan, sektor koperasi dan UMKM bukan saja berkontribusi besar bagi perekonomian nasional dan penyerapan kerja, namun juga mampu bertahan dari badai krisis.

WAKIL Ketua MPR, Syarif Hasan mengapresiasi kinerja Bank BUMN dalam menyalurkan peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) kepada usaha mikro dan kecil dan koperasi. Langkah ini adalah hal positif dan prestasi kerja sektor keuangan dalam membantu perekonomian rakyat yang tengah terhimpit pandemi. Hal ini juga adalah merupakan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional yang harus dijalankan oleh negara. Berdasarkan amanah itulah mantan Presiden SBY menginisiasi Program KUR tersebut sejak 2006 dan Alhamdulillah masih berlanjut di era Presiden Jokowi.

“Sektor Koperasi dan UMKM memang sudah seharusnya menjadi sokoguru perekonomian nasional. Bukan saja karena sektor ini berkontribusi besar bagi perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mampu bertahan dari badai krisis. Koperasi dan UMKM adalah penyelamat ekonomi Indonesia ketika bertubi-tubi krisis mendera,” ujar Menteri Koperasi dan UKM di Era Presiden SBY ini di Jakarta, belum lama.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir Juni 2021 Bank Mandiri telah menyalurkan KUR kepada 200.339 debitur dengan total realisasi sebesar Rp 19,68 triliun. Dari jumlah ini, sebanyak Rp 16,01 triliun telah dialokasikan untuk KUR kecil dan Rp 3,63 triliun bagi KUR mikro. Sementara dari aspek sektor usahanya mayoritas ditujukan untuk sektor produksi yang meliputi sub-sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta jasa produksi dengan total Rp 11,42 triliun atau 58,03%.

Selain Bank Mandiri, BUMN sektor perbankan lainnya juga melakukan langkah yang sama. Hingga akhir Juni 2021, Bank BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 84,8 triliun kepada 3 juta UMKM, dengan rincian 83



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

persen KUR mikro, 13 persen KUR kecil, dan 7 persen KUR supermikro. Di sisi lain, Bank BNI juga tidak ketinggalan dengan menyalurkan total KUR sebesar Rp 15 triliun hingga akhir Juni 2021. KUR ini disalurkan untuk KUR mikro sebesar Rp 2,5 triliun, KUR kecil Rp 12,5 triliun, KUR supermikro Rp 26 miliar, dan KUR TKI sebesar Rp 13,5 miliar. Angka dan manfaatnya akan lebih meningkat lagi apabila sistem distribusinya diperluas untuk menjangkau daerah-daerah yang terjauh, terpencil dan terluar.

Lebih lanjut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong sinergi kolektif dari semua kalangan, terutama sektor keuangan yang dikuasai negara untuk bahu-membahu meringankan beban rakyat yang tengah kesulitan. Apalagi di masa pandemi yang menyebabkan modalitas usaha warga terbatas dan daya beli yang menurun, kebijakan penyaluran KUR adalah upaya yang tepat dan perlu dilanjutkan. Hal ini juga perlu diikuti dengan restrukturisasi kredit sehingga rakyat mendapatkan kelonggaran dalam pembayaran pokok dan bunga

sekalipun sudah mendapatkan subsidi.

Di sisi lain, Syarif juga mengingatkan bahwa penyaluran KUR jangan semata-mata dipandang sebagai bentuk pelayanan publik, namun harus menjadi strategi negara dalam memperkuat daya saing, kelembagaan, dan tata kelola koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi. Pada 2020, koperasi dan UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8,573 triliun. Dari sisi jumlah, sebanyak 64,2 juta (99,99%) koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dengan total investasi sebesar 60,42%.

“Koperasi dan UMKM jangan lagi dipandang sebagai pemain ekonomi kelas dua. Faktanya, sektor ini adalah penyumbang terbesar bagi ketahanan ekonomi nasional. Jadi sudah seharusnya negara serius dalam menempatkannya sebagai pelaku ekonomi utama. Kita mengharapkan koperasi dan UMKM semakin berdaya saing dan mampu berkompetisi dalam pasar global,” tutup Syarif. □

Bambang Soesatyo

Ajak APLI Bantu Warga Terpapar dan Terdampak Covid-19



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Level 1-4 menyebabkan kegiatan ekonomi terhenti. Akibatnya, tidak sedikit penduduk harus kehilangan pekerjaan. Mereka yang terpapar dan terdampak Covid-19 ini perlu dibantu.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) serta asosiasi pengusaha lainnya untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu saudara sebangsa yang terpapar virus Covid-19 maupun warga terdampak pandemi Covid-19. Antara lain dalam bentuk penyaluran sembako, vitamin, hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Mengingat di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan PPKM Level 1-4, menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhenti. Tidak semua pekerja memiliki kesempatan bekerja dari rumah dengan upah yang stabil tanpa potongan. Tidak sedikit dari mereka yang harus mengalami penurunan atau bahkan terhenti sama sekali pendapatannya,” ujar Bamsoet usai membuka pelaksanaan vaksinasi untuk 6 ribu pelajar dan masyarakat umum, di Garden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/7/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Badan Pusat Statistik

mencatat dalam periode Agustus 2020 hingga Februari 2021, setidaknya ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 1,62 juta diantaranya terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Sedangkan hingga Maret 2021, jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta jiwa. Sebanyak 12,18 juta diantaranya berada di perkotaan dan 15,37 juta berada di pedesaan.

“Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, akibat pandemi Covid-19 setidaknya tiga perusahaan otomotif dan komponen otomotif memutuskan mengurangi karyawan hingga 30%. Sementara Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) mencatat sekitar 60% dari total anggota serikatnya mengadakan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan serta kasus PHK yang sudah terjadi,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan,



vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu kunci mempercepat pemulihan ekonomi

nasional. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 6 ribu pelajar dan masyarakat

umum tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai penyedia vaksin. Bekerjasama dengan RS Islam Jakarta Cempaka Putih sebagai penyedia tenaga medis, serta para sponsor seperti GERAK BS, IMI, MBI, FKPP, dan APLI yang menyiapkan sarana dan prasarana, seperti jarum suntik dan teknis administrasinya lainnya.

"Kegiatan ini meringankan beban kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan target vaksinasi covid-19 nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, 2 juta dosis vaksin per hari. Sekaligus meringankan beban keuangan pemerintah, karena tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk sewa tempat, pembelian jarum suntik, hingga honorarium tenaga medis, karena seluruhnya ditanggung pihak sponsor," pungkas Bamsuet. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI/Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Antisipasi Bencana Di Tengah Pandemi

ALAM semesta sedang menghadirkan fenomena yang tidak bersahabat. Belajar dari pengalaman dan peristiwa bencana alam pada banyak negara di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini, sangat layak jika Indonesia pun makin antisipatif. Berada di kawasan cincin api (ring of fire) sehingga selalu ada potensi bencana, maka sangat penting dan strategis jika semua pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengenali potensi bencana di daerahnya masing-masing.

Suka tidak suka, harus diterima kenyataan bahwa tahun 2021 ini boleh jadi sebagai periode yang sangat berat bagi komunitas global. Penderitaan seperti tak berujung. Masih berselimut pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua, bencana alam telah menyergap banyak komunitas di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Kalau Indonesia sudah mengalaminya beberapa bulan lalu, sejumlah negara baru mengalaminya beberapa hari terakhir ini.

Pada pekan kedua Januari 2021, beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan diterjang banjir besar. Masih di pekan yang sama, bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa terjadi di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Tak berhenti sampai di situ, banjir bandang juga menyergap Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada pekan pertama April 2021. Bencana ini juga menelan korban jiwa.

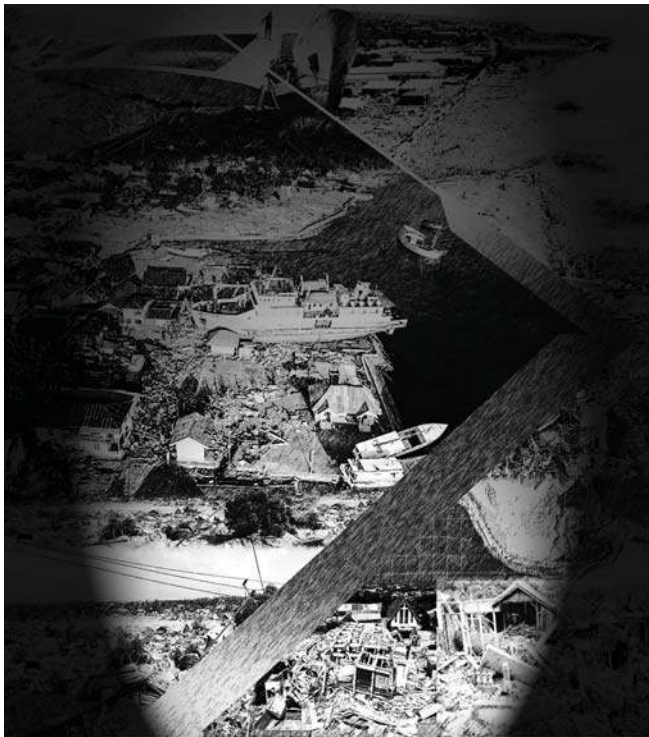
Pada pekan terakhir Juli 2021, wilayah Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dua kali diguncang gempa. Getaran gempa bermagnitudo 6,3 itu dirasakan warga di Poso, sehingga mendorong

pasien Covid-19 berlarian menjauhi gedung rumah sakit (RS). Namun, Indonesia tidak sendirian.

Di Asia, Tiongkok dan India baru-baru ini juga dilanda bencana. India utara yang diguyur hujan lebat pada pekan ketiga Juli 2021 menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang di dua negara bagian, dan menelan korban jiwa. Akibat banjir itu, mobil dan rumah hanyut di Dharamshala di negara bagian Himachal Pradesh, Himalaya. Bencana alam beruntun di Tiongkok bahkan tampak lebih mengerikan.

Tak hanya diterjang banjir besar, beberapa wilayah di Tiongkok juga diamuk topan *In Fa* dan badai pasir. Hujan lebat sehari-hari menyebabkan provinsi Henan diterjang banjir besar dan juga menelan korban jiwa pada 20 Juli 2021. Bencana di negara ini berlanjut pada Minggu (25/07) ketika angin topan In-fa memicu hujan lebat dan banjir besar di seluruh wilayah Shanghai. Di hari yang sama, badai pasir besar melanda Kota Dunhuang. Badai pasir itu menyapu dinding bangunan tinggi hingga sekitar 100 meter di atas kota di Provinsi Gansu, di tepi Gurun Gobi.

Eropa pun tak luput dari bencana alam sejak pertengahan Juli 2021. Banjir besar melanda sejumlah negara di Eropa Barat, meliputi Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, Swiss hingga Italia. Tragedi ini juga menelan banyak korban jiwa. Bencana alam juga terjadi di daratan Amerika. Luapan sungai akibat guyuran hujan lebat menyebabkan banjir disertai lumpur dan sampah menerjang Zapopan, sebuah kota di negara bagian Jalisco, Meksiko, pada 26 Juli 2021. Sementara Brasil dilanda badai salju sehingga suhu di beberapa negara bagian di Amerika Selatan itu



turun hingga minus delapan derajat Selsius.

Dunia kemudian dikejutkan oleh getaran akibat gempa di wilayah Alaska, Amerika Serikat (AS), yang berkekuatan magnitudo 8,2 pada Rabu (28/7) malam waktu setempat. Pusat Peringatan Tsunami AS langsung mengeluarkan peringatan tsunami untuk Alaska selatan dan semenanjung Alaska. Walaupun beberapa jam kemudian peringatan tsunami itu dicabut, gempa Alaska sempat mendorong sejumlah negara di kawasan ini meningkatkan kewaspadaan.

Semua catatan tentang peristiwa bencana alam terbaru di berbagai belahan dunia itu seperti memberi isyarat bahwa alam semesta sedang menghadirkan fenomena yang tidak bersahabat dengan

kehidupan manusia. Karena itu, Indonesia tidak boleh lengah. Sebaliknya, kegiatan antisipatif layak untuk ditingkatkan, terutama karena Indonesia berada di kawasan cincin api. Dalam konteks ini, semua pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat hendaknya didorong untuk lebih mengenali potensi bencana di daerahnya masing-masing, dan aktif menyimak informasi dari pihak yang berwenang.

Apalagi, dalam konteks Indonesia, potensi itu nyata. Jangan lupa bahwa aktivitas vulkanik beberapa gunung berapi masih terbilang tinggi. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami erupsi pada Rabu (28/7) pukul 13.20 WIB. Di Kabupaten Lembata, NTT, terjadi hujan pasir yang melanda tiga desa di Kecamatan Ile Ape pada Sabtu (31/7). Hujan pasir itu bersumber dari erupsi Gunung Api Ile Lewotolok.

Sementara itu, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi di wilayah Yogya-Jawa Tengah masih tinggi hingga pekan terakhir Juli 2021. Karena aktivitas vulkanik itu, Merapi sering memuntahkan ratusan kali guguran lava. Tak kalah penting untuk terus diingatkan adalah potensi gempa dan tsunami di wilayah selatan pulau Jawa.

Patut disyukuri bahwa baik BMKG maupun BPPTKG terus melakukan monitoring dan membarui informasi tentang potensi bencana itu. Ketika BMKG-BPPTKG membarui informasi, hendaknya tidak dipahami sebagai tindakan menakut-nakuti. Sebaliknya, pembaruan informasi itu patut dipahami sebagai pengetahuan untuk meningkatkan kewaspadaan, serta mendorong masyarakat aktif dalam latihan atau persiapan mitigasi bencana.

Karena keterbatasan manusia, bencana alam sulit dihindari atau dicegah. Namun, dengan memahami dan mengenal potensi bencana, Pemda dan masyarakat akan terdorong untuk lebih siap, sehingga dampak terburuk bisa dihindari. □

Perpanjangan PPKM Level 4

Tuntut Komitmen Pemerintah Daerah

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengakui, perpanjangan kebijakan PPKM level 4 dengan pelonggaran di sejumlah sektor adalah keputusan sulit yang harus diambil.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEJUMLAH pengecualian dalam kebijakan perpanjangan PPKM level 4 menuntut upaya sosialisasi yang masif dan mudah dipahami masyarakat. Komitmen para pemangku kepentingan di daerah sangat diharapkan untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

"Inti dari kebijakan yang disampaikan pemerintah adalah memperpanjang PPKM level 4 di Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Sehingga kebijakan pelonggaran yang diberikan untuk sektor UMKM, pasar dan pusat perbelanjaan jangan sampai disalahartikan sebagai pelonggaran untuk semua sektor," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Pada Ahad (25/7) pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4 pada 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021. Namun, pada masa perpanjangan ini, sektor UMKM, pasar dan pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi dengan protokol

kesehatan yang ketat.

Menurut Lestari, kebijakan pengecualian terhadap sejumlah sektor pada masa perpanjangan PPKM level 4 tersebut menuntut sosialisasi yang masif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Para pemangku kepentingan di sejumlah daerah, ujar Lestari yang akrab disapa Rerie, diharapkan berkomitmen kuat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, lewat konsistensi dan penerapan langkah terobosan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Rerie juga berharap para pemangku kepentingan di daerah mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas masyarakat dengan dilonggarkannya larangan kegiatan di sejumlah sektor tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengakui, perpanjangan kebijakan PPKM level 4 dengan pelonggaran di sejumlah sektor adalah keputusan sulit yang harus diambil.

Karena keputusan tersebut, tambah Rerie, ditujukan untuk melindungi masyarakat dari sisi ekonomi, namun berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19, bila dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker ganda, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.

Dalam pembukaan kegiatan di pasar dan pusat perbelanjaan misalnya, menurut Rerie, tantangan terbesarnya adalah jangan sampai terjadi kerumunan massa yang berpotensi menjadi kluster penularan baru.

Para pemangku kepentingan di daerah, tegasnya, harus mampu menciptakan mekanisme yang tepat agar tidak terjadi kerumunan di pasar dan pusat perbelanjaan, serta memastikan para pengunjung menerapkan protokol kesehatan dengan tertib.

Menurut Rerie, bila pengaturan kegiatan masyarakat di area publik ini bisa dijalankan dengan baik, tanpa berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif Covid-19, sejumlah langkah yang diterapkan bisa menjadi norma baru bagi masyarakat di masa pandemi.

Namun sebaliknya, tegas Rerie, para pemangku kepentingan juga harus bersiap untuk mengantisipasi bila terjadi kegagalan mekanisme yang diterapkan dengan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya, konsisten menerapkan testing, tracing dan treatments (3T), dan terus berupaya mewujudkan kekebalan komunitas lewat peningkatan vaksinasi Covid-19 untuk warga.

Rerie berharap, kebijakan PPKM level 4 yang diterapkan pemerintah bisa berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di sejumlah daerah dan masyarakat, agar bangsa ini bisa segera keluar dari ancaman Covid-19. □

Wibinar 48 Tahun KNPI

Bersatu Hadapi Musuh Bersama, Covid-19

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengajak pada aktivis KNPI untuk berperang menghadapi Covid-19, dengan bersatu padu dan gotong royong sesuai masing-masing.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak seluruh jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di hari ulang tahun ke-48 kali ini untuk bersatu padu menghadapi ancaman dan musuh bangsa dan rakyat Indonesia saat ini, yaitu siluman Covid-19. Wabah yang kini membuat rakyat Indonesia menderita secara nasional ini mestinya menjadi alasan moral dan politik serta momentum strategis mempersatukan kembali KNPI secara nasional.

“Saat penjajahan kolonial Belanda dengan politik *divide et impera* atau politik pecah belahnya yang berhasil menguasai nusantara 350 ratusan lamanya juga bisa dihadapi dengan politik persatuan para pemuda-pemudi Indonesia hingga melahirkan ikrar Sumpah Pemuda 1928,” jelas Ahmad Basarah dalam Webinar bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Pemuda dalam Penanganan Pandemi” yang digelar oleh DPD KNPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad (25/7/2021).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengajak para aktivis KNPI untuk menjadikan momentum bangsa Indonesia berperang menghadapi Covid 19 ini dengan bersatu padu dan bergotong-royong sesuai peran masing-masing. Ahmad Basarah mengingatkan, sejak merebut kemerdekaan Republik Indonesia hingga era reformasi saat ini, peran pemuda selalu terdepan dalam membangun bangsa dan negara.

“Usai proklamasi kemerdekaan, ketika usia republik baru seumur jagung dan negeri kita dikepung agresi militer Belanda dan sekutunya, para pemuda Indonesia juga bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Jika dulu para pemuda bisa bersatu melawan musuh terlihat, mengapa saat menghadapi wabah “siluman” ini kaum pemuda tidak bisa bersatu?” gugah Ahmad Basarah.

Di bagian lain, anggota parlemen yang pernah menjabat Sekjen GMNI 1996 – 1999 ini juga menambahkan, tidak elok rasanya jika negara sedang berduka menghadapi pandemi berkepanjangan ada oknum-oknum



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemuda justru ikut-ikutan melakukan provokasi yang diinisiasi aktor-aktor politik tak bertanggungjawab yang memancing di air keruh.

“Para aktor politik yang punya agenda politik jangka pendek itu menyebarkan berita hoaks tentang Covid-19, memprovokasi rakyat dengan menyebarkan Jokowi End Game, dan lain-lain. Mari kita semua bertanya, kalaulah Presiden Jokowi bisa mereka jatuhkan, apakah presiden yang mereka usulkan mampu menghapus pandemi Covid-19 yang juga melanda dunia ini atau bukannya justru malah semakin mempersulit keadaan dan akhirnya akan menyengsarakan rakyat kita sendiri?,” tanya Ahmad Basarah.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan aktor-aktor politik yang tidak sabar ingin berkuasa agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai isu politik murahan, apalagi sampai memprovokasi para pemuda untuk melakukan anarkisme di jalan.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik UGM Purwo Santoso yang menjadi pembicara kedua dalam Webinar itu, menyatakan, setuju dengan pandangan Ahmad Basarah. Dia

menyatakan bahwa momentum berharga buat setiap orang hanya datang sekali dalam hidup.

“Masa pandemi ini mestinya menjadi momentum paling tepat buat kaum muda untuk menunjukkan peran dan kiprah mereka yang paling berharga. Di masa pandemi seperti inilah ruh kemanusiaan biasanya lahir. Kaum pemuda tinggal memilih, mau jadi pahlawan atau jadi sampah,” jelas Rektor Universitas Islam Nahdhatul Ulama itu.

Webinar ini juga menampilkan Wahyu Minarno, Peneliti Charta Politika Indonesia, sebagai narasumber ketiga. Dalam penjelasannya, ia mengajak semua aktivis KNPI mengawal kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi yang semakin menggigit.

“KNPI bisa mengawal sejauhmana bantuan sosial sampai pada masyarakat. Pemuda bisa memantau sejauhmana pelayanan kesehatan benar-benar pro rakyat. Atau KNPI bisa juga menginisiasi lahirnya ide-ide baru penanganan Covid-19, terutama ketika nanti negara kita menjalani recovery pasca pandemi, baik recovery di bidang sosial, politik, kesehatan, juga ekonomi,” jelas Wahyu. □

Menyoroti Bantuan Sosial

Bansos Lancar, Masyarakat Akan Tenang

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap, kinerja Mensos serta jajarannya harus ditingkatkan selama masa PPKM Level sebagai kepanjangan dari PPKM Darurat ini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta masyarakat tenang karena ada berbagai bansos selama PPKM Darurat. Penyebutan terminologi “PPKM Darurat” oleh Mensos untuk PPKM yang diperpanjang, menurut Hidayat jelas tidak menampakkan kebersamaan. Sebab Koordinator PPKM, Menteri Luhut menegaskan, tidak lagi menyebut sebagai PPKM Darurat melainkan PPKM Level 4, 3 dan 2.

Dikhawatirkan dari penyebutan yang tidak sinkron akan berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan program. Dan, itu potensial membuka pintu terjadinya rapor merah. Apalagi menurut Hidayat, berbagai bansos yang dijanjikan oleh Mensos Risma, sebagian besarnya juga belum dicairkan.

Sumber data bansos, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), juga belum diperbarui, sehingga Hidayat khawatir terhadap validitas data, yang bisa berdampak pada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. Padahal sebelum diberlakukannya PPKM Darurat saja sudah banyak warga miskin baru, yang dalam kondisi layak menerima bansos. Masyarakat yang sudah masuk dalam data penerima bansos selama 2 minggu PPKM Darurat yang

telah berjalan pun masih banyak yang menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan pencairan bansos dimaksud.

Presiden Jokowi dalam siaran persnya (17/5/2021) menegur keras keterlambatan penyaluran bansos tersebut. Hidayat menilai, masyarakat akan tenang dan siap melaksanakan ketentuan PPKM Darurat apabila Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, dapat menyalurkan bansos dengan cepat dan tepat. Serta bebas dari korupsi dan kesimpangsiuran data, pada saat itulah rapor bansos tidak merah.

“Bila tidak demikian, maka rapor kinerja Menteri Sosial dalam penyaluran bansos PPKM Darurat patut diberikan warna merah, hingga Presiden pun menegur secara terbuka. Seharusnya, Presiden mengambil langkah lebih tegas agar bansos dibagikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga kehadiran dan kinerja Mensos benar-benar bisa membuat warga tenang, di tengah berbagai pembatasan kegiatan yang tengah diperpanjang,” demikian Hidayat dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII ini menjelaskan, berdasarkan data dari PT. Pos Indonesia (20/7/2021) sebagai mitra penyalur, bansos tunai yang telah siap dibayarkan baru untuk 2,63 juta dari 10 juta

keluarga penerima. Artinya, hingga PPKM Darurat berakhir (20/7/2021) dan diperpanjang, mayoritas warga yang mestinya menerima bansos, sebanyak 7,36 juta keluarga, malah belum menerima bansos yang dijanjikan Pemerintah. Selain itu, validitas data calon penerima bansos juga patut dipertanyakan, mengingat Menteri Sosial tiba-tiba mengumumkan akan memberikan bansos baru kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp 200.000 per bulan selama Juli-Desember 2021.

Hidayat mengingatkan bahwa DTKS sebagai sumber data bagi bansos yang telah berjalan pun belum diperbarui sejak April 2021. Itu pun masih belum sepenuhnya diterima oleh Komisi VIII. Sementara ada 21 juta data penerima bansos yang secara sepihak dihapus/ditidurkan oleh Mensos, dan ada 30-an juta data di dalam DTKS yang belum padan dengan NIK.

“Bagaimana Mensos mempertanggungjawabkan verifikasi dan validasi data penerima bansos baru, jika data bansos reguler pun masih bermasalah dan tidak kunjung diperbarui, dan tak kunjung dibahas dengan komisi VIII DPR untuk diputuskan bersama secara bertanggung jawab dan legal,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, walaupun Pemerintah kembali mengganti istilah yang dipakai untuk menangani Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Darurat dan sekarang PPKM Level, bukan berarti Kementerian Sosial bebas untuk tidak melaksanakan ketentuan perundangan. Apa pun terminologi yang dipakai, Mensos berkewajiban mencairkan seluruh bansos PPKM Darurat dan bansos pada era PPKM Level. Mulai dari Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta KPM. Bantuan beras sebanyak 2.010 ton, dan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM maksimal hingga batas akhir perpanjangan PPKM Level, pada 25 Juli 2021.

Khusus untuk bansos berbentuk beras, Hidayat mengingatkan, jangan sampai ada data yang invalid dan bansos beras yang

tidak layak tapi diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana kasus pada bantuan sembako tahun 2020 yang berujung pada temuan korupsi. Jangan sampai masyarakat yang sudah kecewa akibat berbagai bantuan yang terlambat dan dikorupsi, kembali dikecewakan karena bantuannya tak layak atau tak tepat sasaran karena tidak validnya

pendataan.

“Kinerja Mensos serta jajaran Kemensos harus ditingkatkan selama masa PPKM Level sebagai kepanjangan dari PPKM Darurat ini. Khususnya untuk mengawal validitas data dan penyaluran bansos, serta turun langsung mengevaluasi bansos yang telah disalurkan. Hanya dengan cara itu masya-

rakat bisa percaya, dan bisa diharap untuk tenang dan tetap tinggal di rumah masing-masing, sehingga dapat memenuhi tujuan utama diberlakukan dan diperpanjangnya PPKM. Yaitu untuk memutus penyebaran dan penularan Covid-19 varian delta yang telah merenggut banyak sekali korban, dengan segala dampak negatifnya,” pungkasnya. □

Vaksin Booster

Dukung Skala Prioritas untuk Nakes

Setiap hari nakes berhubungan dan merawat pasien covid, tanpa kenal lelah. Jadi, sangat beralasan jika tingkat keterpaparan nakes sangatlah tinggi. Oleh karena itu, sangat wajar kalau Nakes mendapat prioritas sebagai penerima vaksinasi tahap ke-3 (vaksin booster).

WAKIL Ketua MPR, Syarif Hasan mendukung prioritas pemberian vaksin jenis Moderna yang ditujukan sebagai vaksinasi tahap ke-3 (vaksin booster) untuk tenaga kesehatan (nakes). Pemberian vaksin booster ini sangat penting mengingat nakes adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19, terlebih dengan resiko terpapar yang sangat tinggi.

“Nakes adalah pahlawan dalam perang melawan pandemi ini. Jadi, jika diberikan prioritas, memang sudah seharusnya seperti itu. Kita mengharapkan pelaksanaan vaksinasi ke-3 ini dilakukan secepat mungkin,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Sebagaimana diketahui, Situs Laporan Covid-19 mencatat, sejak awal pandemi sampai 21 Juli 2021, total ada 1.459 nakes yang meninggal, terdiri dari: dokter 545 jiwa, 453 perawat, 235 bidan, 46 dokter gigi, serta 180 tenaga kesehatan lainnya. Hal ini menjadi keprihatinan bersama, meskipun telah mendapatkan vaksinasi penuh, namun korban jiwa dari kalangan nakes tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan langkah afirmasi yang terukur untuk mencegah keterpaparan atau dampak mematikan dari pandemi ini.

“Setiap hari nakes berhubungan dengan pasien covid, menangani dan merawat pasien tanpa kenal lelah. Jadi sangat beralasan jika tingkat keterpaparan nakes sangatlah tinggi. Hal inilah yang perlu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

diantisipasi, sebab jika sumber daya kesehatan terbatas, maka dampaknya pandemi ini akan sulit diprediksi. Jadi, prioritas untuk nakes sudah tepat. Kita sangat mendukung pemerintah dalam hal ini,” ujar Syarif.

Menteri Koperasi dan UKM di Era Presiden SBY ini juga menekankan agar pemerintah terus melakukan kerjasama global untuk mendapatkan pasokan vaksin. Sebagai episentrum baru penyebaran Covid-19 di Asia dan dunia, pemerintah harus gerak cepat dalam penyediaan fasilitas, bantuan, dan pembiayaan penanganan pandemi. Kita tidak bisa sendirian dalam menangani pandemi ini, dibutuhkan bantuan dunia internasional. Dengan demikian, setelah nakes mendapatkan

vaksin booster, maka langkah berikutnya adalah vaksin yang sama untuk publik, utamanya untuk petugas publik dan lansia.

“Selain nakes, kalangan yang juga beresiko tinggi adalah petugas publik dan lansia. Kita memahami keterbatasan pemerintah, jadi penentuan skala prioritas harus betul-betul didasarkan pada kondisi objektif, rasional, dan terukur. Dengan adanya pengetatan seperti PPKM Darurat atau PPKM berdasarkan level ini, ada sektor-sektor tertentu yang tetap bekerja melayani kepentingan masyarakat luas. Jadi, sudah sewajarnya pemberian vaksin booster ini didasarkan pada skala resiko. Pemerintah harus betul-betul presisi dalam hal ini,” tutup Syarif Hasan. □

Hj. Risnawati, Pengusaha Konveksi

Saat **Bisnis Seret** Amalnya Makin *Banyak*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Covid-19 sudah menggelinding memasuki tahun kedua. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Namun, korban akibat serangan musuh siluman, virus, terus terjadi saban hari. Ada yang bisa sembuh dan kembali sehat seperti sediakala, tapi tak sedikit berakhir dengan kematian.

Selain berimbas pada kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga memberi dampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan. Sektor pendidikan misalnya, para siswa dan mahasiswa dipaksa mengikuti pelajaran melalui daring. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti prosesi kelulusan dan kenaikan kelas, sebagaimana biasanya (dalam kondisi normal) dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran.

Di sektor bisnis banyak pengusaha yang nyaris tidak mampu bertahan untuk melangsungkan usahanya. Tidak sedikit di antara terpaksa melakukan PHK untuk mengurangi beban perusahaan yang semakin berat. Salah seorang yang merasakan beratnya beban dunia usaha selama pandemi Covid-19 adalah Hj. Risnawati (48).

Risnawati adalah pengusaha koveksi asal Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah. Usaha konveksinya itu sudah malang melintang hingga keberbagai pasar di kota-kota besar



seluruh Indonesia. Tetapi, sejak pandemi Covid-19 menyerang, masa keemasan usahanya tak secerah sebelumnya. Pemasaran produknya tersendat, kalau tidak boleh dibilang berhenti sama sekali.

"Pasar banyak yang tutup, jalanan diblokade sehingga pengiriman barang jadi sulit. Sudah dua kali Lebaran, penjualan kami berkurang drastis. Padahal Lebaran adalah pasar potensial, biasanya barang yang terjual banyak dan keuntungan yang diperoleh sangat besar," ungkap Risnawati saat dihubungi *Majalah Majelis* beberapa waktu lalu.

Tantangan yang dihadapi Risnawati tidak hanya berhenti di situ. Dalam situasi sulit, perempuan kelahiran Pekalongan, 5 April 1973, ini dituntut berfikir lebih keras. Puluhan

karyawan yang bergantung hidup pada usahanya menjadi beban tersendiri. Namun, ia tak tega merumahkan mereka. Ia membiarkan para pekerjanya untuk tetap bekerja, meski hasil produksinya hanya akan di tumpuk di gudang.

Meski dipaksa menghadapi situasi sulit, anak keempat dari lima bersaudara pasangan H. Nasocha dan Hj Maesarah ini tidak larut dalam kepanikan. Sebaliknya, ia malah bersyukur karena tidak mengalami kesulitan seperti orang lain.

"Banyak orang yang menjadi pengangguran karena di PHK. Banyak yang tidak bisa jualan karena pasar ditutup. Banyak pula yang kesulitan mencari makanan, karena harus isolasi mandiri," kata alumni SMA Negeri Kedungwuni, Pekalongan, itu.

Karena itu, sejak pandemi Covid-19 di Indonesia mulai memengaruhi kehidupan masyarakat, sejak itu pula Risna, begitu Risnawati biasa disapa, mulai membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Terutama yang berada di lingkungan terdekatnya. Yaitu, warga Desa Kedungpatangewu, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Semakin lama bantuan sembako yang diberikan oleh Risna semakin banyak. Terutama pada saat Ramadan dan jelang Idul Fitri lalu. Ibu dua putri hasil pernikahannya



dengan Yasroni itu menambahkan bingkisan berupa sirup, biskuit, hingga jenis kue lainnya, layaknya bingkisan hari raya.

"Sejak kecil saya diajari untuk membantu orang lain yang kesusahan. Terus membantu, termasuk saat diri kita sendiri berada dalam kesulitan. Karena Allah menyukai hambanya yang suka meringankan kesulitan orang lain," cerita Risna.

Isolasi Mandiri

Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Risna menubah kebiasaannya membagi sembako menjadi bantuan berupa makanan siap saji. Bantuan

itu dibagikan khusus untuk para penyintas Covid-19 yang harus melakukan isolasi mandiri. Bantuan ini ia berikan, bukan hanya tertuju kepada kerabat dan tetangga warga Desa Kedungpatangewu, tetapi hingga keluar wilayah desa, bahkan di luar Kecamatan Kedungwuni.

Untuk memuluskan keinginannya, sejak hari pertama (3 Juli 2021) PPKM Darurat diberlakukan, Risna menyebar pengumuman melalui group-group WhatsApp. Dengan cara tersebut, tiap hari Risna harus menyiapkan lebih dari seratus bungkus nasi beserta lauk, buah dan air mineral.

"Saya ingin ada susu beruang dalam paket

makanan itu. Karena susu tersebut, katanya, bermanfaat bagi orang-orang yang terkena Covid. Tetapi sayang, saat ini mencari susu beruang sangat susah," kata ibu dua puteri hasil pernikahannya dengan Yasroni itu.

Ide membantu menyediakan makanan itu muncul karena para penyintas Covid yang isoman kesulitan mendapat makanan. Akibatnya, tak sedikit dari mereka keluar mencari makanan sendiri. Dan, itu rentan menularkan penyakit pada orang lain. "Yang tempatnya dekat, saya kirim dua kali sehari, sementara yang jauh satu kali sehari, tetapi ditambah dengan sembako," kata Risnawati lagi.

Untuk menyediakan makanan, Risna tidak memasaknya sendiri. Ia membeli di rumah makan milik tetangganya. Tujuannya, agar warung tersebut tetap buka, meski pembeli yang datang di masa pandemi ini agak sepi.

Dibantu dua putrinya dan beberapa remaja tetangganya, Risna mengantarkan sendiri paket makanan tersebut ke rumah orang yang memerlukan. Terkadang, kalau tempatnya terlalu jauh, ia meminta keluarga pasien yang masih sehat untuk menjemput di tempat yang sudah disepakati.

"Mari kita saling bantu, apalagi saat ini banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan takut miskin karena beramal. Sebaliknya, saat rezeki kita berkurang karena usahanya seret, saat itulah kita harus memperbanyak amal," kata Risna lagi. □

MBO

Doa Jakarta Terbebas Covid-19

HNW Ajak FBR Bantu Rakyat Atasi Covid-19

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta agar warga Indonesia dengan berbagai organisasi kemasyarakatannya, termasuk FBR, mendukung hal-hal baik yang dianjurkan pemerintah dan ulama untuk mengatasi Covid-19 ini.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak Forum Betawi Rempug (FBR) berperan aktif membantu rakyat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hidayat mengingatkan bahwa Covid-19 benar-benar ada. Covid 19 sudah banyak menimbulkan korban, di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu, sudah selayaknya apabila FBR juga membantu sesama rakyat Indonesia. Dan, tetap mengikuti anjuran, baik dari pemerintah maupun para ulama, untuk sehat dan selamat dari virus Covid-19, termasuk dengan varian Delta-nya.

Hal ini disampaikan HNW saat ikut serta dalam kegiatan tahlil dan doa untuk 'Jakarta Terbebas dari Covid-19' bersama dengan Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodetabek Gardu 096. Acara tersebut berlangsung di Mangga Besar, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

FBR sebagai Forumnya Warga Betawi, kata HNW, tentunya mendukung budaya Indonesia, termasuk budaya Betawi, yang mengedepankan gotong royong dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. "Apakah itu masalah yang terlihat kasat mata seperti masalah narkoba, miras, dan tawuran. Maupun yang tidak terlihat kasat mata, seperti Covid-19 ini. Penting kita bergotong-royong, bersama-sama mengatasinya," ujarnya.

Menurut Hidayat, korban pandemi Covid-19 sudah banyak, dan berasal dari berbagai kalangan. Ada anggota DPRD/DPR, ulama, olahragawan, pendekar silat, bahkan dokter pun sudah banyak yang wafat akibat Covid-19 ini. "Jadi, Covid-19 itu tidak membedakan suku, agama, ras dan antargolongan. Tapi yang selamat dari covid juga sangat banyak dan beragam. Kita semua harus waspada tapi tetap optimistis, apalagi dengan kebersamaan peran serta dan pemerintah yang benar-benar melaksanakan kewajibannya," tuturnya.

Bila pemerintah serius melaksanakan



kewajibannya terhadap rakyat, maka Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar warga Indonesia dengan berbagai organisasi kemasyarakatannya, termasuk FBR, mendukung hal-hal baik yang dianjurkan pemerintah dan ulama untuk mengatasi Covid-19 ini.

"Selama itu berkaitan dengan kemaslahatan rakyat dan solusi mengatasi pandemi Covid-19, dan apalagi bila itu juga sudah difatwakan oleh ulama kita di MUI, NU, dan Muhammadiyah. Atau pun ulama internasional di Mesir, Arab Saudi, Turki, Malaysia, dan sebagainya. Mereka semua berpendapat sama bahwa kita harus berikhtiar maksimal untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan kemaslahatan umum dengan sembuh/sehat tidak terkena Covid-19 ini," ujarnya.

Berbagai ikhtiar yang dimaksud adalah terus menjaga protokol kesehatan, ikut dalam program vaksinasi, dan berbagai tindakan lain yang dibenarkan dan dianjurkan dari sudut pandang kedokteran dan agama.

Dalam ajaran Islam, menurut HNW, terdapat istilah *Al Amru bis Syai' amru bi wasailihi* (perintah untuk melaksanakan amalan sama halnya perintah untuk mengambil sarananya). "Kita diperintahkan untuk hidup sehat maka segala cara untuk mencapai hidup sehat itu perlu kita jalankan. Dan, sarana-sarana yang ada tentu bertujuan untuk menyelamatkan kita dari Covid-19," ujarnya.

"Kita semua harus sehat. Sebab kalau kita juga sakit, terkena Covid-19, maka bagaimana kita bisa membantu menyelamatkan orang lain?" tambahnya.

Segala upaya, kata HNW, perlu dilakukan secara bersama. Baik upaya-upaya yang bersifat sosial, seperti gerakan vaksinasi dan pemberian obat-obatan, gotong royong bantu warga yang sedang isoman, maupun pemberian santunan Bantuan Sosial Tunai maupun Non Tunai. Tetapi, juga upaya-upaya yang bersifat spiritual, seperti berdoa dan istighotsah, jangan ditinggalkan. "Sudah banyak doa dan salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama kita. Dan, ini semua sejalan dengan kepedulian FBR untuk peduli warga dan mendoakan bangsa dan rakyat serta ulama," ujarnya.

"Saya yakin FBR dapat membantu sesama warga dan pemerintah, dengan ikut memberikan penyuluhan, mengingatkan dan membantu warga bagaimana menghindari bahaya Covid-19 ini sesuai dengan program yang dianjurkan pemerintah di Jakarta dan direkomendasikan oleh MUI/NU/Muhammadiyah. Harapannya agar dengan kerja sama konstruktif antara berbagai pihak maka akan lebih bisa sukses mengatasi Covid-19 dan berbagai dampaknya," pungkasnya. □



Dari Lembang, Bangsa Belanda **Memperkenalkan Minum Susu**

Pertama kali melihat susu, penduduk nusantara menganggap cairan itu sesuatu yang aneh, bahkan menjijikan. Tapi bagi bangsa Belanda, susu adalah minuman agar tubuh tetap sehat, sehat, dan bugar. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, susu, di daerah perjajahan, bangsa Belanda mengembangkan peternakan sapi perah dan memproduksi susu di nusantara. Untuk pertama kalinya Lembang, Bandung, dipilih sebagai tempat mengembangkan sapi perah. Dipilihnya Lembang, karena iklim di sana persis sama dengan iklim di Belanda. Selanjutnya, dari tahun ke tahun, peternakan sapi perah semakin berkembang dan menjadi bagian hidup masyarakat di sentra-sentra peternakan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEDATANGAN bangsa-bangsa Eropa ke nusantara, terutama bangsa Belanda, tidak hanya untuk mencari rempah-rempah, namun mereka juga berusaha untuk membangun koloni. Di dalam koloni tersebut mereka menerapkan kebiasaan hidup, mulai dari mengelola pemerintahan hingga bagaimana hidup sehat.

Kebiasaan mereka minum susu dalam keseharian juga dibawa ke nusantara. Kali pertama datang ke nusantara mereka tidak membawa sapi (perah). Baru ketika koloni sudah terbentuk, tata pemerintahan, tentara, aparat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat strata lainnya sudah menjadi bangsa tersendiri di nusantara, sapi-sapi dari luar pun mulai didatangkan oleh orang-orang Belanda ke Jawa. Sapi-sapi itu didatangkan untuk diperah susunya guna menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, selain untuk menjaga kebiasaan

mereka minum susu.

Untuk memenuhi susu di nusantara, mereka mendatangkan sapi-sapi itu dari negaranya, Belanda, namun ada juga yang menyebutkan mereka impor dari India dan Australia. Kedatangan sapi-sapi—yang saat itu belum ada nusantara—terjadi pada Abad XVII. Apa pula yang mengatakan pada Abad XIX dan XX. Jenis sapi yang didatangkan dari negeri-negeri jauh itu, seperti *Fresian Holstein*, *Shorthorn*, *Ayshire*, dan *Jersey*.

‘Sapi juga makhluk hidup,’ mereka memiliki habitat atau kebiasaan hidup dengan kondisi alam dan iklim tertentu. Sapi *Fresian Holstein* adalah jenis sapi yang tidak tahan hidup di daerah panas. Untuk mencari kondisi alam seperti yang ada di Belanda (Utara), dinas peternakan pada pemerintahan masa itu menyurvei daerah yang iklimnya mirip seperti di Belanda. Setelah dicari ke sana ke mari akhirnya ditemukanlah kawasan Lembang.

Dalam *Wikipedia* disebutkan, Lembang yang sekarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, secara geografi berada pada ketinggian antara 1.312 hingga 2.084 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang terletak di pegunungan, suhu rata-rata berkisar antara 17°-27 °C. *Nah*, suhu yang dingin itulah yang menyebabkan sapi-sapi perah yang diimpor dari Belanda, India, dan Australia, cocok tinggal di Lembang.

Sejarawan Universitas Padjadjaran, Fadly Rahman, dalam *Kompas.com*, 29/5/2020, mengatakan, sapi didatangkan di Lembang, lalu di beberapa daerah di Hindia Belanda lainnya. Namun, fokus awalnya memang di Lembang. Lebih lanjut dalam media online itu diceritakan, peneliti dari Belanda melihat Lembang termasuk lokasi yang iklimnya mendekati iklim di Belanda, sehingga sapi perah bisa ditenakkan dan dikembangkan



Fadly Rahman





dengan baik. Bila iklim tidak mendukung atau panas, hal demikian bukan habitat sapi impor. "Lembang memiliki kondisi iklim yang sangat mendukung, sehingga pemukiman orang Eropa juga banyak dibangun di kawasan itu, seperti di Kecamatan Dago, Jalan Setiabudi, dan Lembang, Bandung, karena pertimbangan cuacanya sesuai dengan di Belanda," ujar Fadly dalam media itu.

Dari sinilah selanjutnya Lembang menjadi sentra peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu orang-orang Belanda dan masyarakat Eropa lainnya di berbagai kota di nusantara, selanjutnya Hindia - Belanda. Lembang menjadi sentra sapi perah yang dibangun sejak masa lampau dan sampai sekarang tetap bertahan dan

pihak swasta dan pemerintah. Swasta dan pemerintah ingin dan terus mendorong agar produksi susu terus meningkat. Dalam www.agrofarm.co.id, diceritakan, para peternak sapi perah yang berada di Lembang bekerja sama dengan berbagai pihak tengah membangun desa susu di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ciater dipilih sebagai lokasi pengembangan peternakan sapi perah dan produksi susunya dilandasi alasan, suhu udara yang sejuk dan area lahan yang cukup luas, sehingga cocok untuk beternak sapi perah.

Dedi Setiadi, Ketua Koperasi Perternak dan Susu Bandung Utara (KPSBU), yang dikutip dari sebuah media mengatakan, dibangunnya desa susu tak lepas dari target

lereng Gunung Merapi dan Bromo.

Dalam fedep.salatiga.go.id, diungkapkan, populasi sapi perah di Kota Salatiga ada 3.590 ekor. Dari sekian ekor sapi perah itu menghasilkan susu sebanyak 4.631.148 liter. Peternakan sapi di sana mayoritas berada di Argomulyo. Kawasan itu dijadikan sentra, karena ketersediaan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak. Sapi-sapi yang ada kebanyakan dipelihara oleh masyarakat di rumah masing-masing.

Bukti Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, juga merupakan daerah produsen susu, ditunjukkan dengan monumen-monumen sapi perah. Di pasuruankab.go.id disebutkan, tiga monumen sapi perah berdiri di pintu masuk Pasuruan dari arah Malang, pintu masuk dari



Dedi Setiadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sudah menjadi bagian dan budaya dari masyarakat di sana.

Di Lembang saat ini ada ribuan orang yang menekuni peternakan sapi perah. Dalam Liputan6.com, 22 September 2019, dengan judul *Ratusan Ton Susu Sapi dari Lembang Mengalir ke Jakarta Tiap Hari*, diceritakan ribuan peternak sapi Lembang mengandalkan usaha budidaya sapi perah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka selanjutnya membentuk wadah koperasi. Anggota koperasi itu mencapai 5.500 peternak. Produksi susu dari para peternak itu dari hari-hari terus meningkat, dari 5 ton sehari meningkat hingga 200 ton.

Kebutuhan susu yang tinggi dari masyarakat membuat para peternak sapi di Lembang kerap diajak kerja sama dengan

pemerintah untuk memenuhi swasembada susu pada 2025. Dia berharap, dengan adanya desa susu bisa meningkatkan produksi 15 hingga 20 liter sehingga meningkatkan pendapatan peternak sapi.

Dari waktu ke waktu, peternakan sapi perah di Indonesia berkembang. Setelah di Lembang sebagai sentra sapi perah pertama, selanjutnya menyebar di tempat lain. Tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta, dan daerah lainnya, yang penting iklimnya cocok dengan habitat sapi perah. Dari sinilah peternakan sapi perah biasanya berada di lereng-lereng gunung, seperti di Salatiga dan Boyolali, Jawa Tengah. Juga di Pasuruan dan Probolinggo yang merupakan kawasan dataran tertinggi yang berada di

arah Probolinggo, dan dari arah Surabaya. Monumen itu untuk menunjukkan keberadaan peternak dan sapi perahnya diperhatikan dan merupakan program untuk menghasilkan susu berkualitas tinggi.

Diuraikan dalam *web* itu, perkembangan populasi ternak sapi perah di Pasuruan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 2017, populasi sapi sebanyak 90.817 ekor. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 sebesar 88.992 ekor atau 2,05%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi 2016 sebesar 86.847 ekor maka produksi sapi perah pada 2017 tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,57%. Ini berbanding lurus dengan kuantitas produksi susu yang juga meng-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

alami peningkatan. Sampai saat ini, produksi susu segar dari Kabupaten Pasuruan dapat memenuhi kebutuhan susu di Jawa Timur.

Meski jumlah sapi perah dan peternaknya di Indonesia terbilang masih tinggi, namun banyak keluhan tentang model peternakan sapi yang terbilang tradisional (sederhana). Banyak peternak sapi yang merawat dan memproduksi susu dan sapihnya di rumah-rumah. Hal demikian membuat sapi menjadi stres yang berakibat produksi susunya menjadi rendah.

Dedi Setiadi dalam *suara.com*, 11 Desember 2018, menyebutkan, beberapa faktor yang membuat produksi susu rendah.

Faktor keterbatasan lahan untuk peternakan sapi dan cara beternak yang terbilang masih sederhana. "Sehingga produksi susunya hanya 10 hingga 12,5 liter sehari," tuturnya. "Bila beternak dengan cara modern, produksinya mencapai 20 liter sehari," tambahnya. Untuk itulah dia bersama peternak lain membangun desa susu di Ciater.

Apa yang terjadi di Lembang juga menimpa di Salatiga. Di tahun 2019, jumlah sapi tercatat 3.590 ekor. Angka itu anjlok drastis dibanding 2010 di mana pada tahun itu jumlah sapi mencapai 8.668 ekor. Produksi susu pada 2019 mencapai

4.631.148 liter. Produksi susu sebanyak itu produktifitasnya hanya sekitar 7 liter perhari, padahal optimalnya menghasilkan 15 liter, bahkan lebih dalam sehari. Peternak sapi di sana, seperti paparan di atas, banyak yang merawat sapihnya di rumah masing-masing.

Untuk mengatasi hal demikian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian ingin peternak sapi perah maju. Dalam *pertanian.go.id*, pada 2018, Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke kelompok sapi perah di Salatiga. Kunjungan itu untuk memantau kerja sama atau kemitraan Indonesia - New Zealand untuk pemberdayaan sapi perah di Indonesia.

Dari kerja sama yang dijalin diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan produktivitas dan memacu produksi susu segar dalam negeri. Diharapkan juga kemitraan kedua negara itu mampu mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya susu segar bagi pemenuhan kebutuhan gizi, sehingga dapat meningkatkan tingkat konsumsi susu masyarakat di Indonesia.

Dalam *web* itu terungkap peternakan sapi perah di Indonesia saat ini, 99%, masih dipelihara di Jawa. Sedang konsumen susu tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu pemerintah ingin mengenalkan sapi perah yang adaptif terhadap lingkungan dataran rendah dan mengembangkan sapi perah di seluruh Indonesia. Dari sinilah akses terhadap susu segar menjadi semakin dekat dan mudah diperoleh masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan, kerja sama dengan New Zealand diharapkan terjadi transfer ilmu sehingga peternak dalam negeri menjadi maju. Bila kemitraan kedua negara itu usai, pemerintah ingin seluruh peternak menjadi sejahtera dan sejajar dengan peternak New Zealand. Dari sinilah beternak bukan dianggap sebagai pekerjaan sampingan tetapi menjadi ladang yang menjanjikan dan diminati oleh generasi muda. Bila ini tercipta maka akan muncul peternak-peternak muda yang memiliki kemampuan yang handal. □

AWG/dari berbagai sumber





Di Kuningan Tak Ada Lagi **Kampung Susu**

Di tahun 1980-an, apalagi tahun-tahun sebelumnya, masyarakat bisa melihat di rumah-Ranggon. Dari sinilah titik balik terjadi di Kuningan. Satu persatu kandang sapi dirobohkan berikutan rumah-rumah penduduk di Kuningan, Jakarta. Dulu, sebagai kawasan dengan populasi sapi terbesar di Jakarta, Kuningan mampu menghasilkan susu yang melimpah sehingga disebut sebagai Kampung Susu. Karena peruntukan kawasan Kuningan yang berubah membuat sapi dan kandangnya harus direlokasi ke Pondok Rangon. Sekarang tak ada lagi sebutan Kampung Susu di sana. Pondok Rangon sebagai sentra baru peternakan sapi perah, selain mampu menjaga produksi susu, juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai minuman susu, dari pemerah hingga pengolahan terakhir.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA masa lalu, Sunda Kelapa, yang selanjutnya menjadi Jayakarta, lalu Batavia, dan sekarang menjadi Jakarta adalah daerah subur. Tanah-tanah yang ada cocok dan dapat ditumbuhi berbagai macam pohon buah-buahan, sayur-sayuran, serta berbagai jenis flora lainnya. Di hamparan tanah yang terbentang di antara Gunung Salak, Gunung Gede, dan Laut Jawa, terpetak-petak berbagai macam *kebon* (kebun) dan sawah. Keberadaan berbagai *kebon* itulah yang akhirnya menjadi nama kampung, seperti Kebon Jeruk, Manggis, Mangga, Pala, Cabe, Nanas, Pisang, serta *kebon-kebon* yang bernama buah dan sayuran lainnya.

Asrinya Jakarta pada masa lalu, dengan masih luasnya kawasan hijau yang alami membuat udara yang ber-

hembus sangat segar dan sejuk. Sungai dengan air yang mengalir jernih membuat apa yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar. Hal demikianlah yang membuat Batavia, Jakarta, juga sebagai tempat yang tepat untuk membiakkan sapi perah. Belanda menilai Batavia masih bisa untuk dijadikan sentra sapi perah, selain Lembang, Cisarua, Grati, dan tempat lainnya.

Lokasi pertama di Batavia yang dijadikan peternakan sapi perah adalah di Kuningan. Sukses di Kuningan membuat peternakan sapi perah selanjutnya berkembang ke Mampang Prapatan, Buncit Raya, Pancoran, Pasar Minggu, hingga Jagakarsa. Setelah Indonesia merdeka, peternakan sapi perah di Kuningan menjadi rujukan. Di sana populasi sapi terbesar dibanding kawasan yang lain.

Sebagai kawasan dengan populasi sapi terbesar secara otomatis membuat produksi susu yang dihasilkan juga paling produktif. Dari sinilah selanjutnya Kuningan disebut sebagai *Kampung Susu*.

Berkembangnya peternakan sapi perah di Jakarta Selatan itu tidak membuat pemerintah tinggal diam. Pada tahun 1958, pemerintah Jakarta pada waktu itu membuat koperasi yang ditujukan buat para peternak. Koperasi yang menghimpun peternak itu diberi nama *Koperasi Perusahaan Daerah Ibu Kota* (KPDIK). Pada 1978, mereka mendapat bantuan sapi perah dari Australia. Bantuan tersebut tentunya selain untuk meningkatkan produksi susu juga sebagai upaya membuat peternak sapi perah menjadi lebih sejahtera.

Kondisi peternakan sapi perah di



Presiden Soeharto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kuningan mengalami titik balik di masa Pemerintahan DKI Jakarta di bawah Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Pada 1986, atas petunjuk Presiden Soeharto, Wiyogo Atmodarminto merelokasi sapi dan kandang-kandangannya ke Pondok Ranggan, Jakarta Timur. Dengan landasan hukum Surat Keputusan No. 200/1986, Kuningan akan dijadikan kawasan kedutaan besar dan wismanya. Untuk mendukung pembangunan kawasan itu para peternak harus direlokasi.

Kebijakan itu di satu sisi mampu menjadikan Kuningan sebagai jajarang gedung kedutaan besar dan pusat bisnis lainnya, namun di sisi lain perlahan-lahan menghilangkan jejak-jejak peternak sapi perah

yang pernah eksis di sana.

Dalam *antaranews.com*, 10 Februari 2021, diceritakan, Fathurahman, generasi ketiga dari peternak sapi perah di Kuningan mengatakan, hingga 2017 ia masih menemukan peternak sapi perah yang masih bertahan. Peternakan sapi perah yang masih bertahan itu milik Haji Nurdin yang berada di Gang Kembang, Kuningan Timur. Namun, dalam perjalanan waktu peternakan itu terpaksa tutup karena tidak ada penerusnya. Maka, sejak saat itulah cerita *Kampung Susu* Kuningan berakhir.

Fathurahman menyebut, meski demikian peternakan sapi perah di sekitar Kuningan, seperti Mampang, Pancoran, dan Pasar Minggu masih eksis sampai sekarang dan

bernaung di bawah *Perhimpunan Peternak Sapi Perah-Sapi Potong*.

Bila dilihat pembangunan Jakarta yang dari hari ke hari semakin masif, sepertinya sentra-sentra peternakan yang tersisa akan mengalami nasib seperti yang dialami di Kuningan.

Menurut data BPS, jumlah sapi perah yang ada di Jakarta, tahun 2020, sebanyak 2.024 ekor. Jumlah sapi perah itu bila dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah kalah jauh. Jawa Barat di tahun yang sama memiliki sapi perah sebanyak 118.212 ekor, Jawa Tengah 139.605 ekor, Jawa Timur 295.141 ekor. Namun, bila dibanding dengan Banten, Jakarta masih unggul. Banten hanya memiliki 62 ekor.

Saat ini fokus pengembangan sapi perah di Jakarta berada di Pondok Ranggan. Dalam *Wikipedia*, diungkapkan bahwa Pondok Ranggan merupakan salah satu dari delapan kelurahan yang berada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 30.260 jiwa dengan luas area 366,015 Ha.

Kelurahan ini berbatasan dengan Mabes TNI di sebelah Utara, Kelurahan Cilangkap/ Kelurahan Munjul di sebelah Barat, wilayah Kelurahan Jati Raden/Kali Sunter di sebelah Timur, serta Kelurahan Harjamukti (Depok) di sebelah Selatan. Oleh karena itu, wilayah Kelurahan Pondok Ranggan merupakan daratan dengan nilai strategis karena berhubungan langsung dengan jalur perlintasan alternatif dari kawasan Cileungsi (Bogor), Kranggan (Bekasi), dan Kelurahan Harjamukti (Depok).

Asal usul nama kampung Pondok Ranggan berdasarkan cerita lisan masyarakat adalah sebagai berikut. Pada masa lalu ada seorang lelaki tua (*aki-aki*) dan seorang *nenek-nenek* bermukim di tempat tersebut tanpa ikatan perkawinan. Bagi masyarakat Sunda, kehidupan sepasang kakek nenek itu disebut dengan istilah *ranggan*. Karena kakek nenek itu tinggal di sebuah pondok, masyarakat lalu menyebut tempat itu dengan nama Pondok Ranggan.

Keberadaan peternakan sapi perah di Pondok Ranggan pun diperhatikan oleh

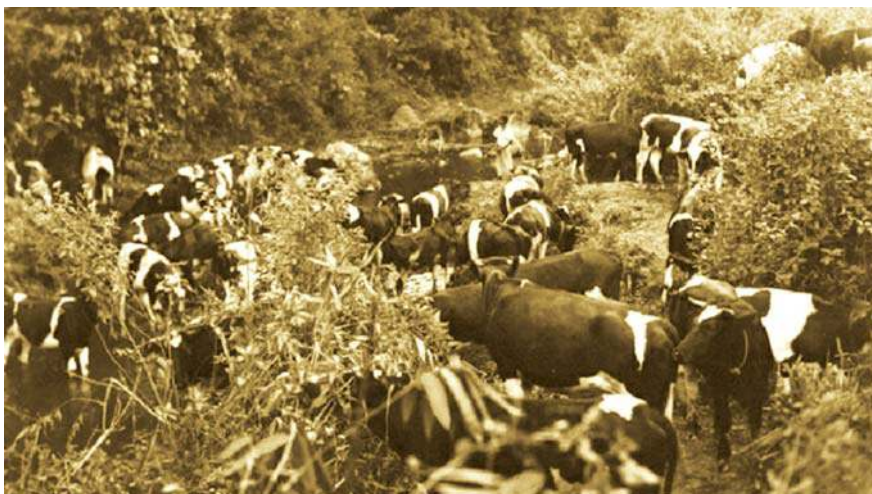




FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemerintah DKI Jakarta. Dalam *berita-jakarta.id*, 21 November 2020, lewat judul *Pemprov DKI Tinjau Peternakan Sapi Perah di Pondok Ranggon*, Pejabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati, beserta jajarannya melakukan kegiatan *expose* sapi perah dalam rangka *panen pedet* (anak sapi) di Sentra UPH Olahan Susu Swadaya, Kompleks Peternakan Sapi Perah, Jalan Sapi Perah, RT 01/02, Pondok Ranggon, Cipayang, Jakarta Timur.

Dalam *expose* itu rombongan tidak hanya meninjau tempat produksi susu, namun juga melihat peternakan *pedet* sekaligus ikut melakukan inseminasi buatan pada tiga sapi betina. Sri menuturkan, keberadaan peternakan sapi perah di Pondok Ranggon

membanggakan. “Di Jakarta, kita masih punya kawasan sapi perah,” ujarnya. Sebagai wujud kebanggaan maka pemerintah mengapresiasi dan mendukung Sentra UPH Olahan Susu Swadaya. “Kita akan berikan bantuan sarana dan pemasaran yang diperlukan para pelaku usaha di sini”, ujarnya.

Bahroji, Pembina Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Swadaya, mengungkapkan, di tempat ini ada 768 ekor sapi perah yang terdiri 507 sapi dewasa, 152 sapi dara, dan 109 *pedet* dengan produksi susu mencapai 3.500-4.000 liter per hari. Dia berterima kasih ketika pemerintah memberi dukungan dan bantuan kepada Sentra UPH Olahan Susu Swadaya.

Peternakan sapi perah di Pondok Ranggon

tidak hanya sebagai tempat relokasi peternakan dan produksi susunya, namun juga sebagai tempat wisata, pengenalan, dan pembelajaran (ekowisata) kepada masyarakat bagaimana mengelola bisnis peternakan sapi.

Dalam *antaranews.com*, 14 November 2020, Rusmiati, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta, mengatakan, di Pondok Ranggon, warga tidak sekadar beternak, tapi juga menjadi aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi dan yang terpenting adalah edukasi seputar produksi ternak kepada wisatawan.

Lebih lanjut dikatakan, ekowisata yang ada melibatkan peran serta peternak dari kalangan warga sekitar yang selama ini berbisnis sapi. Ekowisata yang ada disebut gratis bagi wisatawan yang tertarik mempelajari segala aspek tentang peternakan sapi, khususnya peluang bisnis yang bisa digarap. “Pengunjung akan diajak melihat cara merawat sapi perah sejak usianya masih kecil agar saat dewasa nanti sapi tersebut bisa menghasilkan susu murni berkualitas”, ujarnya seperti yang termuat dalam *antaranews.com*.

Di sana, wisatawan bisa praktik pemerah susu sapi di kandang hingga mempraktikkan secara langsung proses produksi susu hingga proses penjualannya. Susu yang ada, menurut Rusmiati, boleh langsung mencicipi atau dibungkus buat dibawa pulang. “Kehadiran ekowisata ini bisa menjadi alternatif wisata di Jakarta serta menjadi lokasi edukasi, khususnya kalangan pelajar,” harap Rusmiati.

Syofian Thahir, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, mengatakan, di Jakarta Timur saat ini terdapat 133 peternak dengan populasi sapi perah tidak kurang dari 905 ekor. Dibandingkan dengan populasi secara keseluruhan di Jakarta, populasi di Jakarta Timur cukup tinggi. Dalam *web* itu, ia mengatakan, “anak sapi perah di Jakarta Timur berjumlah 400 ekor, 300 ekor per tahun berproduksi”. □

AWG/dari berbagai sumber



Perlu Sosialisasi Minum Susu



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NASIB peternak sapi perah di Kuningan, Jakarta, bisa menimpa seluruh peternak sapi perah di Indonesia. Perlu langkah pemerintah untuk memproteksi keberadaan sektor ini. Untuk menjaga peternakan sapi perah dan produksinya, juga perlu dilakukan sosialisasi minum susu agar masyarakat terbiasa mengkonsumsi.

Berikut wawancara dengan Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS., terkait permasalahan persusuan. Pria yang tinggal di Bandung, Jawa Barat, ini adalah Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Pria kelahiran 11 Juni 1953 itu pernah menjadi Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) selama tiga periode. Saat ini dia menjabat Dewan Pakar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI). Berikut penjelasannya:

Benarkah peternakan sapi perah saat ini dari segi jumlah sapi, produksi susu, dan peternaknya mengalami penurunan?

Bila dilihat data, selama 5 tahun terakhir sejak 2015 kenaikannya melandai tidak signifikan. Dari sisi konsumen, konsumsi susu sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan rata-rata 6% per tahun, namun populasi sapi perah dari tahun ke tahun nyaris tidak berkembang. Tahun 2015 tercatat

populasi nasional 518 ribu ekor, tahun 2019 naik menjadi 561 ribu ekor, naik 42 ribu ekor selama 5 tahun atau sebesar 8%. Sementara data menunjukkan peningkatan produksi susunya hanya 2%/tahun.

Sepertinya berbagai kerja sama dan dorongan terhadap peternak sapi perah sudah dilakukan, namun hasilnya tetap belum optimal, seperti rendahnya produksi susu dan berkurangnya jumlah sapi, benarkah demikian?

Sangat benar. Inti persoalannya adalah rendahnya perhatian pemerintah terhadap industri ini. Seperti misalnya, sejak pasca krisis ekonomi, persusuan dilepas ke pasar bebas tanpa proteksi sama sekali. Padahal seharusnya susu merupakan *bapokting*, komoditi ini harus dijadikan program susu sekolah secara nasional untuk mengatasi masalah *stunting*. Perpres persusuan yang diajukan sejak lama lebih dari 10 tahun hingga kini belum terbit.

Problem produksi susu yang rendah bisa dikatakan karena pola peternakan masyarakat yang masih sederhana atau tradisional. Apakah perlu dilakukan modernisasi menyeluruh kepada para peternak itu?

Sangat betul. Karena membangun persusuan harus dilakukan lintas kementerian dan lembaga, berkaitan dengan tuntutan

perubahan SDGs, digitalisasi, industrialisasi 4.0, dan beberapa konsep yang saya buat adalah bagaimana kita memberdayakan koperasi persusuan yang selama ini boleh disebut tertidur lelap. Konsep koperasi susu masa depan, antara lain mampu berkontribusi minimal 50% terhadap konsumsi nasional yang saat ini hanya sekitar 18% saja, melalui program PMTAS (program makanan tambahan bagi anak sekolah atau susu sekolah).

Bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan peternakan sapi perah?

Menurut hemat saya, perhatian pemerintah daerah relatif tidak mampu memberikan pertumbuhan maupun perkembangan yang ada. Boleh disebut hanya mampu menjaga dari kepunahan.

Banyaknya pembangunan di daerah-daerah sebagai tempat hunian dan wisata, apakah menggeser keberadaan para peternak sapi perah?

Jelas sekali, alih fungsi lahan sangat berpengaruh terhadap keberadaan peternakan sapi perah. Terutama di sentra-sentra sapi perah yang sebagian besar berada di sentra wisata. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya harga lahan, meningkatnya biaya produksi, namun tidak diimbangi dengan meningkatnya harga hasil produksinya.

Apakah harga susu di Indonesia terbilang mahal sehingga masyarakat masih sedikit yang rutin mengonsumsi susu?

Keterkaitan masalah konsumsi susu di Indonesia, sesungguhnya bukan semata-mata masalah harga, namun lebih kepada persoalan "lactose intolerance" perut orang Indonesia terhadap susu segar. Sehingga pemerintah atau *stake holder* persusuan harus mampu melakukan sosialisasinya melalui anak sekolah melalui program susu sekolah atau PMTAS, sehingga jika sudah dewasa masyarakat kita menjadi terbiasa meminum susu. □

Mira

Dekranasda Cianjur

Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

DAMPAK pandemi Covid-19 betul-betul sangat dirasakan rakyat, terutama para pelaku UMKM di daerah-daerah. Di Cianjur, Jawa Barat, misalnya, produk-produk asli hasil kreasi rakyat ini sangat membantu perekonomian banyak orang. Produk kerajinan wayang golek dan kerajinan keramik, serta resin, yang dihasilkan UMKM mampu menembus pasar ekspor seperti Malaysia dan Libanon. Namun, pandemi membuat semuanya menjadi terseok-seok, bahkan menyerah.

Untuk itulah, pelaku UMKM ini mesti mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah dan pusat, juga dari para pelaku industri lainnya seperti industri wisata.



Salah satu caranya dengan dukungan modal dan pemasaran, melakukan kerjasama, membuka akses kepada mereka untuk lebih memperkenalkan produknya.

Saya bersyukur pemda dan pemerintah pusat berkenan memerhatikan mereka dengan berbagai program pemberdayaan UMKM. Juga kepada industri wisata, seperti hotel mau bekerjasama dengan memberikan tempat khusus untuk display produk UMKM kepada para tamu.

Hal tersebut akan membangkitkan semangat dan gairah para pelaku UMKM untuk terus berkarya dan bertahan di masa pandemi. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ibu Ainul

Warga Masyarakat Jawa Timur

Jaga NKRI Lewat Politik

INDONESIA adalah tanah tumpah darah semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Kewajiban kita semua sebagai rakyat, termasuk kaum perempuan Indonesia, untuk menjaga kesatuan dan persatuan sampai kapanpun. Salah satu caranya melalui partai politik.

Berkiprah di dunia politik, perempuan Indonesia tidak kalah dengan kaum laki-laki. Saya rasa perempuan Indonesia mesti memiliki semangat untuk tidak ragu-ragu terjun ke dunia politik.

Buat kaum perempuan yang baru terjun atau masih awan di politik, saya mengharapkan agar para tokoh nasional dan tokoh politik yang bernaung di parpol berkenan turun ke bawah untuk melakukan edukasi politik kepada rakyat. Tentunya, dengan teknik komunikasi yang bisa dimengerti oleh rakyat kebanyakan.

Selain memberikan edukasi, salah satu yang juga penting adalah para tokoh nasional mesti menunjukkan dan menjadi teladan yang baik untuk rakyat. □

Berapa Lama Kegiatan Masyarakat Perlu Dibatasi?

Pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jawa - Bali, perlu dikendalikan secara masif sehingga pemerintah melakukan PPKM Darurat. Langkah ini diberlakukan agar wabah yang sudah terjadi setahun lebih itu bisa diatasi, namun penerapan PPKM Darurat menimbulkan berbagai masalah, seperti terhentinya roda pendapatan masyarakat terutama rakyat kecil. Akibatnya banyak terjadi protes di kalangan masyarakat. Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah tersebut:

H. Alifuddin, Anggota MPR Fraksi PKS

Jika Patuh Aturan, PPKM Tidak Akan Lama



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DEALNYA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditaati oleh semuanya, sehingga penerapannya tidak berlangsung lama dan tidak diperpanjang. Harapan kita penerapan seminimal mungkin agar rakyat kecil tidak semakin tercekik karena pembatasan ini.

Karena angka penularan Covid-19 masih terbilang tinggi, sehingga PPKM Darurat Jawa - Bali diperpanjang. Mengenai kenapa angka penularan masih tinggi, hal itu bisa ditanyakan langsung ke Ketua Satgas

Penanganan Covid-19. Tapi, kalau pandangan saya, karena sedari awal masih tidak ada tindakan tegas dari hulu sampai hilir, jadi dampaknya baru sekarang.

Meski ada PPKM Darurat, namun sebagian masyarakat tidak peduli dan mengabaikan. Bisa saja itu terjadi karena pemerintah kurang menyosialisasikan bahaya Covid-19 dan Covid-19 itu benar-benar ada. Tapi, menurut saya, informasi satu pintu tidak terjalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah seolah terlihat

meninggalkan rakyatnya dan juga ada beberapa kebijakan yang inkonsisten. Jadi, masyarakat menjadi acuh walau tahu bahaya Covid-19 seperti apa.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari awal ingin ada *lockdown* murni atau parsial yang mengacu pada UU Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, jadi setiap kebutuhan ditanggung pemerintah. Namun, apa daya karena sudah berjalan tinggal dimaksimalkan dengan baik. Kami tetap menyalurkan bantuan sesuai kemampuan kami, namun peran utama tetap ada di pemerintah pusat maupun daerah.

Tingkat ekonomi dapat memengaruhi sukses atau tidaknya PPKM karena masyarakat yang memiliki penghasilan harian mau tidak mau harus tetap keluar rumah mencari nafkah. Dan banyak dari mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah. Namun, dengan edukasi yang cukup itu dapat ditekan dengan menerapkan prokes, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitasi atau 5 M dengan ketat.

Di negara-negara Eropa terjadi *lockdown*, namun masyarakat di sana patuh. Bisa jadi, karena masyarakat di sana mempunyai tingkat kemapanan ekonomi dan pendidikan yang tinggi. Menurut saya, itu salah satu factor, namun yang terpenting tugas dan kebijakan pemerintah harus lebih maksimal

dalam penanganan Covid-19. Selain itu, Eropa dan negara maju memberikan jaminan penuh terhadap warganya yang di-lockdown sehingga rantai penyebaran

cepat dihentikan.

Apakah vaksinasi massal bisa membuat *herd immunity*, sehingga PPKM bisa dicabut selamanya? Jika sudah mencapai target dan

membuat *herd immunity* insya Allah bisa, namun yang lebih tepat menjawab ini adalah ahli dalam bidang *epidemiologi*. □

AWG

Hj. Aliyah Mustika Ilham, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Pemerintah Tidak Konsisten dengan Kebijakannya

MASA berlakunya PPKM idealnya hingga kasus sudah mulai menurun. Jadi, batas waktunya hingga kasus aktif harian menunjukkan *trend* menurun secara signifikan. PPKM Darurat Jawa - Bali diperpanjang, karena angka penularan terbilang masih tinggi. Kenapa demikian? Angka kasus aktif terbilang tinggi karena *tracing* yang dilakukan pemerintah semakin besar jumlahnya, sehingga temuan jumlah kasus juga saat ini masih relatif tinggi.

Meski ada PPKM Darurat namun sebagian masyarakat tidak peduli dan mengabaikan, mungkin saja disebabkan pemerintah kurang menyosialisasikan bahaya Covid-19 dan Covid-19 itu benar-benar ada. Menurut saya, banyak faktor yang saling terkait, salah satunya kebijakan pemerintah mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi. Sebelumnya masyarakat dilarang mudik, tapi pintu wisata dibuka, masyarakat dibatasi pergerakannya tapi pintu penerbangan luar negeri tetap dibuka. Ketidaktegasan ini membuat masyarakat kadang cenderung abai dengan anjuran pemerintah. Soalnya, yang ini diperketat, namun yang lainnya dibuat longgar.

Sebagian masyarakat menolak PPKM Darurat dengan alasan mereka tidak bisa bekerja dan berdagang. Apakah pemerintah tidak menggulirkan bantuan sosial atau ganti rugi? Pemerintah berkewajiban memberi bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu yang terdampak dari PPKM. Harapan kita bantuan yang diberikan semoga tepat sasaran.

Apakah tingkat keamanan ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi faktor sukses tidaknya PPKM? Saya rasa masya-



rakat tidak perlu disalahkan, yang harus ditunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjalankan semua aturan. Pemerintah harus memberi contoh, jangan malah mereka yang melanggar aturan tersebut, sebagaimana yang kita lihat selama ini banyak pejabat selama masa pandemi malah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Di negara-negara Eropa terjadi *lockdown*, namun masyarakat di sana patuh, apakah hal demikian disebabkan masyarakat di sana mempunyai tingkat keamanan ekonomi dan pendidikan yang tinggi? Sama sekali bukan itu penyebabnya, tapi konsistensi pemerintah di saat mengambil satu kebijakan.

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang pada prinsipnya sadar akan tanggung jawab, cuma kadang faktor yang banyak memicu ketidakpatuhan itu karena pemerintah sendiri seperti tidak konsisten dengan kebijakannya.

Apakah vaksinasi massal bisa membuat *herd immunity* sehingga PPKM bisa dicabut selamanya? Salah satu cara membentuk *herd immunity* adalah melalui vaksinasi, untuk konteks Indonesia cakupan *herd immunity* sekitar 70% masyarakat, kalau ini sudah dicapai berarti kita akan seperti negara-negara maju lainnya yang sudah terlepas dari belenggu virus Covid-19. □

AWG

Hari Koperasi Nasional

Jadikan Koperasi Maju Objek Percontohan

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menyatakan, semua pihak seharusnya mendorong tumbuhnya koperasi di Indonesia, sebab koperasi adalah sistem perekonomian yang paling sesuai dengan ideologi Pancasila.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, menganjurkan pemerintah memilih sejumlah koperasi yang maju dan bertahan di era disrupsi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai objek percontohan. Sejumlah strategi bisnis, sistem kerja, semangat gotong-royong anggota, kejujuran pengurus, etika organisasi, dan semua keberhasilan koperasi-koperasi itu hendaknya disosialisasikan oleh pemerintah lewat media TV, media cetak, media sosial, agar ribuan pengusaha kecil dan menengah yang kini terpuruk akibat pandemi bisa mencontohnya.

"Lewat gerakan sosialisasi dan pembelajaran seperti ini, gerakan koperasi bukan hanya akan lebih dikenal di usianya yang ke-74 ini, tapi juga bisa dicontoh dan menjadi sokoguru perekonomian nasional yang bisa melawan kapitalisme," kata Ahmad Basarah, dalam Webinar bertema "Dengan Hari Koperasi Nasional, Kita Simak Kontribusi Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan oleh Institut Koperasi Indonesia, Sabtu (24/7/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, sistem koperasi telah tumbuh di Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan, dimulai oleh

Patih Raden Aria Wiria Atmaja pada 1896. Lewat gerakan koperasi itu, Raden Aria hendak membendung jeratan para rentenir yang mencekik perekonomian para pegawai negeri. Namun, Ahmad Basarah menyayangkan meski telah tumbuh lama di Nusantara, tidak ada satu pun koperasi di Indonesia masuk dalam 300 koperasi besar di dunia versi International Cooperative Alliance (ICA) pada 2020.

"Kondisi ini tentu memprihatinkan, ekonomi kita lebih mengesankan kapitalisme ketimbang kekeluargaan. Padahal para founding fathers, seperti Bung Karno, sejak awal sudah mengusulkan demokasi politik dan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Mohammad Yamin menolak paham liberalisme dan demokrasi ala Barat, sedang Bung Hatta menekankan perlunya membangun koperasi untuk melawan kapitalisme," tegas Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menambahkan, semua pihak seharusnya mendorong tumbuhnya koperasi di Indonesia, sebab koperasi adalah sistem perekonomian yang paling sesuai dengan ideologi Pancasila. Di dalam perkoperasian, asas kekeluargaan dan kolektivisme yang diatur dalam Pasal 33

UUD NRI Tahun 1945 sangat dijaga kuat. Apalagi jika koperasi itu didasari atas prinsip ketuhanan, misalnya, dalam anggaran dasar sebuah koperasi diatur anjuran berinfak dan bersedekah kepada semua anggotanya setiap kali mereka bertransaksi.

"Jika sistem perekonomian serupa ini dikembangkan, disosialisasikan dengan baik dan benar, lalu ditiru oleh banyak orang, saya yakin koperasi di Indonesia akan tumbuh besar dan melawan sistem kapitalisme yang terasa menggurita di Tanah Air," tegas dosen pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Sementara itu, sebagai pembicara kedua dalam Webinar itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik usul Ahmad Basarah. Dia menyebut, sosialisasi menjadi penting sebab jumlah koperasi di Indonesia terbanyak di dunia, namun skop mereka masih kecil-kecil. "Di NTT, 50% penduduknya berkoperasi, di Kalbar 20% penduduknya berkoperasi. Karena itu mereka perlu pemberdayaan dan pembelajaran, antara lain sosialisasi itu," jelas Teten.

Mantan Direktur Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menjelaskan, ada tiga disrupsi yang menjadi tantangan perkembangan koperasi saat ini, yakni disrupsi sosial berupa perubahan aktivitas masyarakat dalam berbisnis di era pandemi, disrupsi geografi akibat munculnya generasi milenial di tengah masyarakat, dan disrupsi teknologi. "Baru 0,7% dari total koperasi yang menerapkan teknologi digital, padahal anak muda banyak berkecimpung dalam teknologi digital ini," jelas Teten.

Teten juga menyebut citra koperasi tidak selamanya bagus, karena sejumlah koperasi melakukan maladministrasi dan tindakan tidak simpatik lainnya, misalnya korupsi, keributan di antara pengurus, koperasi papan nama yang dibuat hanya untuk menampung bantuan pemerintah, koperasi yang justru melilit rakyat, koperasi yang menghisap ekonomi masyarakat dengan bunga yang mencekik leher, dan

lain-lain. Kementerian yang dipimpinnya menjalin kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan citra koperasi itu.

Pembicara ketiga, Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan, Johannes

Gunawan, membenarkan nuansa kapitalisme lebih kentara dalam perekonomian nasional ketimbang nuansa ekonomi kekeluargaan yang diperjuangkan para founding fathers. Dia menyebut pada 2018 saja, ada 29.554

perusahaan tumbuh di Indonesia, mempekerjakan enam juta pekerja dengan nilai output mencapai lebih dari Rp 61 triliun. Sebaliknya, jumlah koperasi pada 2019 mencapai 123.048 unit, tapi jumlah hasil usahanya hanya sekitar Rp 6 miliar. □

Penyaluran Dana BLT

Pemerintah Daerah Jangan Pendam Dana BLT

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi dana bantuan sosial.

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta para kepala daerah tidak menunda atau memendam dana bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah daerah diharapkan tanggap terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kondisi krisis yang terjadi saat ini dengan tidak menunda, apalagi memendam dana BLT yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat,” tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/7).

Menurut politikus Partai NasDem itu, penyaluran dana BLT bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Bantuan tersebut sudah berlangsung lama, dan setiap daerah telah memiliki data penerima bantuan sampai ke desa-desa. “Jadi, tidak ada alasan untuk berlama-lama dalam proses pencairan dan distribusi dana bantuan sosial tersebut,” ujarnya.

Dengan bekal pengalaman dalam menyalurkan BLT selama ini, imbuhan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang akrab disapa Rerie, selain tanggap, pemerintah daerah mestinya gerak cepat dan trengginas dalam mendistribusikan BLT kepada warga yang berhak menerima.

Jika ada kendala dalam proses penyaluran, imbuhan Rerie, pemerintah daerah harus segera mencari tahu sumber masalahnya dan cepat menentukan jalan keluar untuk mengatasinya. “Kita sekarang berada pada situasi pandemi. Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi, tapi yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,” tukasnya.

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama 1,5 tahun, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan bersama, persoalan bangsa dan negara.

“Pandemi memaksa kita untuk bekerja secara profesional dan cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan di sekitar. Jangan sampai ketidakprofesionalan kita memunculkan penderitaan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dari negara,” katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, lambatnya pemerintah daerah menyalurkan BLT ke desa-desa. Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30% dari dana desa Rp 72 triliun

yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat. Dengan anggaran itu, seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300 ribu per bulan.

“Namun, realisasinya baru 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM (keluarga penerima manfaat), di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama 12 bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (21/7).

Distribusi BLT, lanjut Rerie, tidak boleh berbelit karena dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menstimulasi daya beli masyarakat yang terpuruk karena krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. “Dana itu sangat penting guna merangsang daya beli yang terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan mengulur-ulur pencairannya.” □

Hari Koperasi Ke-74

Di Masa Pandemi, Koperasi Jadi Sokoguru Penyelamat Ekonomi Republik

Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan, berharap, semua pihak bersatu padu membesarkan koperasi, terutama berbagai kelompok kepentingan yang terkait langsung dengan pengembangan dan pemberdayaan koperasi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HARI Koperasi Nasional ke-74 yang jatuh pada 12 Juli 2021 patut menjadi momentum kebangkitan perekonomian nasional. Hal ini tidak saja karena secara historis koperasi telah terbukti mampu bertahan dari berbagai badai krisis ekonomi, namun juga menjadi penyelamat bagi jutaan masyarakat yang tengah dilandasi kesusahan. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional, mandat konstitusi yang sudah selayaknya dijadikan sebagai panglima dalam menjaga ketahanan ekonomi republik.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, mendorong pemerintah agar memprioritaskan serta membangun iklim yang konstruktif dalam membesarkan koperasi di Indonesia. "Saya memandang koperasi adalah mandat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anatomi perekonomian Indonesia adalah bentuk usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan," ujar Menteri Koperasi dan UKM pada era Presiden SBY ini.

Sebagaimana diketahui, koperasi bersama-sama dengan UMKM menyumbang kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2020, koperasi dan UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara dengan Rp 8,573 triliun. Dari sisi jumlah, sebanyak 64,2 juta (99,99%) koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dengan total investasi sebesar 60,42%.

Namun demikian, kinerja koperasi dan UMKM ini masih menyisakan catatan serius. Kontribusi ekspor koperasi dan UKM hanya berkisar di angka 14,37%, bahkan koperasi

sendiri hanya menyumbang kontribusi 5,1% terhadap PDB. Bandingkan dengan usaha besar yang hanya berjumlah 5,550 (0,01%) mampu menyumbang 38,9% terhadap PDB. "Daya saing koperasi dan UMKM harus terus ditingkatkan, tentu saja dengan dukungan pemerintah yang solid dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membiarkan koperasi dan UMKM berjalan sendiri," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Syarif Hasan menyatakan, semua pihak harus bersatu padu membesarkan koperasi, terutama berbagai kelompok kepentingan yang terkait langsung dengan pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang memiliki mandat membumikan cita-cita gerakan koperasi Indonesia tidak seharusnya terpecah dan perlu segera melakukan rekonsiliasi.

"Sebagai Mantan Menteri Koperasi dan UMKM, saya tentu sangat prihatin dan menyesalkan perpecahan ini. Perpecahan hanya akan membuat koperasi melemah dan kontribusinya terhadap perekonomian tidak berkembang. Karena itu, saya mengimbau kepada Dekopin untuk bersatu kembali seperti saat saya pernah mempersatukan Dekopin ." ujar Syarif Hasan.

Selamat Hari Koperasi ke-74, semoga dengan momentum Hari Koperasi Nasional ke-74 ini kita semua dapat mawas diri untuk bergandengan tangan membesarkan koperasi. Terlebih di masa pandemi yang telah memukul perekonomian rakyat ini, koperasi dapat kembali menjadi sokoguru penyelamat ekonomi republik. Sebagaimana tagline "Untung Bareng Koperasi," rakyat masih tetap dapat tersenyum sekalipun prihatin. □

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Pelajar

Bamsoet Ajak Warga Bantu Penderita Covid-19

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan, tidak perlu menutupi informasi diri jika terpapar virus Covid-19. “Justru dengan membuka diri dan menginformasikan kepada lingkungan sekitar, kita bisa mencegah hal buruk terjadi,” jelas Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo berbelasungkawa atas bertambahnya jumlah saudara sebangsa yang wafat akibat terpapar virus Covid-19. Baik yang meninggal di rumah sakit maupun saat isolasi mandiri (isoman) di rumah dan tempat lainnya. Data Laporan Covid-19 mencatat setidaknya ada 712 pasien isolasi mandiri yang wafat. Menjadi fenomena baru seiring meluasnya lonjakan kasus Covid-19. Paling banyak terdapat di Jawa Barat sebanyak 248 orang, Daerah Istimewa Yogyakarta 134 orang, Jawa Tengah 114 orang, Jawa Timur 72 orang, Banten 68 orang, dan DKI Jakarta 53 orang, sisanya di luar Jawa

“Agar warga yang isoman bisa terpantau oleh tetangga dan lingkungan sekitar, ada baiknya di rumah warga yang melakukan isoman diberikan tanda khusus. Misalnya, menggunakan bendera berwarna, sehingga menjadi tanda bahwa di rumah atau tempat tersebut sedang digunakan oleh warga untuk isoman. Termasuk menginformasikan berapa jumlah warga yang sedang isoman di rumah atau tempat tersebut,” ujar Bamsoet usai meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk 6 ribu pelajar dan masyarakat umum, di Garden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/7/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, warga yang isoman juga harus melaporkan dirinya kepada Ketua RT setempat melalui

whatsapp ataupun media komunikasi lainnya. Sehingga RT dan Satgas Covid-19 setempat bisa memantau secara berkala, termasuk memberikan bantuan kepada warga yang isoman.

“Tidak perlu menutupi informasi diri jika terpapar virus Covid-19. Justru dengan membuka diri dan menginformasikan kepada lingkungan sekitar, kita bisa mencegah hal buruk terjadi,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Pengurus Besar Keluarga Olahraga

Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, sesuai informasi Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban, pasien isoman harus rutin melakukan pemeriksaan mandiri terhadap dirinya. Hasilnya, sebaiknya juga dilaporkan kepada keluarga dan Ketua RT setempat.

“Pemeriksaan itu meliputi suhu tubuh dan saturasi oksigen. Jika suhunya di atas 39 derajat celsius, serta saturasi oksigennya turun kurang dari 93 dan terus menurun



hingga dibawah 90, pasien harus berhati-hati. Keluarga bersama Ketua RT dan Satgas Covid-19 setempat harus mulai mempersiapkan diri membawa pasien ke rumah sakit. Jika telat, akibatnya bisa fatal,” terang Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menekankan, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu kunci agar pandemi Covid-19 bisa segera terkendali. Sehingga rumah sakit tidak kewalahan serta meminimalisir adanya

pasien yang isoman. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 6 ribu pelajar dan masyarakat umum tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai penyedia vaksin. Bekerjasama dengan RS Islam Jakarta Cempaka Putih sebagai penyedia tenaga medis, serta para sponsor, seperti GERAK BS, IMI, MBI, FKPPi, dan APLI yang menyiapkan sarana dan prasarana seperti jarum suntik dan teknis administrasinya lainnya.

“Kegiatan ini meringankan beban kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan target vaksinasi covid-19 nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, 2 juta dosis vaksin per hari. Sekaligus meringankan beban keuangan pemerintah, karena tak perlu mengeluarkan anggaran untuk sewa tempat, pembelian jarum suntik, hingga honorarium tenaga medis, karena seluruhnya ditanggung pihak sponsor,” pungkas Bamsuet. □

Sesjen MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyoni, SH., MH.

DPD Bisa Memainkan Peran Lebih Besar Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyoni, SH., MH., menyatakan, dengan eksistensinya yang sangat strategis, DPD diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DPD sebagai Lembaga negara adalah salah satu elemen kekuatan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan eksistensinya yang sangat strategis, DPD diharapkan mampu memainkan perannya secara maksimal dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri negara dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Untuk memainkan peran yang lebih besar sesuai dengan hakikat keberadaannya maka DPD harus keluar dari perangkat normatif yuridis konstitusional yang sudah secara limitatif dimandatkan oleh konstitusi. Karena melihat sejarah pembentukannya, DPD lahir untuk tujuan yang lebih besar dalam rangka

memperkokoh kedaulatan NKRI untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Respublika),” kata Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyoni, SH., MH., dalam webinar dengan tema: “Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Rangka Penguatan Demokrasi di Indonesia,” pada Sabtu (10/7/2021).

Selain Ma’ruf Cahyoni, webinar yang diselenggarakan Advokat Alumni Unsoed (AAU) Purwokerto yang diprakarsai oleh Herry Suherman, SH., selaku Ketua AAU ini, menghadirkan narasumber Dr. Abdul Kholik, SH., MH., (Wakil Ketua Komite I DPD RI), Prof. Dr. Muhamad Fauzan, SH., MHum., (Guru Besar Hukum Tata Negara). Bertindak sebagai moderator adalah Sugeng Riyadi, SH., MH., (Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, UNU Purwokerto). Webinar yang diselenggarakan secara virtual dipandu oleh Andrijani Sulistiowati, SH.,MH., (Advokat Senior).

Menyampaikan makalah dengan judul: “DPD dalam Perspektif Ideologi dan Konstitusi”, Ma’ruf Cahyoni menjelaskan original inten lahirnya DPD dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sebagai salah satu perangkat lembaga negara, kelahiran

DPD diharapkan memiliki eksistensi dalam mengawal proses berbangsa dan bernegara Indonesia, merekatkan keberagaman memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Menurut Ma'ruf, sebagai representasi daerah, eksistensi DPD diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi dan agregasi kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional yang berorientasi tumbuhnya demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Harapan kehadiran DPD bisa terwujud, kalau DPD mengoptimalkan perannya dalam menyinergikan kebijakan pembangunan daerah dan nasional secara komprehensif, integratif dan berkelanjutan.

"Oleh karena itu, membicarakan optimalisasi peran DPD harus dengan kaca mata yang lebih luas, dengan melihat latar belakang pembentukannya, baik secara historis, filosofis, maupun sosiologis, sehingga dapat melihat peran dan fungsinya secara komprehensif dan holistik. Karena itu, berbicara tentang optimalisasi peran DPD harus dikembalikan kepada kontekstualitas yang melatari pembentukannya, yakni mewujudkan cita negara persatuan, cita negara demokrasi, dan cita negara hukum," kata Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unsoed ini.

Ma'ruf Cahyono mengatakan, pada tataran supra struktur politik negara, DPD juga memiliki peran penting, yakni sebagai kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan checks and balances antar lembaga negara. Sekarang tidak ada lagi satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat powerful, semua lembaga negara memiliki kedudukan setara, yang membedakan adalah fungsi-fungsinya yang suprematif atas mandat konstitusi. "Checks and balances tentu tidak dalam konteks intervensi, apalagi mencampuri kewenangan antar lembaga negara, tetapi dalam konteks membangun sinergi, kerja sama, kerja bergotong royong dalam satu visi mewujudkan tujuan nasional," jelasnya.

Ma'ruf menguraikan, dalam konteks demokratisasi misalnya, DPD hadir sebagai instrumen yang mewakili daerah, mewakili ruang hidup (wilayah), sehingga secara substansial prinsip dasar demokrasi Abraham Lincoln (dari rakyat, oleh rakyat,



dan untuk rakyat) dapat terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Prinsip semua rakyat harus terwakili adalah esensi demokrasi substansial ala Indonesia, yakni sila keempat, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

"Dalam konteks demokrasi Indonesia, semua terwakili, tidak ada kepentingan rakyat yang ditinggalkan sebagaimana dalam sistem MPR dulu, ada utusan daerah dan utusan golongan. Sekarang ada Dewan Perwakilan Daerah, jadi harapannya semua terwakili, semua kelompok dan golongan, secara filosofis harus terwakili melalui representasi DPD," ujarnya.

Dengan fungsi representasi yang sangat luas, lanjut Ma'ruf, eksistensi DPD juga harus mampu berperan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah aspek yang sangat penting, karena terkait dengan menjaga persatuan bangsa dan kesatuan negara. "Untuk itu melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah, DPD sebagai lembaga legislasi, harus berperan dalam menyinergikan kebijakan pembangunan daerah dan pusat," terangnya.

Selain itu, Ma'ruf menambahkan, DPD juga mempunyai peran dalam merekat keberagaman dan kohesi sosial masyarakat. "Kita bangsa yang majemuk, syarat perbedaan, sifat perbedaan itu adalah eksklusif sehingga kalau tidak dikelola dengan baik maka eksklusifitas yang tajam akan berubah

menjadi konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat. Ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa." ujarnya.

"Kalau hanya melihat kewenangan DPD yang ada dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, tentu akan terbatas pada mandat imperatif dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, DPD harus dilihat secara kontekstual dalam kerangka sistem bernegara. Bukankah para pendiri bangsa sudah mengingatkan bahwa yang lebih penting adalah semangat para penyelenggara negara. Terkait wilayah ruang hidup, daerah kepulauan, perbatasan, sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya. Semua itu penting. Ini bangsa besar, tidak bisa semua dikerjakan sendiri, ada relasi kelembagaan yang mesti dioptimalkan, tentu harus dalam koridor konstitusi. Itu peran para senator menurut saya," sambungnya.

Pada bagian akhir, Ma'ruf memberikan catatan penegasan terkait implementasi peran DPD dalam politik hukum kebijakan pembangunan daerah yang harus sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional, upaya DPD merekatkan keberagaman terkait paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Juga terhadap efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka reorientasi dan sinergi kebijakan daerah dan nasional untuk menjawab tantangan global. Reorientasi dan adaptasi mutlak dilakukan jika DPD ingin mengoptimalkan perannya. □

Jakarta Pusat

HNW Imbau Perkuat Institusi Keluarga

Hal yang mengkhawatirkan, paparan Covid-19 di Indonesia tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Kasus kematian anak Indonesia akibat Covid-19 pada Juni sempat mencapai prosentase tertinggi di dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menguatkan institusi keluarga dan solidaritas sosial di tengah masih tingginya kasus Covid-19. Mengingat jumlah warga yang harus isolasi mandiri masih tinggi, sementara ketersediaan tempat di rumah sakit terbatas. Hidayat Nur Wahid merasa prihatin banyak warga yang akhirnya meninggal ketika isolasi mandiri akibat tidak tertangani dengan baik. Bahkan, banyak anak-anak yang turut menjadi korban, baik sebagai korban jiwa langsung maupun korban karena kedua orang tuanya meninggal akibat Covid-19.

Anggota DPR-RI Dapil DKI II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri ini mengungkapkan, kalau dirinya telah berulang kali memberikan penyuluhan bagi warga soal hidup sehat dan mengatasi Covid-19. Juga memberikan berbagai paket bantuan, baik sembako, obat-obatan, alat-alat kesehatan, tabung oksigen, bantuan tunai, hingga ambulance untuk layanan kesehatan gratis bagi warga terpapar Covid-19. Namun, itu semua tidak bisa menggantikan peran keluarga, apalagi peran pemerintah yang diwajibkan oleh Konstitusi dan memiliki kuasa struktural dan anggaran hingga ribuan Triliun Rupiah.

“Karena itu, perlu peran lanjutan keluarga

serta kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penanganan Covid-19. Antara lain, dengan meningkatkan testing, meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit (Isoman), membayarkan tagihan rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan, serta memberdayakan seluruh unsur pemerintahan hingga ke satuan terkecil di tingkat RT dan RW,” ujar HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, usai acara “Menjadi Guru di Rumah di Era Pandemi Covid-19, Siapa Takut,” yang diselenggarakan oleh LSM RKI (Rumah Keluarga Indonesia) bekerjasama dengan DPD PKS Jakarta Pusat, Ahad (1/8/2021).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, berdasarkan data dari Laporan Covid-19 hingga 30 Juli 2021 setidaknya sudah ada 2.832 warga meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Dari jumlah tersebut, tercatat 2.500 kasus terjadi selama bulan Juli. Tingginya angka kematian isoman disebabkan oleh sebagian pasien bergejala berat, namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan akibat di rumah sakit terjadi overload, kelangkaan obat-obatan dan oksigen. Serta di sebagian tempat tidak mendapatkan penanganan yang baik dan benar oleh keluarga, dan juga kurangnya dukungan positif dari masyarakat sekitar tempat tinggal

warga yang isoman tersebut.

Lebih mengkhawatirkan, paparan Covid-19 di Indonesia tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan, kasus kematian anak Indonesia akibat Covid-19 pada Juni sempat mencapai prosentase tertinggi di dunia.

Menurut HNW, diperlukan peran aktif orang tua untuk memantau kesehatan anaknya. Apabila bergejala Covid-19 maka harus segera testing, dan menghubungi puskesmas atau dokter. Serta membekali setiap keluarga dengan pengetahuan dan alat kesehatan yang memadai untuk atasi Covid-19 yang bisa menimpa anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Orangtua juga penting untuk mengembalikan fitrahnya dengan menjadikan dirinya sebagai Guru bagi anak-anaknya, yang karena pandemic Covid-19 maka diberlakukanlah Pendidikan Jarak Jauh. Orang tua bisa efektif jadi guru dengan mengajarkan keteladanan soal karakter yang baik, saling peduli, dan menyayangi. “Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas testing untuk anak-anak, karena menurut IDAI tingginya kematian anak karena Covid-19, merupakan akibat dari rendah dan lambatnya testing,” ujarnya.

Meski begitu HNW optimistis, bila pemerintah melakukan kewajibannya secara maksimal, dan keluarga juga optimal menghadirkan perannya, maka tekad untuk atasi Covid-19 masih terbuka lebar. Karena, di antara pemerintah dan keluarga ada solidaritas sosial ketika warga masyarakat saling membantu satu sama lain masih terus berlangsung. Berdasarkan laporan Charity Aid Foundation, World Giving Index, Indonesia pada 2021 berada di peringkat pertama di dunia dengan skor 69%, naik dari skor 59% pada Indeks terakhir yang dikeluarkan pada 2018.

Penelitian CAF juga menemukan bahwa 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini, sementara tingkat kerelawanan Indonesia tiga kali lipat lebih

besar dari rata-rata dunia. Menurutnya, hal ini menunjukkan Indonesia memiliki modal sosial besar yang dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 dan keluar dari dampak buruk Covid-19.

"Modal sosial berupa solidaritas ini perlu

semakin dikuatkan melalui terlaksananya kewajiban serta tanggung jawab maksimal pemerintah, arahan keagamaan, peran kemasyarakatan, dan kokohnya peran keluarga dan fungsi orang tua sebagai pengayom, guru dan teladan kepada anak-

anaknya. Dengan begitu penanganan covid-19 dapat dilakukan lebih efektif," ujar HNW. Maka, dengan begitu, tambahnya, warga tidak cemas meski PPKM terus diperpanjangnya dengan berbagai istilahnya yang berubah-ubah. □

RUU PKS

Penantian Panjang Publik

Rencana Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sangat ugen untuk menjadi payung hukum guna melindungi kaum rentan, karena tren kasusnya terus meningkat dari waktu ke waktu.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan, perjalanan panjang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang digagas sejak 2012 hendaknya menjadi concern dan komitmen semua pihak, terutama para legislator untuk segera membahas dan menyetujui beleid itu menjadi undang-undang.

"Kita harapkan pembahasan RUU PKS yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 merupakan babak akhir untuk menjawab penantian panjang publik akan adanya undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, di negeri ini," tegasnya saat menyampaikan pengantar dalam diskusi bertajuk Mengawal RUU PKS dalam Prolegnas 2021, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu (21/7).

Menurut politikus Partai NasDem itu, perjalanan panjang RUU PKS yang penuh dengan tarik ulur dalam proses legislasi melalui ruang politik di Senayan, memancarkan banyak tafsir dan pertanyaan, baik terkait teknis maupun substansi RUU tersebut. "Itu

merupakan sebuah dinamika politik yang wajar, dan kini saatnya bagi kita semua untuk menyatukan persepsi dan memantapkan tekad guna menjadikan RUU itu sebagai hukum positif di Indonesia," katanya.

Adanya RUU PKS, kata Legislator Partai NasDem yang akrab disapa Rerie, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menangkal terjadinya kekerasan seksual di negeri ini. "Proses pembahasan RUU itu perlu dikawal agar berjalan lancar sehingga dapat segera disahkan menjadi UU dalam tahun ini," pintanya.

Upaya-upaya untuk membangun kesamaan persepsi, kata Rerie, harus terus dilakukan secara konsisten bahwa perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua kekuatan sosial politik. "Political will saja tidak cukup. Perlu perubahan yang radikal dalam pola pikir dan pola pandang untuk meniadakan bias gender yang dapat mengganjal proses pembahasan RUU itu," tandas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Diskusi mingguan yang digelar setiap Rabu itu, dalam edisi ke-65 kali ini menghadirkan empat narasumber, yakni Taufik Basari (anggota DPR RI), Yuniati Chuzaifah (aktivis gender dan HAM), Anggia Emarini (Ketua Umum PP Fatayat NU), serta Khotimur Susanti (Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan PP Nasyiatul Aisyiyah).

Menurut Taufik Basari, dalam empat kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU PKS dengan berbagai stakeholders, problem terbesar yang muncul adalah kekeliruan paradigma berpikir serta kesalahpahaman dalam melihat RUU tersebut.

"Kita harus membersihkan diri dari kubang kesalahpahaman itu agar RUU ini tidak menjadi korban dari pertarungan berbagai pemikiran dan tuduhan tak berdasar. Semua pihak hendaknya beradu argumentasi berlandaskan fakta, data, dan pengalaman empirik selama ini, jangan bersandar pada interpretasi dan tuduhan abstrak yang mengawang-awang," tegasnya.

Pembicara lainnya, Yuniyanti Chuzaifah, menyoroti tentang pentingnya aturan per-

undangan yang melindungi warga negara dari ancaman kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak. “Anak laki-laki atau perempuan rentan terhadap kekerasan seksual, apalagi di era disrupsi teknologi digital dewasa ini, kekerasan seksual tidak hanya bisa terjadi secara konvensional tetapi juga bisa secara daring dalam bermacam bentuk,” katanya meng-ingatkan.

Berdasarkan data KPAI, kata dia, kasus kekerasan seksual secara daring pertama kali di laporkan ke KPAI pada 1986. Empat-belas tahun kemudian, yakni pada 2000, sudah ratusan laporan tentang kekerasan seksual secara daring yang masuk ke KPAI, belum termasuk laporan ke kepolisian.

“Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu bukan ruang hampa, tapi sungguh nyata terjadi di depan mata kita. Temuan Komnas Perempuan, ada rongga hukum dalam kasus kekerasan seksual, di mana korban berjatuh tapi tidak ada pelaku karena ketiadaan hukum. Jadi, sungguh aneh bila ada pihak yang menganggap RUU PKS tidak urgen,” tukasnya.

Anggia Emarini menambahkan, jika berkaca pada realitas selama ini, RUU PKS sangat urgen untuk menjadi payung hukum guna melindungi kaum rentan, karena tren kasusnya terus meningkat dari waktu ke waktu. “Kita sejak awal mendukung RUU itu, dan selama ini



Fatayat NU melalui jaringannya, baik dalam negeri maupun luar negeri selalu memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual.”

Pandangan serupa disampaikan oleh Khotimun Susanti. Menurutnya, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, termasuk kekerasan seksual merupakan perintah agama. Korban kekerasan seksual adalah orang tertindas yang harus dilindungi, bukan dengan kata-kata atau perhatian saja, tetapi dengan perlindungan secara hukum. “Itu esensi perlindungan di sebuah negara hukum seperti Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Saur Hutabarat, saat

menyampaikan kata penutup dalam diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri itu, antara lain mengingatkan bahwa parlemen merupakan forum konsensus, bukan forum untuk memperlebar perbedaan pendapat tanpa solusi. “Parlemen itu forum untuk menyatukan beragam aspirasi publik,” tegasnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, salah satu langkah konkret yang harus ditempuh untuk memperlancar pembahasan RUU PKS ialah segera memindahkan pembahasan RUU tersebut dari instrumen panja ke instrumen pansus. “Ini penting karena hasil kajian menunjukkan bahwa RUU yang dibahas panja lebih banyak gagal ketimbang yang dibahas oleh pansus. □

Program Tebar Sejuta Paket Kurban

Salurkan Daging Kurban kepada Warga Terpapar Covid-19

Wakil Ketua MPR RI, dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap, spirit peduli daging kurban dapat menyemangati mereka yang mengalami kesusahan akibat pandemi Covid-19. Serta, semangat saling membantu dan gotong royong selalu bisa dihadirkan lagi.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA., turut membagikan daging kurban pada Idul Adha tahun 2021 lalu. HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa daging kurban, antara lain disampaikan kepada warga terpapar Covid-19 yang sedang isolasi mandiri (isoman). Penyerahan daging kurban itu

merupakan dukungan nyata atas Program Tebar Sejuta Paket Kurban yang dicanangkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri. Program ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Saya mendukung program yang diinisiasi oleh Dr. Salim dengan hadirkan kepedulian

nyata terhadap warga terdampak Covid-19, khususnya di daerah pemilihan (dapil) Jakarta II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

HNW mengatakan, hewan kurban disalurkan bekerja sama dengan kader dan relawan PKS, serta tokoh masyarakat.

Daging kurban yang disampaikan ke sejumlah lokasi di berbagai kecamatan, masjid, dan mushola di Jakarta Selatan serta Pusat, berasal dari 22 ekor sapi dan 11 ekor kambing.

“Semoga spirit peduli dan daging kurban yang disalurkan, membantu warga terdampak Covid-19, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyemangati mereka yang susah akibat pandemi. Serta agar semangat saling membantu dan gotong royong selalu bisa dihadirkan lagi,” ujarnya.

Hewan kurban yang menghasilkan ribuan paket tersebut disalurkan, antara lain kepada warga terdampak Covid-19 dan sekarang sedang isolasi mandiri di rumah-rumah. Faqir / miskin, guru-guru ngaji, panti asuhan hingga anak-anak yatim, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta afiliasi politik. HNW mendorong umat Islam agar menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai momen menguatkan solidaritas, persatuan dan toleransi.

“Semua warga, apalagi yang terdampak Covid-19, tanpa membedakan SARA dan Afiliasi Politik, harus merasakan manfaat dan berkah dari ibadah sosial kurban ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengingatkan agar pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, sesuai anjuran pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, dan Muhammadiyah. Selain menjauhkan dari kerumunan, ia juga mengingatkan agar menggunakan wadah yang sehat, kalau pun mempergunakan plastik hendaknya yang

bisa didaur ulang.

Warga menyambut positif program Tebar Sejuta Paket Kurban yang didukung oleh HNW. Ibu lis misalnya, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini berterima kasih dengan gerakan tebar 1 juta paket kurban ini. Ia mendoakan agar tebar sejuta paket kurban itu membuat Indonesia memperoleh keberkahan di masa sulit pandemi Covid-19 ini.

“Insha Allah berkah, apalagi di tahun ini (sedang pandemi Covid,-19). Terima kasih kepada Pak Hidayat dan terima kasih kepada PKS yang telah menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat ini,” ujarnya saat menyaksikan pemotongan dan menerima pembagian daging kurban di dekat rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 20/7/2021.

Selain pendistribusian hewan kurban, HNW sebagai pimpinan partai oposisi, juga sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, baik yang isoman maupun tidak. Tanpa membedakan latar dukungan politik maupun SARA. Bantuan yang disalurkan beragam dari bantuan makanan, sembako, masker, APD, obat-obatan dan vitamin. Juga uang cash bagi warga yang sedang isoman, ambulance, advokasi akses rumah sakit, hingga dukungan percepatan vaksinasi di sejumlah daerah di Jakarta Pusat dan Selatan.

“Itu semua wujud kecintaan kepada warga dan kepada Indonesia. Membantu Pemerintah dan sesama agar lekas sehat dan selamat dari virus Korona varian delta dengan segala kejahatannya,” pungkas HNW. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Ahmad Basarah Berharap

AS dan Tiongkok Tidak Terjebak “Perangkap Thucydides.”

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, menyarankan agar setiap negara, terutama AS dan Tiongkok, mencari solusi terbaru untuk menciptakan stabilitas regional dan internasional agar dunia terhindar dari “Jebakan Thucydides” ini.

WAKIL Ketua MPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, berharap, keterlibatan Jerman sebagai sekutu AS mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan (LCS) tidak menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu. Menyampaikan pesan perdamaian dari Jakarta, Rabu (4/8/2021), Ahmad Basarah berharap, AS dan Tiongkok tidak terjebak dalam “Perangkap Thucydides” yang diteorikan ilmuwan politik AS, Graham T. Allison.

Istilah “Thucydides’ Trap” atau Perangkap Thucydides dipopulerkan kali pertama oleh Allison pada 2012 untuk *Financial Times* guna menggambarkan dipilihnya opsi perang oleh pemegang hegemoni dunia ketika muncul kekuatan regional baru. AS selama ini dikenal sebagai hegemon dunia, sementara Tiongkok dipersepsikan sebagai kekuatan baru. Allison menggunakan teori ini mengutip sejarawan sekaligus jenderal militer Athena, Thucydides, yang menjelaskan Perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta terjadi akibat ketakutan Sparta melihat kekuatan baru Athena.

“Bangsa Indonesia tentu berharap keterlibatan militer Jerman sebagai sekutu AS di Laut Cina Selatan benar-benar untuk tujuan kebebasan navigasi seperti disampaikan Berlin kepada sekutunya, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu,” jelas Ahmad Basarah.

Media memberitakan, untuk kali pertama dalam dua dekade di tengah meningkatnya ketegangan AS dengan Tiongkok, Jerman mengirim satu dari empat fregat kelas Brandenburg Jerman, Bayern (Bavaria), dari pangkalan angkatan laut Jerman Wilhelmshaven, Senin (2/8/2021), dalam upacara yang dihadiri Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer. Kapal perang itu membawa 46



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

torpedo anti-kapal selam, peluru kendali anti-kapal, dan senjata anti-pesawat. Kapal tempur itu akan menghabiskan enam bulan ke depan di samudera lepas.

Menurut Ahmad Basarah, dunia mestinya bersyukur Perang Dingin antara AS dan Rusia sudah lewat. Daripada memunculkan konflik baru sesama penghuni planet Bumi, dia menyarankan setiap negara, terutama AS dan Tiongkok, mencari solusi terbaru untuk menciptakan stabilitas regional dan internasional agar dunia terhindar dari “Jebakan Thucydides” ini.

“Semua penghuni planet Bumi kini punya musuh bersama bernama siluman Covid-19. Musuh kita ini tidak terlihat, tidak mengenal hukum perang, juga tidak mengenal perikemanusiaan. Mengapa tidak semua umat manusia bersatu melawan musuh bersama ini ketimbang perang,” jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ahmad Basarah juga menekankan, dalam ketegangan LCS itu, Indonesia sebaiknya tidak ikut arus mendukung salah satu dari kedua negara yang sedang berkontestasi sebagai pemegang hegemoni dunia. Dia mengusulkan Indonesia tetap konsisten mengikuti ajaran politik Bung Karno, yang memilih menggalang aliansi negara-negara nonblok saat AS sebagai kampiun demokrasi bersitegang dengan negara-negara blok komunis.

“Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meredakan ketegangan dan mengusung perdamaian, sambil menarik manfaat ekonomi dan manfaat geopolitik dari persaingan global ini,” jelas dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Dari sejumlah pemberitaan media internasional, tampak bahwa AS dan Tiongkok memang telah memicu ketegangan dunia setelah kedua negara terlibat perang

dagang. Sementara dalam kondisi pandemi keduanya saling menyalahkan dan menarik dukungan politik banyak negara. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, belum lama ini berkunjung ke Asia Tenggara, dan di saat hampir bersamaan dilangsungkan latihan tempur gabungan AS bersama negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Ahmad Basarah menilai, sangat wajar jika AS melihat Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini tetap di angka 2,3% di akhir 2020, meski

seluruh dunia terkena pandemi. Tiongkok diperkirakan akan menyalip AS sebagai ekonomi terbesar dunia di 2050. Hal ini akan mengganggu hegemoni AS dan sekutunya.

Berbagai forum internasional, seperti KTT G7, NATO, dan Uni Eropa (blok Barat) selalu berfokus pada ancaman Rusia dan Tiongkok di Asia Pasifik. Bagi AS, kedua negara itu disebut sebagai “ancaman ganda”. Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah AS tidak pernah diundang ke semua forum itu.

“Dengan konstelasi dunia seperti itu, sebenarnya terbuka peran buat Indonesia untuk aktif mengusulkan semua negara, termasuk Tiongkok, dilibatkan dalam semua pertemuan tingkat dunia itu. Indonesia sangat layak menjalankan peran perdamaian dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat sudah tegas mengamanatkan agar negara kita turut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutup Ahmad Basarah. □

Syarief Hasan

Lazada Indonesia Tutup Akses Barang Impor

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengapresiasi langkah Lazada Indonesia memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendukung langkah dari Lazada Indonesia yang menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri, yakni klaster tekstil dan fashion, klaster kuliner, dan klaster kerajinan. Penghentian perdagangan barang impor pada tiga klaster tersebut dimulai pada Selasa, (3/8/2021).

Syarief Hasan menilai, langkah Lazada Indonesia patut didukung sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. “Saya atas nama Pimpinan MPR RI dari Partai Demokrat mengapresiasi langkah Manajemen Lazada Indonesia yang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya,” ungkap Syarief Hasan di Jakarta baru-baru ini.

Syarief Hasan juga menyebut, berbagai produk impor telah mengambil pangsa pasar dari produk lokal. “Beberapa waktu terakhir, serbuan barang-barang asing kian marak di beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Akibat serbuan tersebut, produk lokal tergeser dan bahkan berpotensi mati sehingga dibutuhkan langkah nyata dan keberpihakan untuk mendukung produk-produk dalam negeri,” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat



ini juga mendorong Pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan menyediakan dan meningkatkan pasar produk-produk dalam negeri. “Presiden Jokowi telah menggaungkan semangat Cintai Produk Dalam Negeri. Namun, semangat tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata lewat penyediaan bantuan mutu produksi hingga pemasaran produk-produk lokal,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyebut, produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat perlu didorong membeli produk lokal. “Kita memiliki produk-produk lokal yang berkualitas, mulai dari sepatu, pakaian, kerajinan tangan, kuliner khas yang telah mendunia, hingga terbaru sepeda buatan Indonesia yang digunakan oleh beberapa atlet mancanegara di Olimpiade Tokyo 2020,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga terus mendorong Pemerintah untuk mendukung UMKM-UMKM dalam menciptakan barang dan jasa berkualitas. “Pemerintah harus terus mempertemukan UMKM dengan BUMN dan Perusahaan Swasta lainnya yang dapat membantu permodalan, produksi, hingga pemasaran produk UMKM, serta mendukung UMKM naik kelas,” ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga berharap agar Pemerintah memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap proses digitalisasi UMKM. “Selama ini, UMKM hanya mengambil 10% ceruk pasar digital yang dikuasai oleh produk-produk asing. Pemerintah harus fokus dalam pengembangan digitalisasi UMKM sehingga UMKM dapat naik kelas, menyesuaikan dengan perkembangan digital, dan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas,” harapnya. □

Lestari Moerdijat

Waspada Penambahan Zona Merah di Luar Jawa

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta kesiapan Pemerintah Daerah di luar Jawa untuk menekan pertumbuhan zona merah.

PENINGKATAN jumlah zona merah penyebaran Covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali harus diwaspadai lewat kesiapan para pemangku kepentingan di daerah dan sejumlah fasilitas kesehatan beserta kelengkapannya.

“Kondisi sebaran zona merah Covid-19 di luar Jawa dan Bali harus segera disikapi dengan langkah nyata dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).

Catatan Satgas penanganan Covid-19 per Ahad (1/8) terjadi penambahan zona merah di tanah air menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota. Sepekan sebelumnya Ahad (25/7) zona merah tercatat di 32 provinsi dan 195 kabupaten/kota.

Meski dalam catatan tersebut jumlah zona merah tertinggi tercatat berturut-turut di Jawa Timur (32 kabupaten/kota) dan Jawa Tengah (27 kabupaten/kota) sebaran zona merah di luar Jawa dan Bali jauh lebih banyak.

Menurut Lestari, kondisi tersebut harus direspons dengan segera untuk memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah. Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi rencana pemerintah untuk mereplikasi penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 di Jawa-Bali untuk menekan pertumbuhan zona merah di luar Jawa-Bali.

Namun, ujar Rerie, harus diingat kondisi sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur di luar Jawa dan Bali sangat berbeda.

Sehingga, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kesiapan setiap daerah harus benar-benar rinci untuk menjalankan strategi yang serupa dengan provinsi-provinsi di Jawa-Bali.



Lestari Moerdijat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Upaya tersebut, ujarnya, untuk menghindari strategi yang direncanakan tidak bisa diterapkan karena terjadi kendala teknis yang tidak diantisipasi.

Jangan sampai, tegas Rerie, ketidaksiapan daerah di luar Jawa-Bali dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 menambah daftar jumlah kematian akibat virus corona, yang per Rabu (4/8) menembus 100 ribu orang.

Rerie berharap, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah benar-benar mampu berkolaborasi dengan baik, sehingga berbagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di tanah air bisa dilaksanakan sesuai rencana.

Dukungan masyarakat, tegas Rerie, dalam bentuk menjalankan protokol kesehatan di keseharian dan kesediaan divaksin akan sangat membantu langkah-langkah pengendalian penyebaran virus corona di tanah air.

Menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan serta bersedia

divaksin Covid-19, menurut Rerie, merupakan upaya anak bangsa ikut berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari ancaman Covid-19.

Redam Laju Kematian Akibat Covid-19

Pemahaman masyarakat terkait virus korona dan gejalanya harus terus ditingkatkan untuk menekan angka kematian akibat Covid-19 di tanah air.

“Berbagai upaya agar masyarakat benar-benar memahami virus korona dan gejalanya harus segera dilakukan untuk menekan angka kematian akibat Covid-19 yang terjadi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

Catatan Kementerian Kesehatan pada Senin (2/8), kasus meninggal bertambah 1.568 kasus. Dalam tiga hari terakhir kasus meninggal masih berada di kisaran 1.600-1.800-an. Sehingga secara total 97.291 orang meninggal dunia akibat Covid-19 di tanah air, sepanjang satu setengah tahun terakhir.

Dalam sesi jumpa pers yang disiarkan di

kanal *YouTube* Sekertariat Presiden, Senin (2/8), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, penyebab utama tingginya angka kematian akibat Covid-19 karena kebanyakan pasien datang ke rumah sakit pada kondisi sudah parah, sehingga terlambat ditangani.

Hal itu, jelas Budi, terjadi karena kurangnya edukasi masyarakat yang masih menganggap aib saat terkena Covid-19. Akibatnya, kalau ada anggota keluarga yang terkena, tidak segera menginformasikan kepada orang sekitar, sehingga menyebabkan terlambat datang ke rumah sakit.

Menurut Lestari, upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana bila terpapar Covid-19 harus segera dan mendesak dilakukan, untuk menekan angka kematian akibat virus korona di tanah air.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus benar-benar mampu memberikan sosialisasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan, agar pesan yang diharapkan sampai dan dipahami.



Budi Gunadi Sadikin

Tingkat pemahaman masyarakat yang baik tentang virus corona, jelas Rerie, akan sangat membantu dalam kerja-kerja pengendalian Covid-19 yang sedang dilakukan saat ini.

Bila pemahaman masyarakat tentang Covid-19 sangat baik, tambahnya, upaya testing dan tracing, serta penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19 akan jauh lebih mudah dilakukan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu

berharap, para pemangku kepentingan mampu menerapkan strategi yang tepat dalam menyebarluaskan pemahaman tentang Covid-19 kepada masyarakat.

Menurut Rerie, berbagai upaya bisa segera dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, sebagai misal dengan melibatkan aparat pemerintah hingga perangkat desa, RT, RW untuk berkomunikasi intens sampai lingkungan keluarga. Tentu saja langkah itu semua, tegas anggota DPR RI, Dapil II Jawa Tengah itu, harus didukung dengan komitmen bersama yang kuat dari para pemangku kepentingan, agar upaya tersebut bisa berjalan sesuai rencana.

Karena, tegasnya, tanpa semangat kebersamaan dalam mendukung sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan, upaya pengendalian Covid-19 di tanah air akan semakin sulit.

Rerie berharap, semangat masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pengendalian Covid-19 di tanah air tetap tinggi, setinggi semangat kemerdekaan yang digelorakan para pendiri bangsa ini pada 76 tahun silam. □



Webinar Urgensi Haluan Negara

PPHN Bintang
Penunjuk Arah Pembangunan
 Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menekankan hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan haluan agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai perspektif yang sama. Kesamaan pandangan ini penting, mengingat Indonesia dengan 270,2 juta penduduknya, memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang, baik latar belakang budaya, sosial, ekonomi, maupun pandangan politik.

“Indonesia tidak ubahnya seperti bahtera besar yang sedang berlayar di tengah samudera luas. Agar berhasil mencapai tujuan, diperlukan haluan sebagai peta jalan (road map), karena tidak mungkin nasib penumpang bahtera dipercayakan begitu saja, semata-mata pada intuisi seorang nakhoda. Atas dasar itulah MPR RI sedang menyelesaikan penyusunan draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang kelak dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan nasional,” ujar Bamsuet dalam Webinar ‘Urgensi Haluan Negara terhadap Proses Pembangunan Bangsa dan Negara dalam Jangka Panjang’, di Jakarta, Jumat (16/7/21).

Turut hadir para narasumber lainnya, antara lain Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsar, Pakar Hukum Tata negara Universitas Pattimura Jemmy Pietersz, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bina Nusantara Dr. Besar. Hadir pula jajaran

pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), antara lain Ketua Umum Fahmi Namakule, Sekjen Fajar Budiman, dan Bendahara Umum Dirar Refra.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dukungan agar MPR RI memiliki kewenangan menetapkan PPHN datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, serta Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS). Serta Organisasi Kemasyarakatan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu, serta perguruan tinggi di berbagai daerah, seperti di Bali, Riau dan Aceh.

Dukungan tersebut tidak lepas mengingat pasca amandemen keempat konstitusi, MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN. Fungsi GBHN digantikan dengan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Sementara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

“Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata menyisakan beragam persoalan. Selain



kecenderungan bersifat eksekutif sentris, juga memungkinkan RPJPN dilaksanakan tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Serta tidak sinerginya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah juga berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegasikan satu sama lain,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, agar MPR RI memiliki kewenangan menetapkan PPHN, terlebih dahulu harus dilakukan amandemen terbatas terhadap konstitusi. Khususnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Serta

penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

“Idealnya, substansi PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 50 bahkan 100 tahun yang akan datang. Mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Mampu memberikan arahan untuk menjawab tantangan Pembangunan Berkelanjutan. Serta mampu menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini me-

nambahkan, amandemen terbatas tersebut tidak akan membuka kotak pandora. Misalnya, menambah batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Maupun mengembalikan pemilihan presiden-wakil presiden kepada MPR RI. Karena Pasal 37 Konstitusi telah mengatur secara rigid dan tegas mengenai mekanisme usul perubahan Konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara serta merta.

“Amandemen harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan,” pungkas Bamsoet. □

Kuliah Umum di FH Unhas Makasar

Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN Bagi Pembangunan Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan, berdasarkan survei MPR masa jabatan 2014-2019, mayoritas publik menyambut positif wacana reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 'model GBHN'. Dorongan sangat kuat juga datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan, mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.

Gagasan tersebut juga telah direkomendasikan MPR periode 2009-2014. Kemudian ditindaklanjuti MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi, yaitu dengan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang dalam Rekomendasi MPR 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Aspirasi senada juga saya terima pada saat memenuhi undangan berbagai forum akademik yang diselenggarakan di beberapa

perguruan tinggi di Jakarta, Bali, Aceh, Riau, dan Surabaya. Alasan yang paling kuat, karena saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkesinambungan serta tidak memberikan peta arah dan haluan yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional," ujar Bamsoet saat mengisi materi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LK II) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, secara virtual dari Jakarta, Selasa (3/8/21).

Turut hadir jajaran civitas akademika Universitas Hasanuddin, antara lain Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni A.



Arsunan Arsin, Dekan Fakultas Hukum Farida Patittingi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Muhammad Hasrul, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Taufik Hidayat.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi negara, asas pokok penyelenggaraan pemerintahan adalah 'besturen is planen' atau memerintah adalah merencanakan. Menegaskan pentingnya makna sebuah perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Terlebih saat ini kita sudah menapakkan kaki pada tahap akhir periode pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Sudah saatnya kita melakukan kontemplasi dan evaluasi mengenai perencanaan pembangunan nasional ke depan, agar dapat membawa kemanfaatan dan berdampak nyata bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa adalah melalui Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

"Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," jelas Bamsuet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)



ini menerangkan, Pasal 37 Konstitusi mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.



"Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Seperti misalnya penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut," terang Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menggambarkan, secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. Hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang kreativitas bagi presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan, dan justru menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis.

"Idealnya, substansi PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun bahkan 100 tahun ke depan. Mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta mampu menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoeкономи global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia," pungkas Bamsuet. □

Pelantikan Pejabat di Lingkungan Setjen MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono melantik sekitar 18 pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan Setjen MPR. Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (21/7/2021), ini dihadiri oleh pejabat eselon II dan rohaniawan.

Dalam sambutannya usai pelantikan, Ma'ruf Cahyono mengingatkan agar semua pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR untuk selalu beradaptasi dalam lingkungan kerja. Salah satunya beradaptasi

dengan situasi pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia.

Selain itu, Ma'ruf Cahyono juga menegaskan agar amanah yang diberikan negara untuk menduduki jabatan harus dibarengi dengan kualitas kinerja yang jauh lebih baik, yang pada ujungnya adalah mencapai prestasi. "Ini harus dicamkan oleh para pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh sumpah yang telah diucapkan, menjalankan amanah secara baik," katanya. □

DER



Rakor Persiapan Sidang Tahunan MPR 2021



SEKRETARIAT Jenderal MPR, Selasa (3/8/2021), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sidang Tahunan MPR 2021. Hadir dalam rakor yang diselenggarakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V lantai 1, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, ini adalah para Kepala Biro beserta staf di lingkungan Setjen MPR.

Rakor diselenggarakan untuk lebih menguatkan lagi persiapan-persiapan momen besar kenegaraan setiap tahun. Apalagi saat ini

di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda bangsa dan negara Indonesia. Intinya, Sidang Tahunan MPR akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sidang Tahunan MPR adalah acara kenegaraan, rutin digelar MPR setiap tahun dengan agenda Pidato Presiden yang menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. □

DER



Apel Pagi di Lingkungan Setjen MPR

PANDEMI Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia sampai saat ini masih belum kunjung usai. Ganasnya sebaran virus membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 3-4 untuk meminimalisir sebaran virus dan korban.

Seluruh kegiatan masyarakat harus beradaptasi saat PPKM berlaku, termasuk kegiatan dan aktivitas di Setjen MPR RI. Sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) menjadi rutinitas.

Namun, walaupun di tengah situasi sulit ini, para pegawai di lingkungan Setjen MPR tetap menjalankannya dengan semangat. Ini terbukti, selama PPKM berlaku, setiap Senin pagi para pejabat dan staf yang mendapatkan giliran WFO tetap konsisten menggelar apel pagi.

Kegiatan Apel Pagi ini tentu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain menumbuhkan semangat, kegiatan rutin ini juga memupuk sinergitas dan menjaga kekompakan di lingkungan kerja. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Arzetty Bilbina, Anggota MPR Fraksi PKB

Tata Kelola Kesehatan Perlu Diperbaiki

PEMERINTAH menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali yang dimulai pada 2 Juli 2021. Pemerintah menerapkan PPKM Darurat ini ketika pandemi corona makin gawat. Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia mencetak rekor, dalam beberapa hari berada di kisaran 40.000 kasus per hari. Bahkan Indonesia pernah menduduki urutan pertama di dunia dalam jumlah harian kasus positif Covid-19. Begitu pula jumlah kematian, Indonesia mencatat rekor tertinggi, yaitu di atas 2.000 orang.

Indonesia menghadapi masalah paling krusial saat PPKM Darurat diberlakukan. Rumah Sakit penuh, oksigen habis, obat-obatan Covid langka, dan walaupun ada harganya mahal. Bagaimana tanggapan kalangan dewan terhadap melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia? Berikut pandangan anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzetty Bilbina, dalam wawancara kepada Majelis. Berikut petikan wawancara dengan anggota Komisi IX DPR yang

membidangi masalah kesehatan.

Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia selama penerapan PPKM Darurat sempat melonjak tinggi, bahkan mencapai rekor melebihi 40.000 kasus. Bagaimana Ibu melihat lonjakan kasus Covid-19 ini?

Memang benar, seharusnya lonjakan kasus positif Covid-19 ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam penanganan pandemi Covid-19, dan jangan sampai terulang kembali. *Testing* dan *tracing* harus diperkuat, begitu juga dengan *treatment*-nya. Varian Delta ini memang cukup ganas dan lebih cepat menular. Kita semua harus selalu waspada, berhati-hati dan berdisiplin menjalankan prokes.

Secara kebijakan, lonjakan kasus rata-rata 35.000 ke atas tentu membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Pemerintah harus menjalankan kebijakan secara tegas, konsisten, edukatif, dan lebih humanis. Di sisi lain, hampir kolapsnya rumah sakit karena ledakan kasus ini menunjukkan masih lemahnya dan

kurang memadainya fasilitas kesehatan kita.

Saya kira, Pemerintah perlu membenahi dan memperbaiki fasilitas kesehatan kita. Dari sisi anggaran, Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana, seperti saat pandemi sekarang ini. Pemerintah sebaiknya membuat *road map* jangka panjang yang jelas dan berkelanjutan dalam penanganan pandemi agar lebih siap menghadapi ledakan kasus atau gelombang selanjutnya.

Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia?

Saya pikir penyebabnya sangat kompleks. Sejak ada varian Delta seharusnya pemerintah lebih *aware* dan lebih waspada. Kita tahu, masih banyak sisi lemah pemerintah. Misalnya, soal pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia. WNA yang masuk harusnya diatur lebih selektif dan ketat lagi untuk mengantisipasi penyebaran varian baru, seperti kasus varian Delta.

Dalam hal prokes, memang masih menjadi catatan kita karena banyak yang melanggar. Misalnya, kebijakan WFH bagi karyawan

perusahaan non-esensial dan kritikal. Masih saja banyak yang melanggar. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan satu faktor saja yang menjadi penyebab lonjakan kasus kemarin. Banyak indikator yang perlu kita sikapi dengan lebih bijak. Dari situ, intervensi kebijakan yang efektif, efisien, edukatif, dan humanis menjadi salah satu kuncinya.

Dalam penegakan hukum, aparaturnya terkadang bertindak represif selama PPKM Darurat. Apa pendapat Ibu?

Kita tidak bisa menafikan memang masih banyak terjadi pelanggaran Prokes. Banyak yang melanggar dan tidak patuh. Kita bisa saja kesal dan marah kepada mereka yang melanggar. Tapi menurut saya, edukasi dan sosialisasi menjadi hal penting, selain intervensi kebijakan. Di samping itu, penting juga untuk kita pikirkan bagi saudara kita yang kurang mampu. Alih alih untuk membeli masker, buat makan saja masih sangat susah. Ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah agar bantuan sosial tepat sasaran.

Inilah yang selalu menjadi problem yang dilematis ketika kebijakan diimplementasikan di lapangan. Kalau tidak tegas atau represif mereka tetap melanggar dan tidak jera. Ada kondisi objektif yang memaksa aparaturnya di lapangan berbuat represif. Namun, saya lebih menyarankan agar aparaturnya di lapangan lebih menekankan cara-cara yang edukatif dan humanistik, bukan dengan jalan yang represif.

Bagaimana Ibu melihat kebijakan PPKM Darurat itu sendiri, apakah efektif?

Dari sisi efektivitas, saya kira belum maksimal. Kebijakan ini belum mampu menekan lonjakan kasus dan penyebaran yang masih tinggi. Bahkan *fatality rate* kita juga sangat tinggi. Namun, saya juga mengapresiasi kebijakan ini karena berhasil menekan mobilitas penduduk dan beban rumah sakit semakin berkurang. Minimal, dengan penerapan PPKM ini Kemenkes dapat bekerja maksimal untuk penyembuhan yang sakit, dan memperkuat *testing* dan *tracing*.

Di sisi lain, pemerintah seperti tidak siap menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19. Kamar di rumah sakit penuh, persediaan oksigen kosong, obat-obatan untuk Covid-19 langka dan

kalaupun ada harganya melonjak. Banyak pasien yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah, dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat fenomena itu?

Saya pikir pemerintah memang kurang siap dalam menghadapi lonjakan kasus dan semakin menyebarnya varian Delta. Yang terpenting, kita harus menarik pembelajaran dari pengalaman kemarin. Sistem kesehatan kita harus segera diperbaiki agar kuat dan kokoh ketika menghadapi pandemi dan krisis kesehatan. Singkat kata, tata kelola kesehatan kita harus mampu menjawab perkembangan zaman.



Menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan berbagai masalah yang menyertainya diperlukan adanya kesolidan, kerjasama, dan gotong royong di antara semua elemen bangsa. Bagaimana pendapat Ibu?

Penanganan pandemi memang harus melibatkan semua *stakeholder* (*multi stakeholders*). Mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Mulai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya. Kerjasama harus dibangun secara gotong royong semua komponen bangsa dan negara. Soliditas dan solidaritas sesama harus terus dipupuk sembari menyebarkan energi positif tanpa memandang sekat-sekat suku, agama, ras,

kelompok atau golongan. Ini adalah bencana bagi kemanusiaan. Jadi, semuanya harus bahu-membahu menyelesaikan persoalan.

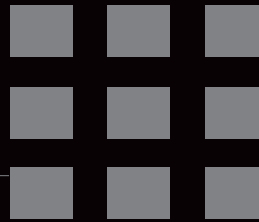
Nilai kerjasama dan gotong royong ini dapat dimulai dengan membangun kepercayaan antar *stakeholder* dan tanpa lelah terus melakukan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi agar tercipta kesepahaman bersama. Evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memperbaiki segala kelemahan agar penanganan lebih komprehensif dan humanistik. Sinergitas secara kelembagaan antara K/L harus terus diperbaiki agar tidak terjadi ketumpang-tindihan dan ego sektoral.

Jangan lagi menyebarkan berita menyesatkan (*hoax*) yang semakin memperumit persoalan. Teman-teman di media misalnya, bisa menyampaikan berita-berita atau informasi yang positif dan konstruktif. Kritik, saran, masukan dan ataupun gagasan yang konstruktif dan solutif sangat diperlukan dalam penanganan pandemi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengacaukan dan membuat panik masyarakat, serta memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi atau golongan di tengah pandemi. Tak ada gunanya lagi mengutuk, mencemooh ataupun mengolok-ngolok keadaan. Lebih baik, energi kita arahkan ke hal-hal yang positif dalam membangun optimisme agar pandemi segera berakhir.

Terkait dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, bagaimana memaknai hari kemerdekaan itu dengan perjuangan menghadapi pandemi Covid-19?

Sebagai warganegara, kita semua perlu optimistis bahwa kita dapat bersama melawati bencana ini dan terus menatap masa depan dengan lebih baik. Perbaikan fasilitas kesehatan harus dilakukan terus-menerus. Tata kelola kesehatan kita harus diperbaiki agar kokoh dalam menghadapi krisis dan pandemi. Selain itu, sistem pemberian bantuan juga harus diperbaiki agar merata dan tepat sasaran.

Kita bertambah usia sebagai bangsa dan negara pada 17 Agustus, dan semoga bertambah pula semangat kebersamaan, serta semakin bertanggung jawab sesuai peran kita masing-masing. Pengabdian itu tiada akhir untuk masyarakat, bangsa dan negara sebelum maut menjemput kita. □



Takut Jarum

Suntik?...



Arya Saloka

ARYA Saloka, aktor pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta yang sangat booming akhir-akhir ini ternyata phobia atau takut jarum suntik. Ini terlihat saat mengikuti program vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

“Terus terang deg-degan sama kalian (wartawan), bukan sama jarum suntik,” candanya. Arya memilih metode drive thru saat menerima vaksinasi dosis kedua. Begitu vaksinator datang untuk

Judika

memberikan suntikan, Arya langsung menaikkan masker hitamnya sampai menutupi kedua matanya.

Hal sama juga diakui artis penyanyi **Judika**. Ia mengaku, takut jarum suntik. “Karena aku takut disuntik, aku mesti ada cara untuk menyamankan diri sebelum diinjeksi, dengan melakukan peregangannya tubuh agar lebih rileks untuk meminimalisir rasa takut,” katanya. □

DER

Gelar *Vaksinasi Gratis* untuk Masyarakat

DESAINER dan entertainer kondang **Ivan Gunawan** gelar acara vaksinasi Covid-19 massal gratis untuk masyarakat di seputar Kelurahan Tanah Sereal, Jakarta Barat, Sabtu (31/7/2021). Acara bertajuk: 'Vaksinasi Gratis Bersama Ivan Gunawan,' dilakukannya sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat dan dukungannya pada program pemerintah..

"Ini aksi nyata saya, daripada ngeluh sama keadaan terus mending berbuat yang bermanfaat untuk semua yee kaaan," katanya. Ivan memastikan, kegiatannya ini aman. "Aman disini kan ada screening dokter, kayak ada sakit gula bisa apa enggak. Intinya, semuanya sesuai prosedur, dibuat aman untuk masyarakat," jelasnya

Aksi nyata selebritas keturunan Jawa, Tionghoa, dan Belanda ini, selain mendapatkan dukungan dari rekan sesama artis, juga mendapatkan apresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ivan Gunawan



Rantry Maria

Stop Covid Yuk Vaksin....

HINGAR bingar pentingnya vaksinasi Covid-19 yang digaungkan pemerintah, disambut antusias berbagai kalangan, termasuk **Rantry Maria**. Selebritas cantik yang bernama lengkap Rantry Maria Aprily Lee Kariso ini bersama anggota keluarganya, baru-baru ini, menyambangi Puskesmas tak jauh dari rumahnya, di daerah Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Hari itu, Rantry bersama anggota keluarganya datang ke Puskesmas untuk divaksinasi. Sesuai prosedur, ia pun divaksinasi setelah ikut antri bersama warga masyarakat lainnya.

Usai vaksin, peraih penghargaan *Indonesian Drama Series Awards 2021* ini menceritakan pengalamannya di akun Instagram pribadinya. "Just got our first dose of Covid-19 vaccine," cuitnya. "Habis divaksin sinovac. Agak perih ya, pegel juga pegangin kapasnya," tambahnya.

"Vaksin penting lo, yuk kita vaksin," ajak Rantry. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ananda Omesh Mobil Darurat bagi Para Penyintas Covid

PANDEMI Covid-19 telah memasuki tahun kedua. Selama 18 bulan terakhir, virus asal Wuhan, Tiongkok, itu telah memakan banyak korban. Selama bulan Juli 2021 peningkatan jumlah korban akibat Covid-19 mencapai angka yang sangat mengagetkan. Ini terjadi setelah ditemukan-nya varian baru, Delta.

Selama dua bulan terakhir virus Corona menyebabkan banyak anak-anak menjadi yatim piatu. Banyak tenaga kesehatan terpapar covid dalam menjalankan tugas kemanusiaan, menolong para penderita corona. Harga obat-obatan melonjak naik sangat tinggi, bahkan beberapa jenis obat menghilang dari pasaran. Tabung oksigen menjadi barang langka. Rumah sakit mengalami overload, banyak pasien di rawat di tenda-tenda dan selasar rumah sakit.

Selain menimbulkan banyak korban, Covid juga sudah membangkitkan kembali jati diri bangsa Indonesia yang suka tolong-menolong dan gotong royong. Berbagai bentuk dan rupa gotong royong muncul selama berlangsungnya pandemi Covid-19. Salah satunya seperti ditunjukkan Ananda

Rusdiana, S.I.Kom (35).

Omesh, nama tenar dari Ananda Rusdiana, dikenal sebagai seorang presenter dan pelawak. Ia dikenal luas berkat perannya



Ananda Rusdiana

pada acara varietas Extravaganza, serta sebagai pemandu beberapa acara di televisi, seperti Acara 60 Minutes, Insert Pagi, Indonesia Mencari Bakat, dan Celebrity Lipsync

Battle Indonesia.

Ketika kasus penularan virus Covid-19 meningkat tajam Omesh merelakan salah satu mobil kesayangannya dijadikan ambulans dadakan atau disebut Mobil Darurat Padodi. Mobil ini digunakan untuk membantu mengevakuasi pasien Covid-19 yang membutuhkan pertolongan menuju rumah sakit.

Mobil darurat yang digunakan oleh Omesh adalah Mercedes-Benz Vito. Sebuah van atau MPV yang tidak kalah mentereng dibandingkan dengan Toyota Alphard. Berbekal mesin 4 silinder inline kapasitas 2000 cc, mobil darurat ini diharapkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mondar-mandir di jalanan Jakarta. Dan, memberikan kenyamanan buat penumpangnya.

Nama Padodi yang menempel pada Mobil Darurat milik Omesh diambil dari mendiang ayahnya. Karena sang ayah telah mengajarkan berbagai kebaikan kepada anak-anaknya, yaitu berbuat baik bagi sesama, juga untuk lingkungan sekitarnya.

“Beliau adalah teladan yang memberi contoh bagaimana berbuat baik. Itu bukan



hal asing bagi orang-orang yang kenal dan dekat dengan beliau. Padodi sendiri memiliki arti harapan, doa, dan dedikasi,” kata Ananda Omesh beberapa waktu lalu.

Mobil Darurat Padodi ini sudah didesain ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana layaknya ambulance. Di dalamnya terdapat kursi dorong, tempat tidur, tabung oksigen, dan tempat duduk bagi pendamping. Tetapi, dari luar, penampilannya tidak seseram sebagaimana kebanyakan mobil ambulance. Terlebih karena stiker yang menempel di bodi mobil tersebut tampak unik dan lucu.

Stiker karya Riyan Riyadi, pencipta karakter The Popo, tampak humanis. Stiker didesain hingga berbentuk sosok yang tengah menjangkit virus Covid-19. Namun, untuk memudahkan pergerakan menuju rumah sakit yang dituju, mobil darurat ini tetap dilengkapi dengan lampu dan sirine, sebagaimana lazimnya mobil ambulance.

Mobil Darurat Padodi milik Omesh ini bisa diorder selama 24 jam. Caranya bisa disimak melalui akun instagram @mobildaruratpadodi, dan pemesanan melalui nomor Whatsapp. Selanjutnya, pasien akan dibawa ke rumah sakit tujuan oleh dua orang relawan di bawah pantauan dokter melalui telepon.

Sesampainya di rumah sakit atau untuk



tujuan lain, mobil darurat Padodi akan menunggu selama satu jam, untuk memastikan bahwa pasien sudah diterima dengan baik.

“Bagi yang membutuhkan mobil darurat ini kami hanya bisa mengantarkan pasien dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi kritis. Karena mobil ini bukan ambulans, ini mobil darurat,” jelas Omesh.

Supir Ambulance

Aktivitas Omesh menyediakan mobil darurat bagi penyintas Covid-19 berawal dari seseorang yang mengaku mau jadi relawan supir ambulance. Kemauan itu

dibuatkan video, lalu diunggah di Instagram dan menandai Ananda Omesh.

Mendapat tautan tersebut, Omesh pun merespon. Ia menanyakan keseriusannya menjadi relawan supir ambulance bagi masyarakat yang terpapar Corona. Setelah yakin, Ananda Omesh kemudian menawarkan mobil Mercedes-Benz Vito-nya. Selanjutnya, ia langsung menyulap mobil tersebut menjadi ambulans darurat.

Sejak rencana mengubah mobilnya menjadi ambulance, Omesh banyak mendapat support dari berbagai kalangan. Bahkan, banyak pihak yang ingin membantu mencari kebutuhan alat medis untuk perlengkapan ambulans darurat itu.

“Alhamdulillah banyak banget yang DM (Direct Message) dan japri, karena saya nggak ada link mencari alat kesehatan, dan saya nggak tahu kemana nyari perlengkapan ambulance. Ya, saya lempar aja ke sosmed dan alhamdulillah banyak yang bantuin,” ungkap Ananda Omesh.

Omesh berharap, niat baiknya membantu masyarakat bisa benar-benar bermanfaat. Apalagi, ia pernah merasakan sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan alat kesehatan di situasi darurat pandemi seperti sekarang ini. □

MBO

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

Jejak Santriwati Menapaki *Tangga Politik*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DELAPANBELAS bulan sudah, virus Covid-19 merenggut kedamaian bangsa Indonesia. Seperti bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat Indonesia merasakan dampak yang signifikan akibat penularan virus corona. Tiap hari ada saja yang terpapar dan meninggal karena corona virus disease (covid). Dan, saban hari pula muncul berita baik, banyak pasien sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarganya.

Laksana deburan ombak di laut, media sosial mainstream pun ikut merespon perkembangan Covid penuh antusias. Baik medsos maupun media mainstream terus mengabarkan berita tentang pandemi Covid-19. Sehingga praktis, seluruh masyarakat sudah mengetahui bahaya dan cara penanganan virus ini.

Sayang, masih banyak warga masyarakat yang belum mematuhi cara-cara pencegahan penularan Covid. Bahkan, banyak juga yang mengalami gejala terpapar corona tetapi tidak melakukan isolasi mandiri maupun berobat ke Puskesmas. Lebih disayangkan lagi, mereka yang terindikasi terinfeksi Covid-19 itu tetap berkumpul dengan orang lain dan melakukan aktivitas tanpa memakai masker.

Kondisi itu disampaikan Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, kata Neng Eem, terpapar Covid-19 adalah kabar yang sangat menakutkan. Mereka takut jika terpapar maka harus diisolasi. Tinggal jauh dari keluarga dan sanak saudara. Jika meninggal, jenasanya tidak bisa dimakamkan sebagaimana biasa. Tidak bisa dimandikan, dikafani dan disalatkan oleh sanak saudara. Dan, harus dimakamkan sesuai

penanganan jenazah Covid-19.

“Perlakuan terhadap para penyintas Covid itu jadi alasan munculnya ketakutan tersendiri. Dan, itu membuat warga masyarakat desa tidak mau terbuka jika terpapar virus corona. Mereka juga tidak mau pergi ke dokter karena khawatir divonis terkena Covid,” kata Neng Eem kepada *Majelis* beberapa waktu lalu.

Hal ini kian mengkhawatirkan, lantaran kesadaran masyarakat desa untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter sangat kecil. Tidak seperti masyarakat perkotaan yang segera periksa ke dokter saat merasa kurang enak badan. Karena enggan periksa ke dokter itulah yang membuat keberadaan virus corona tidak gampang diketahui.

Yang tak kalah penting dan harus diperhatikan terkait efek pandemi Covid-19 terhadap masyarakat desa, kata Eem Marhamah, adalah masalah ekonomi. Pasalnya, ekonomi di desa terpengaruh signifikan sejak terjadi pandemi. Sehingga penanganan Covid di daerah pedesaan menimbulkan simalakama, akankah mati lantaran terpapar corona atau mati kelaparan karena tidak bekerja dan berpenghasilan.

“Lebih bijaksana tidak melarang masyarakat desa pergi ke sawah atau pedagang pergi ke pasar selama mereka disiplin menjalankan 5 M. Apalagi bila tidak memberi jalan keluar bagaimana cara menghindari kelaparan,” kata Neng Eem.

Sebelah Mata

Sebagai politikus Senayan, Neng Eem adalah satu dari sedikit Anggota DPR yang memulai kiprahnya di ranah politik dengan menjadi Tenaga Ahli. Karena itu, saat mengikuti kontestasi Pileg 2014 banyak





di antara kawan dan lawan politik memandang sebelah mata. Ia dianggap sebagai caleg yang hanya modal dengkul, kere, dan tidak punya duit.

Mendapat ejekan seperti itu, Neng Eem bergeming. Ia terus menjalankan silaturahmi dengan kelompok masyarakat yang belum tersentuh kandidat manapun. Selama lima bulan berturut-turut perempuan kelahiran *Cianjur*, 8 Mei 1979, ini melakukan silaturahmi dengan masyarakat.

“Tidak semua warga mata duitan, meski mereka butuh duit. Masih banyak yang menerima saya dengan baik bahkan memberi jamuan, padahal saya tidak membawa uang. Kepada mereka yang belum tersentuh caleg lain, saya sampaikan keinginan hati menjadi anggota DPR RI. Kalau pun tidak bisa mendukung, minimal mendoakan agar saya diberi kemudahan,” tutur Neng Eem mengisahkan salah satu babakannya dalam Pileg 2014.

Eem paham, keberhasilan yang didapat tidak diperoleh secara kebetulan. Karena keberhasilan hanya bisa diraih dengan kerja keras, pantang menyerah, berdoa, dan berani. Termasuk berani menghadapi lawan-lawan politik yang lebih kuat dan lebih besar dari dirinya sendiri.

“Tahun pertama menjadi anggota dewan, uang saya habis diperuntukkan memenuhi janji-janji kepada tim sukses. Saya juga harus membayar hutang-hutang yang harus saya pikul untuk kelancaran kampanye,” ungkap Neng Eem lagi.

Itulah secuil proses yang mengiringi keberhasilan seorang Neng Eem Marhamah, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI. Neng Eem sendiri merupakan seorang perempuan dengan tradisi pondok pesantren yang sangat kuat. Pelajaran dan nilai-nilai salafiah menjadi bagian dari hidupnya sejak lahir hingga besar.

Neng Eem lahir di sebuah desa terpencil di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ayahnya adalah KH. Hizbullah Manshur, sosok seorang “kiai kampung.” Suami dari Hj. Umi Ronasih ini juga dikenal sebagai pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Cibadak. Nama Cibadak diambil dari nama kampung tempat pesantren itu berada.

Sewaktu kecil, Neng Eem mengikuti peraturan yang super ketat

dari ayah, sekaligus gurunya. Sama seperti tujuh saudaranya yang lain, Eem harus belajar ilmu agama sedari kecil. Ia juga wajib mempelajari kitab-kitab kuning. Neng Eem pun sempat hafal beberapa kitab kuning yang memang lumrah dipelajari di pesantren. Seperti *Jurumiya*, *Tijanah*, dan *Safinah*.

Nasi Berkat

Sejak kecil Neng Eem terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Makan dengan lauk seadanya sudah menjadi makanan keseharian. Sementara makan dengan lauk daging, telur, dan ikan, hanya diperoleh saat ayahnya pulang dari hajatan dengan membawa “besek” berupa nasi berkat.



“Beliau kiai, jadi kalau ada hajatan, seperti selamatan atau nikahan, pulangny dikasih nasi berkat dalam jumlah yang lebih banyak. Baru pada saat itu kami, anak-anaknya, bisa menikmati makan enak,” cerita istri dari Muhammad Suryanata Putra itu.

Sebagai orangtua yang taat memegang nilai-nilai agama, ayah Eem mempercayakan pendidikan anak-anaknya hanya kepada pondok pesantren. Alasannya, karena sekolah umum tidak menjamin akhlak seseorang menjadi baik. Selain itu, pendidikan di pesantren dinilai lebih murah dibanding sekolah umum. Karena itu, semua anaknya, tak terkecuali Neng Eem, mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Padahal, saat itu Eem ingin mengenyam pendidikan di sekolah umum. Ia iri melihat teman-teman sebayanya bergembira menimba pendidikan di sekolah umum. Karena itu, tanpa sepengetahuan orangtuanya, Neng Eem mendaftarkan diri di sekolah umum. Tetapi karena keterbatasan biaya, akhirnya kandas di tengah jalan.

Kesempatan untuk belajar di sekolah umum dia peroleh saat Neng Eem dikirim ke Jawa Timur. Sembari belajar di pondok, Eem menimba ilmu di jurusan IPS Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kandangan Kediri. Setelah lulus MAN, Eem kuliah di jurusan Tafsir Hadits STAIN Kediri Jawa Timur.

Kesempatan belajar di luar pondok dimanfaatkan secara maksimal. Saat masih duduk di MAN Kandangan Kediri, ia menjadi pengurus OSIS. Sedangkan saat kuliah STAIN Kediri, ia menjabat sebagai ketua MPM-REMA STAIN atau Ketua MPR-nya mahasiswa. Selain itu, ia juga menjadi Ketua PC PMII Kediri.

Kiprahnya di PMII berlanjut hingga ia didaulat menjadi Pengurus Besar (PB) PMII sampai akhirnya menjadi Ketua Umum PB PMII KOPRI. Sejak itu, Eem mondar mandir di berbagai organisasi. Mulai dari KOWANI, PP, Muslimat NU, hingga Wakil Bendahara Umum DPP PKB.

Politik Kebangsaan

Sejak meninggalkan Cianjur untuk kemudian pindah ke Kediri, dan seterusnya ke Jakarta, kehidupan Eeng senantiasa dinaungi berbagai kesuksesan. Selepas dari PMII misalnya, ia menjadi Tenaga Ahli (TA) di Fraksi PKB DPR RI. Lima tahun menjadi TA,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tepatnya 2014, Ibu dua anak ini mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Di luar dugaan, dalam kontestasi pemilihan umum legislatif (Pileg) pada 2014 itu, Neng Eem terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Jabar III.

Tidak cukup sampai di situ, sejak awal 2018, Eem dipercaya partainya menjadi Sekretaris Fraksi PKB di MPR RI. Baginya, jabatan tersebut adalah sebuah kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja. Terutama, ikut melaksanakan kerja MPR yang selalu mengedepankan politik kebangsaan.

“Sebagai sekretaris, saya merasa harus menjawab semua persoalan itu agar tidak berkembang, dan semakin merugikan bangsa dan negara. Karena itu, saya harus mengumandangkan kembali cita-cita para ulama pendiri PKB. Yaitu, toleransi dan menjunjung tinggi kebhinnekaan, menebar kedamaian dengan Politik Kebangsaan Riang Gembira,” ujar Neng Eem. □

MBO



Pemahaman Kolektif Pancasila

SEBAGAI dasar negara, Pancasila cukup dikenal masyarakat lewat pelajaran saat di bangku sekolah. Namun, mengenal saja tidak cukup untuk mengaktivasi nilai-nilai yang dikandungnya agar Pancasila sebagai ideologi bangsa benar-benar bisa berperan dalam menjalankan praktik bernegara, perlu pemahaman bersama.

Pemahaman, proses mengetahui yang terjadi melalui pembelajaran, observasi, analisa, implementasi, anomali, pengujian ilmiah dan paradigma baru adalah rangkaian epistemik sekaligus dinamika sosial. Artinya, seluruh proses memahami dilakukan bersama dengan yang lain. Ada subyek yang memahami dan obyek yang dipahami.

Pancasila dalam konteks ini adalah obyek pengetahuan, pemahaman. Rasa-rasanya bangsa Indonesia belum lelah berhadapan dengan pragmatisme individu maupun kelompok, ideologi transnasional, konservatisme, tradisi memuji dinamika beragama tanpa kritik dan dikotomi antarsuku. Pijakan utama bahwa urusan publik adalah yang pertama ketimbang urusan privat menguap dalam tantangan yang dibiarkan bertumbuh. Akibatnya, siklus sosial dan politik hanya berputar pada upaya menyematkan kembali nasionalisme, membangkitkan memori komunal tentang heroisme dan patriotisme para pejuang. Banyak masalah kebangsaan seperti terorisme, rasisme, korupsi, konflik bersenjata juga dinamika kebijakan menjadi konsumsi biasa di kehidupan generasi muda.

Memori dan pemahaman tentang Pancasila masih bersifat individu, tanpa dimensi kolektif di dalamnya. Kata "individu" tidak *per se*, tetapi bias komunal homogen seperti se-suku, se-agama, se-kelompok, se-ideologi. Masing-masing memiliki "kuasa hermeneutika" Pancasila.

Sebuah pertanyaan reflektif, mengapa tidak mengedepankan sebuah identitas kolektif "Indonesia" yang dijiwai Pancasila dalam seluruh proses mengetahui? Nyatanya, membentuk identitas ke-Indonesia-an tak semudah pemikiran dan debat intelektual para pendiri bangsa. Sebab kultur dialog mudah dikikis monolog altar tanpa mengetahui dinamika pasar. Atau dinamika pasar diolah

sedemikian menakutkan dengan pengukuhan persepsi demi kehidupan nanti. Manusia Indonesia teralienasi dari kultur kebinekaan.

Pancasila dan Tantangan-Tantangan

Lima dasar yang diungkapkan Presiden Soekarno kemudian menjadi Pancasila bukan proses sekali jadi. Perdebatan diskursus mewarnai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. *Pertama*, Hatta mengusung paham liberalisme sebagai basis ideologis bangsa Indonesia dan berhasil memasukkan ide kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat ke dalam konstitusi NKRI, sementara Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik karena integralisme dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yakni asas gotong-royong dan kekeluargaan.

Kedua, perdebatan antara Soekarno dan Mohammad Natsir tentang relasi antara agama dan negara. Soekarno merupakan representasi dari kelompok nasionalis sekuler yang memperjuangkan pemisahan tegas antara negara dan agama. Mohammad Natsir menyuarakan aspirasi golongan nasionalis islami yang menghendaki pertautan yang erat antara agama dan negara, sebab agama tidak hanya mengatur relasi antara manusia dan Tuhan, tapi juga manusia dan manusia dalam sebuah tatanan politik.

Perdebatan politik dan intelektual yang didasari latar belakang pemikiran abad pertengahan dan dinamika sosial internal ini telah melahirkan Pancasila. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan identitas kolektif yang terbukti mampu menyatukan kebinnekaan bangsa Indonesia.

Dari lima sila, diturunkan butir-butir nilai eksplisit manifesto tumbuh kembang manusia Indonesia. Sudah final. Generasi sesudah periode kemerdekaan menjadi duta untuk menanamkan benih nilai Pancasila sebagai pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan generasi saat ini, di era disrupsi yang menyajikan fakta beragam, yakni distorsi informasi, dinamika *post-truth* yang melanggengkan *hoax*, ideologi transnasional yang terus menguliti kultur keragaman dengan dalih agama (baca: khilafah dan sejenisnya), serta sentimen sosial terkait identitas budaya dan daerah yang memudahkan terciptanya dikotomi dan rentan konflik.

Oleh:
Lestari Moerdijat, SS., MM.
Wakil Ketua MPR RI



Dalam kondisi pelik ini Pancasila mesti menjadi konektor budaya. *Bridging the cultures.*

Jalan menuju keterhubungan antarbudaya menjadi tugas generasi muda sebagai *enforcer* sekaligus pionir perubahan. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan para pemimpin di masa depan, *emerging learders*. Kompetensi intelektual dan keterampilan dibentuk melalui proses pendampingan dengan mengedepankan keragaman kultur, bersinergi satu sama lain, menanamkan nilai Pancasila sejak dini menjadi bekal merawat kebinekaan.

Seluruh pedoman, panduan dan norma sudah selesai sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi kehidupan berbangsa. Meramunya dalam kebijakan adalah tugas pemerintah, termasuk menetapkan model pendidikan untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila. *Generasi baby boomer* dan *Gen X* melewati fase pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Penataran P4 yang memungkinkan mereka memahami Pancasila dan butir-butirnya. *Gen Y* atau *millennials* mengalami transisi dari PMP dan PSPB ke Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Gen Y* mendapatkan pengetahuan dari membaca dan pertumbuhan mereka diwarnai resesi hebat, tak jarang generasi ini dipandang sebagai generasi yang cenderung mengedepankan ego.

Gen Z sebagai masa depan ekonomi global mendapatkan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). *Gen Z* percaya pada keragaman, kesetaraan, dan nondiskriminasi, tidak hanya dalam masyarakat, karena materi pembelajaran kewarwanegaraan menyentuh aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebagai bagian dari masyarakat digital, aktualisasi diri *Gen Z* adalah prioritas tinggi. Bonus demografi di tahun 2045 ditentukan sejak saat ini melalui penanaman nilai-nilai luhur Pancasila.

Pancasila: Identitas Kolektif

Polleta dan Jasper (2001) mendefinisikan identitas kolektif sebagai koneksi kognitif, moral, dan emosional individu dengan komunitas, kategori, praktik, atau institusi yang lebih luas. Identitas kolektif suatu kelompok sering diekspresikan melalui budaya dan tradisi kelompok,

termasuk warisan nilai. Identitas kolektif Indonesia mesti dijiwai oleh Pancasila.

Tak dapat ditolak bahwa setiap generasi berada dalam paradoks utopia dan distopia. Mendambakan masyarakat utopis ketimbang distopia dengan dehumanisasi. Untuk mencapai masyarakat yang ideal sesuai cita-cita pendiri, terkesan khayalan tetapi mungkin dengan tapak awal ingatan atau koneksi kognitif, pengetahuan, intensi, moral, mental dan tanggung jawab kolektif tentang Pancasila yang berujung pada tingkah laku kolektif.

Semua dimulai dari setiap individu yang bertanggung jawab sebagai agen Pancasila. Dalam ranah komunitas atau kelompok, gagasan tanggungjawab kolektif menjadi tameng berhadapan dengan ragam kontroversi sosial melalui tujuan (intensi), tindakan dan solidaritas bersama di atas fondasi kebangsaan.

Identitas kolektif mengetengahkan filosofi Pancasila sebagai cara hidup berbangsa. Castells (2007) dalam *The Power of Identity* menjelaskan, karakter identitas kolektif dengan berbagai manifestasi. Seiring dengan revolusi industri, transformasi kapitalisme, dan matinya statisme, manusia memasuki kuartal terakhir abad XX. Sebuah gelombang luas dari ekspresi identitas kolektif yang ditantang globalisasi dan mengedepankan kosmopolitanisme atas nama singularitas budaya.

Dalam tantangan globalisasi dan kosmopolitanisme, manusia terhubung tanpa sekat dan mungkin saja muncul kultur idola pada cara pandang terhadap budaya lain. Pijakan atas sebuah identitas mesti diperkuat di atas basis kognitif dan moral. Walaupun manusia memiliki kontrol atas kehidupan dan lingkungannya, bukan tidak mungkin keterbukaan informasi dapat meluluhkan nilai luhur Pancasila.

Pembelajaran untuk pemahaman secara menyeluruh perlu dilakukan sejak dini, kendati *Gen Z* memiliki karakter kedermawanan dan solidaritas yang kuat, fondasi kebangsaan mesti dipugar kembali. Ditanamkan dengan menyesuaikan realita hari ini menggunakan teknologi informasi untuk membentuk identitas dan spiritualitas kolektif sampai akhirnya memori dan pemahaman tentang Pancasila menjadi roh dan jiwa Indonesia. □

Tak Ada Pemisahan Antara Agama dan Negara

Ulama dan cendekiawan muslim terdahulu menegaskan tak ada pemisahan antara agama dan negara. Politik dalam Islam merupakan kegiatan untuk melaksanakan syariat Allah melalui sistem dan pemerintahan, dengan catatan bukan untuk melegalformalkan Islam.

MERUPAKAN kebanggaan tersendiri ketika buku yang ditulis oleh Wakil Ketua MPR, Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., diberi kata pengantar oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar MSI. Mengapa? Sebab Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merupakan posisi tertinggi di hierarkis PKB. Sedangkan Jazilul Fawaid adalah salah satu anggota dari partai itu. Buku dengan pengantar Muhaimin Iskandar itu berjudul: *Bahasa Politik AL-Qur'an, Konsep dan Aktualisasinya dalam Sejarah*.

Jazilul Fawaid, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu mengupas tema yang disuguhkan dalam 3 bab, sebelumnya dan sesudahnya ada *pengantar, prolog, epilog, daftar pustaka, dan biografi*. Total halaman XVI + 292 lembar.

Dalam *Bab 1* menjelaskan mengenai *Bahasa Arab*. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Alqur'an. Dengan pilihan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding bahasa yang lain. Bahasa Arab merupakan salah satu rumpun bahasa Semit. Rumpun-rumpun bahasa yang ada dalam Semit adalah: bahasa *Babilonia, Asyuria, Aramy, Ibrani, Yaman Lama, Habsyi Semit, dan Arab*. Dari rumpun yang ada, *Babilonia, Asyuria, Aramy*, dan sebagian *Yaman Lama*. Sementara bahasa Arab saat ini masih menonjol dan tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, bahkan saat ini merupakan salah satu bahasa internasional, selain Inggris, Perancis, dan Jerman. Hal demikianlah yang membuat bahasa Arab memiliki keunggulan dibanding bahasa Semit lainnya.

Dari penjelasan ini sangat menarik bila dikaitkan dengan *prolog* yang disajikan oleh Jazilul Fawaid. Dikatakan dalam *prolog*-nya, para ulama sepakat bahwa Alqur'an adalah *Kalamullah* yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Karena yang menjadi penerima dan objek sosiologi historiknya adalah bangsa Arab maka wajar bila wujud *Kalamullah* itu berbahasa Arab, seperti Injil yang berbahasa Ibrani.

Dari sinilah Alqur'an dan bahasa Arab ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam Islam, bahasa Arab dimuliakan bukan sebagai

bahasa kultural dan ilmiah, melainkan dianggap suci karena ia menjadi bagian integral dari Alqur'an yang bunyi dan pengucapannya memegang peranan penting dalam ritus-ritus keagamaan Islam.

Selanjut dipaparkan, jika menganut pandangan bahwa Islam adalah *din wa siyasah* (agama dan politik) maka pada dasarnya tidak terdapat pemisahan antara bahasa agama dan bahasa politik. Sehingga Alqur'an sebagai buku suci umat Islam dapat dirujuk sebagai sumber ajaran agama dan politik sekaligus. Perpaduan ini, menurutnya, menjadi rujukan bagi ulama dalam menyusun karya ilmiahnya. Dia mencontohkan, Ibn Taimiyah yang hidup pada masa 1263 – 1328

yang menulis buku *as-Siyasah asy-Syar'iyah* (politik keagamaan) berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara saling berkelindan. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi tiranik.

Tidak adanya pemisahan antara agama dan negara juga disampaikan oleh al-Mawardi yang hidupnya lebih dahulu dibanding Taimiyah, yakni pada masa 975 – 1058. Al-Mawardi mengatakan bahwa politik dalam Islam merupakan kegiatan untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem dan pemerintahan. Dari sinilah ditegaskan tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Pandangan seperti ini juga disampaikan oleh Deliar Noer dan A. Syafi'i Ma'arif. Deliar Noer mengatakan, Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dibedakan. Sedang Syafi'i

Ma'arif menuturkan, agama dan politik adalah sesuatu yang integral.

Dari bedah buku Jazilul Fawaid ini membuat Muhaimin Iskandar memujinya. Muhaimin mengatakan, buku yang ditulis merupakan suatu usaha akademik yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan pemahaman umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, tentang demokrasi dan politik yang *islami*. Politik *islami* yang dimaksud di sini bukanlah gerakan politik ideologis untuk melegalformalkan Islam, tetapi politik *islami* adalah praktik berpolitik yang dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi moralitas dan musyawarah (demokrasi) dalam segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. □

AWG

